

**MANAJEMEN DAKWAH MUHAMADIYAH DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DI KABUPATEN GARUT JAWA BARAT**

DISERTASI

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Ilmu Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam**

Oleh

**Ace Toyib Bahtiar
NPM :1670031009**



**PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
2020 M / 1441 H**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usia agama sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri. Sudah banyak agama yang dijadikan pedoman manusia dalam beribadah dan bermualah sejak puluhan ribu tahun lalu sampai saat ini. Di antara agama tersebut ada agama-agama yang masuk dalam kategori agama dakwah. Menurut Thomas W. Arnold, agama dakwah ialah agama yang memiliki kepentingan suci untuk menyebarkan kebenaran dan menyadarkan orang kafir sebagaimana dicontohkan sendiri oleh penggagas agama itu dan diteruskan oleh para penggantinya. Menurutnya, agama Islam, Kristen dan Buddha termasuk agama dakwah, sedangkan agama Yahudi, Majusi dan Hindu termasuk agama non dakwah.¹

Khusus dalam Islam, menurut M. Natsir, Islam adalah agama risalah dan dakwah. Risalah yang dipikulkan kepada penyampainya, Rasulullah SAW, berisi berita gembira dan peringatan dengan alam risalah adalah seluruh umat manusia. Sedangkan intisari yang dibawa oleh Rasulullah SAW ialah pentunjuk, pedoman, *huda*, bagaimana manusia dapat menjaga nilai dan martabat kemanusiaannya itu, supaya jangan sampai meluncur jatuh. Malah supaya bakat potensinya dapat berkembang, mutunya meningkat mencapai tingkat yang lebih tinggi.²

Sedangkan doktrin dakwah dalam Islam diungkap oleh Al-Qur`an sendiri dan dibuktikan melalui jejak rekam sejarah Rasulullah SAW, sahabat dan para

¹Thomas W. Arnold, *The Preaching of Islam*, London Constable & Company Ltd., Second Edition Revised and Enlarged, 1913, p.10.

² M. Natsir, *Fiqhud Da`wah*, Jakarta: Media Da`wah, Tahun 1988, Cetakan Kelima, hal. 10-11.

ulama. Dalam kajian sejarah dakwah Islam, seperti yang ditulis oleh H. Syamsuddin RS di dalam bukunya yang berjudul *Sejarah Dakwah*, sangat jelas tercatat mengenai kiprah dakwah Rasulullah SAW dengan manhaj dakwahnya yang terbagi dalam dua periode, yaitu periode Mekkah dan periode Madinah yang dilanjutkan setelah wafatnya oleh para sahabat di masa Khulafaur Rasyidin, kemudian pada zaman Dinasti Umayyah, dilanjutkan pada Dinasti Abbasiyah sampai ke masa dakwah Islam di Indonesia.³ Dengan demikian, sudah terbukti dan menjadi aksioma bahwa dakwah Islam sebagai sesuatu yang inheren dari ajaran Islam itu sendiri.

Namun demikian, dakwah dapat berjalan secara efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan jika menggunakan manajemen yang baik, sehingga munculnya ilmu manajemen dakwah.

Manajemen dakwah adalah terminologi yang terdiri atas dua kata, yakni manajemen dan dakwah. Kedua kata ini berangkat dari dua disiplin ilmu yang sangat berbeda sama sekali. Istilah yang pertama, berangkat dari disiplin ilmu umum, yakni ilmu ekonomi. Ilmu ini diletakan di atas paradigma materialistis. Prinsipnya adalah dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sementara itu istilah yang kedua berasal dari khazanah Islam, yakni ilmu dakwah. Ilmu ini diletakan di atas prinsip, ajakan menuju keselamatan dunia dan akhirat, tanpa paksaan dan intimidasi serta tanpa bujukan dan iming-iming material. Dia datang dengan tema menjadi rahmat semesta alam.

³Syamsuddin RS, *Sejarah Dakwah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Tahun 2016, hal.30-229.

Namun dalam perkembangan ilmu dakwah, dikarenakan ilmu manajemen dipandang penting dalam menyukseskan dakwah, Ilmu manajemen kemudian dimasukkan sebagai bagian dari disiplin ilmu dakwah yang diistilahkan dengan manajemen dakwah. Secara istilah, manajemen dakwah adalah proses perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas dan kemudian menggerakkan ke arah pencapaian tujuan dakwah.⁴

Istilah manajemen dakwah yang diberikan oleh A. Rosyad Shaleh di atas menurut M. Munir dan Wahyu Ilaihi merupakan inti dari manajemen dakwah, yaitu sebuah pengaturan secara sistematis dan koordinatif dalam kegiatan atau aktivitas dakwah yang dimulai dari sebelum pelaksanaan sampai akhir dari kegiatan dakwah.

Manajemen dakwah menjadi penting untuk dimiliki oleh para dai, komunitas atau lembaga dakwah Islam jika dakwah juga dipahami sebagai instrumen bagi pemasyarakatan (sosialisasi) pembangunan dengan mendasarkan pada nilai-nilai spiritualitas sebagai sumber inspirasi dan motivasi pembangunan.

Menurut H. Achmad Tirtosudiro, di masa depan, keberhasilan dakwah akan dilihat dengan menggunakan indikator sejauh mana umat beragama terlibat secara proaktif dalam pembangunan bangsa. Keterlibatan tidak saja secara fisik turut andil di dalam proses pembangunan, namun yang lebih esensial adalah meletakkan dasar pondasi nilai-nilai, asas dan kaidah-kaidah pembangunan bangsa yang berdimensi spiritual.⁵

⁴M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Prenada Media, Tahun 2006, Cet. Ke-1, hal.36.

⁵Achmad Tirtosudiro, *Metode Pembangunan Qaryah Thayyibah: Suatu Pendekatan Pemerataan Pembangunan*, Jakarta: PT Intermedia, Tahun 1997, Cet. Ke-1, hal. xxiii.

Kini, setelah melalui sejarah dan perkembangan yang panjang. Manajemen dakwah menjadi disiplin ilmu yang menjadi bagian dari ilmu dakwah. Namun demikian, pada praktiknya, manajemen dakwah sendiri sudah diterapkan sejak awal dakwah Islam dilakukan oleh Rasulullah saw., para sahabat, para dai, sampai ke masa para dai penyebar Islam pertama di Nusantara hingga berkembang ke masa para pendiri ormas Islam di Indonesia, dalam hal ini Muhammadiyah.

Dalam dakwahnya, Muhammadiyah memilih konsep dakwah kultural. Munculnya konsep dakwah kultural, sebagaimana diputuskan oleh Sidang Tanwir Muhammadiyah, Januari 2002, di Bali, didorong oleh keinginan Muhammadiyah untuk mengembangkan sayap dakwahnya menyentuh ke seluruh lapisan umat Islam yang beragam kondisi sosio-kulturalnya.

Dengan dakwah kultural, Muhammadiyah ingin memahami pluralitas budaya, agar dakwah yang ditujukan kepada mereka dilakukan dengan dialog kultural, sehingga akan mengurangi benturan-benturan yang selama ini dipandang kurang menguntungkan. Akan tetapi, dakwah itu sendiri tetap berpegang pada prinsip pemurnian (*salafiyyah*) dan pembaruan (*tajdidiyah*). Dengan demikian, dakwah kultural sebenarnya akan mengokohkan prinsip-prinsip dakwah dan amar ma`ruf nahi munkar Muhammadiyah yang bertumpu pada tiga prinsip: *tabsyir*, *ishlah*, dan *tajdid*.⁶

Prinsip *tabsyir* adalah upaya Muhammadiyah untuk mendekati dan merangkul setiap potensi umat Islam (umat *ijabah*) dan umat non-Muslim (umat *da`wah*) untuk bergabung dalam naungan petunjuk Islam dengan cara-cara yang bijaksana, pengajaran dan bimbingan yang baik, dan *mujadalah* (diskusi dan debat) yang lebih baik. Kepada umat *ijabah* (umat yang telah memeluk Islam),

⁶Syamsul Hidayat, "Tafsir Kebudayaan Muhammadiyah" Jurnal Kebudayaan Akademika, Vol 1, No. 1, April 2003, hal. 66-67.

tabisyir ditekankan pada peningkatan dan penguatan visi atau semangat dalam ber-Islam. Sementara, kepada umat dakwah (non-Muslim), *tabisyir* ditekankan pada pemberian pemahaman yang benar dan menarik tentang Islam, serta merangkul mereka untuk bersama-sama membangun masyarakat dan bangsa yang damai, aman, tertib dan sejahtera.

Prinsip *ishlah* ialah upaya membenahi dan memperbaiki cara ber-Islam yang dimiliki oleh umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, dengan cara memurnikannya sesuai petunjuk syar'i yang bersumber pada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat diartikan bahwa setelah melakukan dakwah dengan *tabisyir*, maka umat yang bergabung diajak bersama-sama memperbaiki pemahaman dan pengamalannya terhadap Islam. Umat yang telah bergabung dalam dakwah *tabisyiriyah* memiliki latar belakang yang beragam baik sosial-ekonomi, sosial-budaya, maupun latar belakang pendidikannya. Keragaman tersebut akan membawa pengaruh pada cara pandang, pemahaman, dan pengamalan Islam yang dalam banyak hal perlu diperbaiki dan dibenahi sesuai dengan pemahaman keagamaan Muhammadiyah, yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Prinsip *tajdid*, sesuai dengan maknanya, ialah mengupayakan pembaharuan, penguatan, dan pemurnian atas pemahaman dan pengamalan Islam yang dimiliki oleh umat *ijabah*, termasuk pelaku dakwah itu sendiri. Baik prinsip *ishlah* maupun *tajdid* banyak dilakukan dengan cara menyelenggarakan pengajian dan *ta`lim*, baik bersifat umum maupun terbatas. Juga mendirikan sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, dan pondok pesantren. Juga dalam bentuk penyelenggaraan riset dan pengembangan dalam pemikiran keislaman, sehingga prinsip Islam dapat diterjemahkan secara ilmiah dan aktual.⁷

⁷Syamsul Hidayat, "Tafsir Kebudayaan Muhammadiyah" Jurnal Kebudayaan Akademika, Vol 1, No. 1, April 2003, hal. 66-67.

Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai salah satu organisasi dakwah Islam di dunia yang telah mampu menerapkan manajemen dakwah dengan baik. Penilaian ini berdasarkan minimal dua hal, yaitu: Pertama, dikarenakan jumlah anggota dari organisasi yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 Nopember 1912 ini telah tersebar tidak saja di Indonesia, tetapi juga menembus Singapura, Malaysia; dan kedua, luasnya medan dakwah yang digarap oleh Muhammadiyah: sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, poliklinik, rumah yatim dan lain-lain. Sehingga wajar jika James L. Peacock, antropolog dari University of North Carolina, Chapel Hill, Amerika Serikat yang telah mengamati perkembangan Muhammadiyah sejak tahun 1970-an, menyatakan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan reformasi Islam yang terkuat yang ada di kalangan Islam di Asia Tenggara, bahkan mungkin di seluruh dunia Islam.”⁸

Keberhasilan Muhammadiyah tersebut tidak mungkin diraih jika manajemen dakwahnya tidak baik dan unggul yang telah dirintis sejak awal Muhammadiyah berdiri oleh pendirinya, K.H. Ahmad Dahlan. Dia sangat menguasai manajemen dakwah. Misalnya dalam perencanaan dakwah, dia terlebih dahulu melakukan analisis SWOT terhadap medan dakwahnya. Sehingga dia mampu menyimpulkan bahwa medan dakwah yang harus diprioritaskan dan digarap pertama kali oleh Muhammadiyah adalah pendidikan. Dikarenakan betapa pendidikan Islam yang ada pada zamannya itu sudah impoten dan steril sehingga tidak mampu menghadapi tantangan baru yang dibawa oleh misi Kristen yang ditopang oleh kekuasaan kolonial. Maka untuk membangun kembali umat Islam, serta memerangi keterbelakangan umat, bidang pendidikan harus diberi prioritas yang tinggi.⁹

⁸ James L. Peacock, *Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam di Indonesia*, Jakarta: Citra Kreatif, Tahun 1986, hal. 5.

⁹Weinata Sairin, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Tahun 2008, Cet. Ke-2, hal.53.

Dalam masalah manajemen keuangan untuk kelancaran dakwah Muhammadiyah, Muhammadiyah telah melakukan langkah maju dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 38/KEP/1.0/C/2012 tentang Iuran Anggota, Infak Tetap, Infaq Siswa dan Mahasiswa serta Alokasi Dana Persyarikatan. Menurut M. Yunan Yusuf bahwa SK ini merupakan langkah konkrit Muhammadiyah untuk dua hal, yaitu: Pertama, untuk mendukung kesinambungan dan kemandirian Persyarikatan Muhammadiyah dalam menyampaikan dakwah Islamiyah yang sesuai dengan Alquran dan Assunah; dan kedua, untuk menghindari agar kita (para pengurus Muhammadiyah) tidak terkena impeachment atau pemakzulan disebabkan karena tidak melaksanakan ketentuan dalam AD/ART, sebab iuran dan infaq telah ditetapkan dalam AD/ART Muhammadiyah Bab XI Pasal 36 AD.¹⁰

Dengan manajemen dakwah yang baik dan unggul, Muhammadiyah dapat melakukan pemberdayaan-pemberdayaan masyarakat dalam tiga bidang utama, yaitu bidang agama, bidang pendidikan dan bidang sosial-kemasyarakatan.

Khusus bidang sosial-kemasyarakatan, Muhammadiyah memiliki perhatian yang besar. Kegiatan-kegiatan sosial-kemasyarakatan Muhammadiyah merupakan reaksi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kristen. Sehingga kegiatan Muhammadiyah ada yang mirip dengan kegiatan pihak Kristen. Hal tersebut dicatat oleh beberapa penulis Barat, seperti Benda atau Drewes dan diakui oleh Syafii Maarif, seorang pemikir Muhammadiyah sendiri.¹¹Benda mengatakan:”Pekerjaan dakwah yang teratur membawakan syi`ar Islam yang sudah dipersegar ke daerah-daerah pedesaan. Organisasi-organisasi pemuda dan

¹⁰M. Yunan Yusuf, *Analog dengan Negara, Iuran dan Infaq adalah Ketentuan Konstitusi*, Jakarta: Tim Asisten Bendahara Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.t., h. 1.

¹¹Ibid.,hal. 75.

wanita, klinik-klinik dan rumah-rumah wakaf dan sekolah-sekolah baru semuanya menunjukkan sejauh mana Muhammadiyah secara berhasil telah mengambil alih metode-metode Barat,...”¹²

Perhatian pertama Muhammadiyah terhadap bidang sosial-kemasyarakatan dimulai dengan menetapkan suatu lembaga yang bernama Penolong Kesengsaraan Umum (PKU). Mula-mula lembaga ini didirikan oleh beberapa orang pemimpin Muhammadiyah pada tahun 1918, dan berstatus sebagai organisasi yang berdiri sendiri.

Pada tahun 1921, organisasi yang memberikan bantuan bagi orang-orang miskin dan yatim piatu itu, menjadi bagian dari organisasi Muhammadiyah, dan namanya kemudian dikembangkan menjadi Pembina Kesejahteraan Umat.

Dalam Mukhtamar Muhammadiyah di Ujung Pandang, kriteria sejahtera itu dirumuskan sebagai berikut:

1. Bertaqwa, iman yang saleh, terjaga pribadi lahir dan batin;
2. Sehat mental dan fisik;
3. Saling mencintai dan tolong menolong;
4. Berpengetahuan yang berfaedah, mempunyai penghasilan yang halal, dan berfaedah bagi masyarakat, nusa dan bangsa;
5. Kebutuhan hidupnya tercukupi baik materiil maupun spiritual;
6. Hak asasinya terjamin;
7. Giat gembira menegakan kebajikan dan dipimpin oleh pemimpin yang dipatuhi.

Maka, dalam rangka mewujudkannya, tugas Majelis PKU, yaitu lembaga yang membantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam hal pelaksanaan program

¹²Ibid.

sosial-kemasyarakatan adalah penyelenggaraan amal usaha serta tugas pekerjaan persyarikatan dalam bidang kesejahteraan sebagai sarana dakwah.¹³

Khusus masalah pemberdayaan ekonomi umat, Muhammadiyah membentuk Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK). Muhammadiyah memiliki keseriusan untuk menggarap bidang ekonomi sehingga pada Mukhtamar ke-47 2015 di Makassar, bidang ekonomi ditetapkan menjadi pilar ketiga gerakan dakwah Muhammadiyah.

Untuk memantapkan kerja MEK, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga telah merancang *grand design* gerakan ekonomi melalui rapat kerja nasional (rakernas) MEK. Rakernas ini digelar di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada bulan Mei 2016.

Dalam perkembangannya, MEK menjalankan aktivitas dan lebih operasional. juga memiliki sejumlah koperasi dan perusahaan, yang dikenal sebagai BUMM (perusahaan milik Muhammadiyah), yang darinya memperoleh laba operasi, dan juga dari 12 BPRS dan lembaga keuangan lainnya. Data terakhir pada tahun 2009, Muhammadiyah memiliki 128 lembaga keuangan mikro, baitul tanwil Muhammadiyah), 242 koperasi usaha mandiri (mandiri usaha koperasi), dan kini berada di ranah intelektual untuk membangun kewirausahaan melalui penelitian dan pengembangan. yang melibatkan 33 forum aktif dekan ekonomi ekonomi dari 168 Universitas dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), yang kesemuanya terkait dengan jaringan yang menjaga Muhammadiyah terus meningkat. Program yang sedang berjalan, Muhammadiyah mengembangkan model pemberdayaan usaha mikro yang terbaru, dasar untuk membuat peta potensi ekonomi dan menganjurkan kebijakan ekonomi.

MEK melalui LKM 128, tersebar di seluruh Indonesia telah berpartisipasi dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui berbagai program.

¹³Ibid.,hal. 76.

Pada tahun 2011, MEK telah melakukan proses bantuan manajemen bisnis dan menyediakan akses terhadap modal. Pada tahun 2015, 1.000 orang pemuda mendapatkan bantuan. MEK juga merencanakan pembangunan ekonomi dengan menyediakan akses terhadap modal ventura dan pemasaran, pengusaha mikro kecil yang berasal dari masyarakat berpendapatan rendah.

Kini, Muhammadiyah telah melewati satu abad dari usianya (1915-2015). Penandanya ialah Muktamar Satu Abad di Yogyakarta dan Milad Muhammadiyah Satu Abad yang baru berlalu. Menurut Dr. Zakiyuddin Baidhawiyah bahwa Muktamar dan Milad Satu Abad merupakan perhelatan akbar yang krusial, karena ia menjadi cermin tentang perlunya "gerakan tajdid" sebagai identitas dakwah Muhammadiyah untuk direvitalisasi. Revitalisasi (baca: tajdid) gerakan dakwah sangat mendesak agar organisasi Islam ini tidak berkubang dalam kontinuitas tanpa perubahan. Tujuannya ialah agar Muhammadiyah keluar dari cangkangnya, yakni kejumudan dakwah yang terperangkap dalam rutinitas amal usaha minus kreativitas dan inovasi, baik dalam aspek pemikiran maupun praksis. Abad kedua merupakan batu ujian bagi Muhammadiyah. Apakah Muhammadiyah mampu membangkitkan kembali *elan vital* sebagai gerakan dakwah pembaruan, atau justru makin memfosil dan lapuk dimakan ganasnya pergulatan ideologi dan pemikiran. Meski Rasulullah Muhammad saw. pernah memprediksi bahwa setiap seratus tahun akan muncul mujadid baru yang gigih memperbaiki agamanya (*man yujaddidu laha dinaha*), boleh jadi peluang ini dimanfaatkan oleh gerakan dakwah Islam lainnya.¹⁴

Prestasi-prestasi dakwah Muhammadiyah dalam pemberdayaan umat selama satu abad lebih dari perjalanannya tentu diraih dengan kerja keras dan

¹⁴Zakiyuddin, Baidhawiyah, „*Satu Abad Muhammadiyah: Pergeseran Paradigma Dakwah*,” Majalah Basis, Edisi Januari 2011, hal.1.

dengan manajemen yang baik dan unggul. Karenanya menjadi menarik bagi saya untuk meneliti manajemen dakwah Muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Garut, Jawa Barat sebab dapat menghasilkan kesimpulan perlu tidaknya revitalisasi, terutama dalam manajemen dakwah di Muhammadiyah yang selama ini telah diterapkan.

B. Identifikasi Masalah

Saya memilih Kabupaten Garut, Jawa Barat sebagai tempat penelitian manajemen dakwah Muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi umat karena karena keberadaan Muhammadiyah di Kabupaten Garut sudah sangat lama, sudah ada sebelum kemerdekaan, namun dalam masalah ekonomi, mayoritas masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat belum tersejahterakan.

Padahal, secara wilayah, Kabupaten Garut merupakan daerah terluas kedua di Propinsi Jawa Barat. Tak hanya memiliki wilayah yang luas, Garut juga memiliki Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang melimpah. Ini dapat dikatakan sebagai bonus demografi bagi kabupaten tersebut. Sayang, keberlimpahan tersebut tidak tergarap dengan baik selama ini. Akibatnya, Kabupaten Garut pernah mendapat predikat sebagai Daerah Tertinggal pada tahun 2005 hingga 2014.

Sebagai daerah pegunungan, Garut sesungguhnya memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Sumber energi dari panas bumi berkapasitas 1500 MW yang dikelola oleh perusahaan multi international CHEVRON dan juga Pertamina Geothermal. Sedangkan dibidang energi lain, Garut memiliki sumber daya air – micro hidro – yang berkapasitas sekitar 200 MW.

Dengan sumber daya yang sedemikian, maka Kabupaten Garut sebenarnya bukanlah termasuk kabupaten yang tidak memiliki potensi alam yang bisa menghasilkan untuk kesejahteraan masyarakat dan daerahnya. Sehingga perlu diteliti tentang manajemen dakwah Muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Agar penelitian ini fokus pada persoalannya, maka masalah pada penelitian ini dibatasi hanya tentang manajemen dakwah Muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Garut, Jawa Barat?
2. Bagaimana manajemen dakwah Muhammadiyah dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat?
3. Bagaimana manajemen dakwah Muhammadiyah, khususnya di perencanaan dan pelaksanaan, dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Garut?
4. Bagaimana pola pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui lembaga ekonomi Muhammadiyah Garut?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Garut, Jawa Barat
2. Untuk mengetahui manajemen dakwah Muhammadiyah dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

3. Untuk mengembangkan konsep manajemen dakwah Muhammadiyah, khususnya di perencanaan dan pelaksanaan, dari pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Garut.
4. Untuk mengembangkan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui lembaga ekonomi Muhammadiyah Garut.

Untuk manfaat, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagaimana berikut:

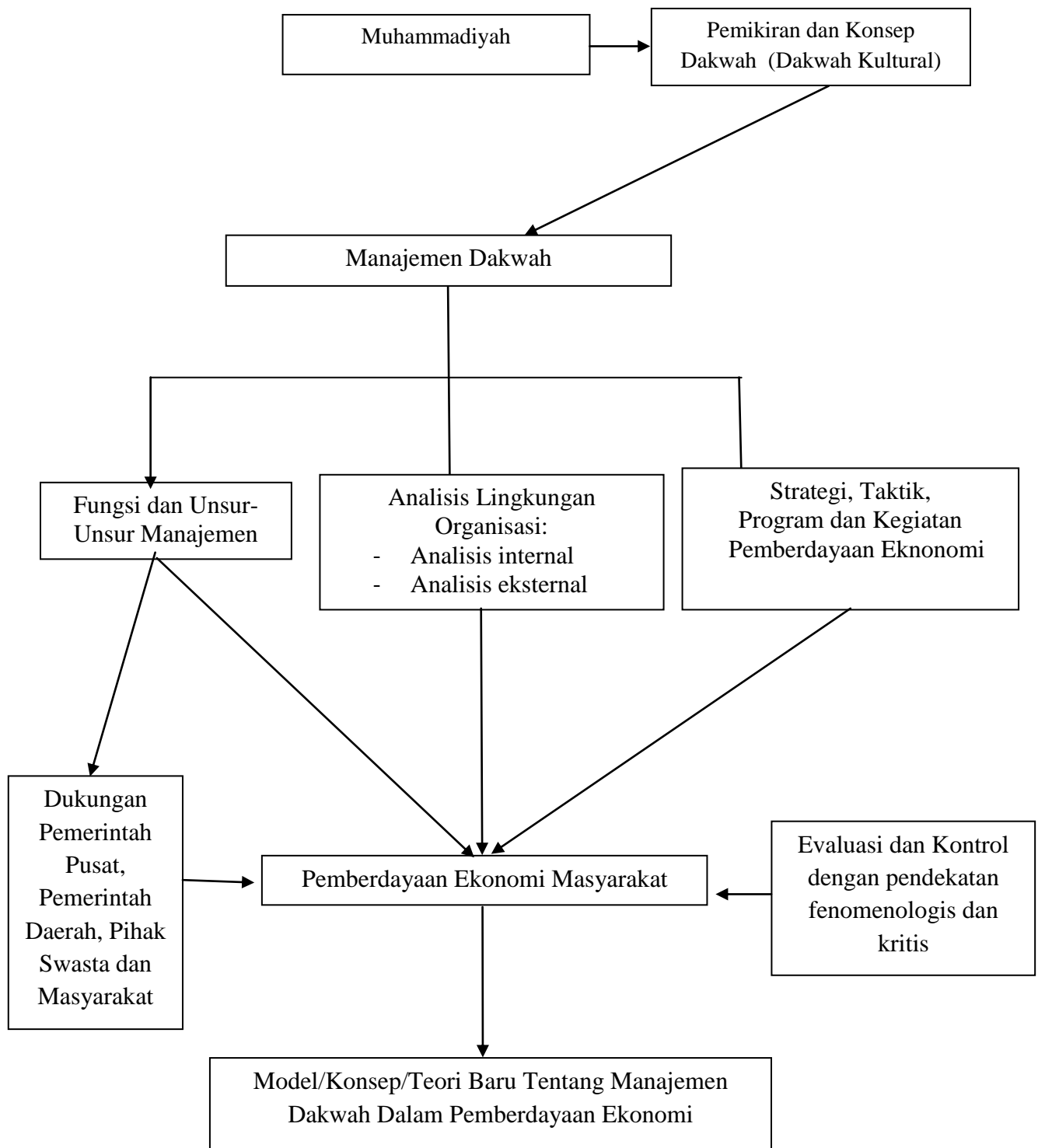
1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian dilakukan dengan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- b. Penerapan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan digunakan sebagai alat analisis.
- c. Untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan di bidang manajemen dakwah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi sesama mahasiswa atau kalangan akademis, hasil penelitian ini akan meningkatkan kemampuan manajemen dakwah mereka dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- b. Referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan diadakannya penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.
- c. Penelitian yang dilakukan ini dapat berguna bagi para pihak yang terkait dalam menggunakan manajemen dakwah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

E. Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir di atas dapat dijelaskan bahwa sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang dakwah dengan usia dan pengalaman yang telah telah matang, Muhammadiyah telah memiliki pemikiran dan konsep dakwah yang mumpuni, telah teruji dan terus berkembang.

Secara historis-kronologis dapat diketahui bahwa Muhammadiyah selalu meninjau dan menyempurnakan konsep dakwahnya, baik dalam tataran teoritik-ideologis maupun pada tataran strategi, taktik dan teknis operasional.

Pada tataran ideologis, Muhammadiyah senantiasa merumuskan kembali prinsip-prinsip perjuangan dan dakwahnya, ketika terjadi perubahan di dalam masyarakat. Perubahan dimaksud, bukan diarahkan kepada pergeseran haluan dakwah, tetapi lebih pada penyempurnaan konsep ideologisnya sebagai antisipasi atas perubahan sosial yang terjadi. Hal ini dapat dikaji, betapa konsistensi pemikiran dan prinsip dakwah Muhammadiyah, mulai dari Muqadimah AD, Kepribadian Muhammadiyah, Keyakinan dan Cita-cita Hidup, hingga Pedoman Hidup Islami.¹⁵

Referensi konsep dakwah Muhammadiyah yang dipandang memiliki cakupan cukup lengkap adalah buku dengan judul *Islam dan Dakwah: Pergumulan antara Nilai dan Realitas* yang disusun dan diterbitkan Majelis Tabligh PP Muhammadiyah 1985-1990 yang disunting oleh Ahmad Watik Pratiknya, anggota pengurus Majelis Tabligh pada saat itu. Buku tersebut memuat pokok-pokok pikiran mengenai: (1) pandangan hidup Islam, seperti konsep Islam, iman, ihsan dan takwa, hakekat ibadah dan akhlak, (2) Islam sebagai landasan kehidupan Muslim, seperti Islam sebagai sumber hukum, Islam sebagai sumber

¹⁵ Hamdan Hambali, *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2006, Cet Ke-1, hal. 2.

konsep, pandangan Islam tentang keadilan sosial, kebudayaan, kekuasaan, ekonomi dan pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Islam dalam dinamika sejarah, (3) hakikat Muhammadiyah, (4) Gambaran masyarakat Indonesia, (5) Identifikasi Permasalahan Dakwah, (6) Pola Kebijaksanaan Dakwah Muhammadiyah dan (7) Kompetensi da'i dan mubaligh Muhammadiyah.¹⁶

Dalam perkembangannya, Muhammadiyah merumuskan dan memilih dakwah kultural sebagai strategi perubahan sosial bertahap sesuai dengan kondisi empirik yang diarahkan kepada pengembangan kehidupan Islami sesuai dengan paham Muhammadiyah.

Dakwah kultural ini bertumpu pada pemurnian pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dengan menghidupkan ijtihad dan tajdid, sehingga purifikasi dan pemurnian ajaran Islam tidak harus menjadi kaku, rigid, dan eksklusif, tetapi menjadi lebih terbuka dan memiliki rasionalitas yang tinggi untuk dapat diterima oleh semua pihak. Dengan memfokuskan pada penyadaran iman melalui potensi kemanusiaan, diharapkan umat dapat menerima dan memenuhi seluruh ajaran Islam yang *kaffah* secara bertahap sesuai dengan keragaman sosial, ekonomi, budaya, politik, dan potensi yang dimiliki oleh setiap kelompok umat.

Rumusan dakwah kultural Muhammadiyah merupakan hasil dari Sidang Tanwir yang telah dibukukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dijelaskan bahwa: “Dakwah kultural merupakan menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.”¹⁷

¹⁶ A. Watik Pratiknya (ed.), *Islam dan Dakwah: Pergumulan antara Nilai dan Realitas*, Yogyakarta: PP Muhammadiyah Majelis Tabligh, 1988, hal. viii-ix.

¹⁷ Muhammadiyah, *Dakwah Kultural Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004, Cet. Ke-1, hal. 26.

Atas dasar pemikiran tersebut, dakwah kultural dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu pengertian umum (makna luas) dan pengertian khusus (makna sempit). Dakwah kultural dalam arti luas dipahami sebagai kegiatan dakwah dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk berbudaya dalam rangka menghasilkan kultur alternatif yang bercirikan Islam, yakni berkebudayaan dan berperadaban yang dijiwai oleh pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam yang murni bersumber dari al-Quran dan sunnah Nabi, serta melepaskan diri dari kultur dan budaya yang dijiwai oleh syirik, takhayul, bid'ah, dan khurafat.¹⁸ Adapun dalam pengertian khusus, dakwah kultural adalah kegiatan dakwah dengan memperhatikan, memperhitungkan, dan memanfaatkan adat-istiadat, seni, dan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dalam proses menuju kehidupan Islami sesuai dengan manhaj Muhammadiyah yang bertumpu pada prinsip tajdid, dengan purifikasi dan dinamisasi (pembaruan).

Untuk memaksimal hasil dari pelaksanaan pemikiran dan konsep dakwah kulturalnya, dalam hal ini di bidang pemberdayaan ekonomi, Muhammadiyah menggunakan manajemen dakwah, yaitu sebuah pengaturan secara sistematis dan koordinatif dalam kegiatan atau aktivitas dakwah yang dimulai dari sebelum pelaksanaan sampai akhir dari kegiatan dakwah.

Manajemen dakwah untuk pemberdayaan ekonomi ini mencakup tiga hal, yaitu: pertama, fungsi dan unsur-unsur manajemen dakwah; kedua, analisis

¹⁸ Tim Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus, "Konsep Dakwah Kultural" *makalah* disampaikan pada Sidang Tanwir Muhammadiyah di Denpasar Bali, 24-27 Januari 2002; Syamsul Hidayat. "Dakwah Kultural dalam Dinamika Purifikasi Gerakan Muhammadiyah" dalam *Jurnal Shabran* Edisi 02, Vol. XIX, April 2005, hal. 7.

lingkungan organisasi yang terdiri atas analisis internal dan analisis eksternal; dan ketiga, strategi, taktik, program dan kegiatan pemberdayaan ekonomi.

Pelaksanaan dari fungsi dan unsur-unsur manajemen dakwah oleh Muhammadiyah dimaksudkan juga untuk dapat memaksimalkan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat terhadap program dan kegiatan pemberdayaan ekonomi, dalam hal ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk masyarakat Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Konsep pemberdayaan ekonomi Muhammadiyah tidak terlepas dari konsep pemberdayaan secara umum. Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut, pertama, Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi, kedua, Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran, ketiga, Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi, keempat Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).¹⁹

¹⁹ Todaro, Michael P, dan Smith, Stephen C, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan*, Jakarta : Penerbit Erlangga, Tahun 2004, hal, 21.

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini *good governance* yang telah dielu-elukan sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, baik dalam tatanan pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan. *Good governance* adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat dan usahawan swasta.²⁰

Namun demikian, lazimnya sebuah proses manajemen, pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang telah dan sedang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk masyarakat Kabupaten Garut, Jawa Barat harus terus dievaluasi dan dikontrol agar dapat diukur tingkat kegagalan dan keberhasilannya sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. Juga program dan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Muhammadiyah, khususnya di Kabupaten Garut semakin berkualitas dengan hasil yang maksimal.

²⁰Ibid. hal. 21,

Untuk kepentingan penelitian ini, evaluasi dan kontrol tersebut menggunakan pendekatan fenomenologis dan kritis sehingga diharapkan dapat melahirkan model, konsep, Teori baru tentang manajemen dakwah dalam pemberdayaan ekonomi.

F. Kajian Yang Relevan

Penelitian ini tentang manajemen dakwah Muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Berdasarkan hasil kajian peneliti, maka ditemukan beberapa hasil penelitian yang relevan, yaitu:

1. Penelitian Edyanto Karsiman pada tahun 2018

Penelitian Edyanto Karsiman yang berjudul *Peran Muhammadiyah dalam Pemberdayaan masyarakat Kokoda di Kota Sorong*. Penelitian ini telah dipublikasikan di Jurnal Noken, Volume 4 Tahun 2018.

Pada penelitian ini dijelaskan bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan dengan senantiasa berpegang pada amar ma'ruf nahi munkar terbukti telah berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, baik dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun sosial kemasyarakatan lainnya.

Kondisi komunitas Kokoda miskin dan sangat memprihatinkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana peran Muhammadiyah dalam pemberdayaan masyarakat Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dihimpun melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Muhammadiyah dalam pemberdayaan masyarakat Kokoda di Kota Sorong belum optimal meskipun telah memiliki berbagai amal

usaha yang cukup dikenal di Kota Sorong. Hal tersebut terlihat dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah terhadap masyarakat Kokoda di Kota Sorong hanya berupa pembagian paket sembako pada bulan puasa. Pemberian beasiswa Lazismu yang diberikan kepada mahasiswa Kokoda belum sepenuhnya dinikmati oleh mahasiswa Kokoda. Karenanya, dihadapkan adanya optimalisasi peran Muhammadiyah dalam pemberdayaan masyarakat Kokoda di Kota Sorong.

2. Penelitian Alvien Septian Haerisma pada tahun 2015

Penelitian Alvien Septian Haerisma ini berjudul *Pola Pemberdayaan Ekonomi Umat di Organisasi Masyarakat Muhammadiyah Kota Cirebon* yang telah diterbitkan di Jurnal Al-Amwal, Volume 7, nomor 2, Tahun 2015. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa rmas secara umum memiliki fungsi yang sama guna memberdayakan anggotanya juga masyarakat lain, hal ini sesuai dengan Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon, Jawa Barat menunjukkan keberadaannya sejak tahun 2006 di berbagai bidang diantaranya keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya dan lainnya. Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Data dan sumber data terbagi 2 yaitu: data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi partisipan, wawancara mendalam atau indept interview, dokumentasi. Dari penelitian ini ditemukan pola-pola pemberdayaan ekonomi (Kasus Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Cirebon) yaitu: 1. Membangun kesadaran dan kekuatan ekonomi umat, 2.

Pembentukan dan pengembangan Koperasi Syariah “INSAN MULIA”, 3. Penggalangan kerjasama dan jaringan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Cirebon dalam pemberdayaan ekonomi umat yaitu: 1. Paradigma berfikir, 2. Banyaknya sumber daya manusia yang purna waktu, 3. Penyadaran pada umat seperti faktor modal atau biaya, 4. Sumber daya manusia yang bersifat mobilitas ekonomi personal terbatas.

3. Penelitian Mahfudlah Fajrie 2014

Penelitian Mahfudlah Fajrie ini berjudul *Metode dan Strategi Dakwah Muhammadiyah di Kabupaten Demak* yang telah diterbitkan di Jurnal An-Nida, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2014.

Di penelitian ini dijelaskan bahwa sejak era reformasi dakwah Muhammadiyah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah mulai mendapat tanggapan positif. Karenanya, untuk meningkatkan kegiatan dakwah maka perlu adanya strategi, manajemen dan pengelolaan dakwah dengan baik, agar dakwahnya berhasil dan pesan yang disampaikan diterima oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui metode dan strategi dakwah Muhammadiyah di Kabupaten Demak periode 2006-2011. Penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian Mahfudlah Fajrie ini menunjukkan bahwa metode dakwah Muhammadiyah di Kabupaten Demak meliputi:

Pertama, metode dakwah bi al-ḥikmah (cara hikmah). Hal ini dilakukan karena beberapa dari masyarakat Kabupaten Demak belum dapat menerima keberadaan Muhammadiyah di lingkungannya. Dakwah al-ḥikmah yang dilakukan Muhammadiyah di Kabupaten Demak adalah memberikan pemahaman mengenai Muhammadiyah dan ajaran Islam yang sebenarnya serta memberikan pemahaman bahwa Muhammadiyah adalah mengikuti nabi Muhammad sesuai dengan ajaran-ajarannya. Metode dakwah al-ḥikmah yang dilakukan Muhammadiyah ini tercermin dalam kegiatan pengajian, baik pengajian umum maupun pengajian khusus anggota Muhammadiyah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Jadi antara metode dakwah al-ḥikmah dengan strategi dakwah mengedepankan ajaran Islam sesuai syariat yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, saling berkesinambungan. Namun, memberikan pemahaman mengenai ajaran dan ibadah sesuai tuntunan Islam yang benar kepada masyarakat Kabupaten Demak bukan hal yang mudah, karena hal ini menyangkut masalah kepercayaan atau ideologi yang selama ini sudah diyakini dan difahami oleh masyarakat Kabupaten Demak. Oleh karena itu Muhammadiyah di Kabupaten Demak dalam berdakwah 27 bersifat pelan dan bijaksana. Namun, hal ini terkadang membuat benturan dalam tubuh Muhammadiyah sendiri, karena pimpinan maupun anggota Muhammadiyah di Kabupaten Demak bermacam-macam karakternya, ada yang bersifat moderat, ada pula yang keras, sehingga hal

ini berdampak pada cara menyampaikan materi dalam berdakwah. Selain melalui kegiatan pengajian dengan memberikan pemahaman serta menjelaskan ajaran Islam dan ketentuan ibadah yang benar kepada masyarakat, Muhammadiyah di Kabupaten Demak juga terlebih dahulu memberikan pemahaman dan mengarahkan para anggota keluarga dan sanak saudaranya untuk menjalankan ajaran Islam sesuai syari'at. Jadi, dakwah bi al-ḥ ikmah yang dilakukan Muhammadiyah di Kabupaten Demak cenderung lebih kepada sebuah cara untuk menjelaskan kepada masyarakat Kabupaten Demak mengenai doktrin-doktrin Islam serta realitas yang ada dengan argumentasi logis dan bahasa penyampaianya lebih komunikatif.

Kedua, al-mau`izah al-ḥ asanah (nasehat yang baik). Dakwah dalam pengertian memberikan nasehat dan bimbingan menuju kebaikan juga diperlihatkan Muhammadiyah di Kabupaten Demak antara lain ketika acara pengajian umum maupun pengajian anggota Muhammadiyah, hal ini juga didukung dengan materi dakwah yang disampaikan dalam pengajian tersebut tidak hanya membahas masalah agama namun juga aplikasinya dan cara menghadapi tantangan di era globalisasi, jadi materi dakwah yang disampaikan dalam pengajian umum Muhammadiyah di Kabupaten Demak lebih bersifat analisis dan aplikatif. Ketika ada masyarakat maupun anggota yang mengalami kesusahan atau sedang mendapat masalah dan membutuhkan bimbingan serta pengarahan baik masalah agama, sosial maupun ekonomi, para juru dakwah atau narasumber selalu siap memberikan nasehat dan berusaha mengatasi masalah tersebut dengan penjelasan yang logis, terkadang juru dakwah atau narasumber juga bersikap tegas tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Setiap pengajian umum maupun

khotbah Jum'at yang dilaksanakan di lingkungan Muhammadiyah, para juru dakwah atau narasumber selalu memberikan bimbingan dan nasehat kepada masyarakat atau jamaah pengajian. Hal yang sangat ditekankan oleh para juru dakwah Muhammadiyah adalah masalah-masalah yang dianggap oleh Muhammadiyah bertentangan dengan ajaran Islam seperti takhayul, bid'ah dan khurafat, karena Muhammadiyah di Kabupaten Demak masih menganggap lingkungan masyarakat Kabupaten Demak masih kuat dengan takhayul dan khurafat, sehingga ditakutkan akan mengkultuskan suatu ritual ibadah. Setiap akhir pengajian para juru dakwah selalu memberikan kesempatan bagi masyarakat atau jamaah pengajian yang ingin berbagi dan membutuhkan solusi untuk sebuah masalah yang sedang dihadapinya. Selain itu, para juru dakwah dari Muhammadiyah juga memberikan tauladan dalam bentuk sikap dan perilaku yang baik bagi para jamaah pengajian.

Ketiga, *al-mujādalah bi al-latī hiya aḥsan* (berdialog dengan baik). dakwah secara dialogis dilakukan Muhammadiyah di Kabupaten Demak dalam beberapa kesempatan, diantaranya ketika kegiatan seminar mengenai penyakit masyarakat seperti minuman keras, di mana nara sumbernya berasal dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dalam memberikan tanggapan kedua nara sumber tersebut terlihat sangat baik dan bersahabat bahkan saling bercanda ringan diantara keduanya, sehingga hal ini membuktikan kepada masyarakat Kabupaten Demak bahwa antara Muhammadiyah dengan Nahdatul Ulama sebenarnya tidak ada permasalahan, bahkan seharusnya bersatu dalam berdakwah menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya, dakwah dengan berdialog dan diskusi yang dilakukan Muhammadiyah di Kabupaten Demak juga dilakukan dalam bidang

ekonomi dan kewirausahaan, seperti program dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Demak yang diselenggarakan bulan September 2006 yaitu seminar motivasi bisnis, dengan adanya seminar tersebut diharapkan nantinya generasi muda Muhammadiyah Kabupaten Demak yang akan datang setelah lulus sekolah berani membuka usaha sendiri sehingga dapat membantu pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, dalam bidang keagamaan Muhammadiyah di Kabupaten Demak mengadakan beberapa kajian agama seperti mengkaji batas-batas aurat laki-laki dan wanita menurut al-Qur'an, mengkaji masalah urusan jenazah dan berdiskusi atau berdialog untuk menganalisa beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kajian agama ini dilakukan dalam forum pengajian, seminar di sekolah-sekolah Muhammadiyah maupun pertemuan rutin anggota Muhammadiyah serta kegiatan kajian Islam Pemuda Muhammadiyah. Kajian ini bersifat umum sehingga masyarakat juga dapat saling berinteraksi langsung, berdialog dan berpendapat kepada nara sumber dan warga Muhammadiyah. Kegiatan-kegiatan semacam ini sangat diminati dan mendapat partisipasi dari masyarakat Kabupaten Demak terutama kaum akademis dan para pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah. Dengan demikian dalam berdialog, Muhammadiyah di Kabupaten Demak tidak ingin memaksakan pendapatnya, tetapi dengan disertai alasan-alasan dan contoh-contoh konkret, sehingga orang yang diajak dialog dapat membuat kesimpulan sendiri atau menetapkan sendiri apa yang akan dilakukannya tanpa merasa ada paksaan dari pihak manapun. Maksudnya bahwa jika seseorang itu ingin berubah dan berperilaku baik hal itu dikarenakan orang itu sendiri atau niat orang tersebut bukan karena orang lain

atau karena ajakan. Sama halnya simpatisan atau masyarakat Kabupaten Demak yang ingin masuk menjadi anggota Muhammadiyah itu karena niat dalam dirinya sendiri bukan karena dipaksa orang lain. Namun demikian, tidak berarti Muhammadiyah di Kabupaten Demak dalam berdakwah tidak pernah memaksakan kehendaknya atau pendapatnya. Hal ini mungkin karena pengecualian dalam rangka menjaga ajaran Islam sesuai syari'at dan integritas umat (ukhuwah Islamiah). Sebagai contoh tradisi sesaji laut, dalam hal ini Muhammadiyah di Kabupaten Demak tidak sepakat dengan adanya tradisi tersebut karena tidak sesuai dengan ajaran Islam dan al-Qur'an, sehingga masalah tradisi sesaji laut selalu ditekankan setiap forum-forum pengajian, khotbah Jum'at dan materi serta penyampiannya terasa dipaksakan agar masyarakat Kabupaten Demak mengalami perubahan dalam ibadah, kepercayaan dan tradisi atau budayanya.

Adapun strategi dakwah Muhammadiyah di Kabupaten Demak yaitu dengan mengedepankan ajaran Islam sesuai dengan syari'at, membentuk lembaga bimbingan manasik haji, membangun budaya dialog dan pembinaan generasi muda, dakwah media massa, dakwah kultural dan dakwah pemberdayaan umat di bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan.

4. Penelitian Arsam Pada Tahun 2010

Penelitian Arsam ini berjudul Manajemen dan Strategi Dakwah Muhammadiyah Kota Semarang. Penelitian ini menjadi relevan karena terkait dengan manajemen dakwah dan strategi dakwah di bidang ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan: Pertama, jelas kiranya, di Kota Semarang khususnya, Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan yang terbesar kedua setelah

NU; kedua, Muhammadiyah adalah organisasi dakwah yang mengajak kepada umat berbuat kebajikan agar selamat di dunia dan di akhirat. Dalam mengajak umat Muhammadiyah menggunakan beberapa strategi seperti strategi kepercayaan, strategi administrasi, strategi ekonomi, strategi pendidikan, strategi kesejahteraan sosial, strategi penyebaran dan penyiaran Islam dan sebagainya; ketiga, strategi-strategi tersebut masih dilakukan dan dikembangkan oleh Muhammadiyah dalam rangka menarik minat umat terhadap organisasi tersebut; keempat, dari beberapa strategi yang dikembangkan oleh Muhammadiyah perlu adanya perbaikan strategi yakni strategi budaya. Strategi inilah yang harus dilakukan Muhammadiyah dengan mengakui keberadaan adat ritual sinkretisme yang awal-awal hendak dihilangkan oleh Muhammadiyah karena dianggap berbau syirik berubah dengan menerima dan menyatu dengan budaya tersebut yang kemudian diikuti sedikit demi sedikit mengubah bau-bau syirik tersebut; dan kelima, strategi tersebut dilakukan, maka Muhammadiyah akan menjadi organisasi yang besar dan disegani banyak umat.

Dari penelitian-penelitian relevan di atas, maka dapat diketahui implementasi manajemen dakwah Muhammadiyah telah terwujud dalam berbagai bentuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti program lembaga keuangan mikro syariah; lembaga zakat, infak dan shadaqah; dan gerakan ekonomi lainnya. Dengan demikian, penelitian ini juga akan meneliti tentang keberadaan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sejauh mana tingkat keberhasilannya.

Namun, ada perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu pada pengelolaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PDM Kabupaten Garut melalui koordinasi dan konsolidasi yang melibatkan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK), Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM), dan Lazismu. Di mana peran JSM Kabupaten Garut sangat dominan dalam melakukan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan para saudagar atau pengusaha Muhammadiyah di Kabupaten Garut telah memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar dalam membiayai dan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan serta biaya operasional dan dakwah Muhammadiyah di Kabupaten Garut sejak Muhammadiyah didirikan di Kabupaten Garut sampai saat ini.

Selain itu yang membedakan adalah pada pola dan sebagian jenis usaha yang dilakukan oleh PDM Kabupaten Garut melalui MPM, MEK, JSM dan Lazismu dari tingkat daerah sampai tingkat ranting yang tidak ada di daerah lain karena merupakan ciri khas yang hanya ada di Kabupaten Garut..

5. Penelitian Azis Muslim untuk Disertasi (S3) Pada Tahun 2014

Penelitian Azis Muslim ini berjudul Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Perkotaan Berbasis Tanggung Jawab Sosial Masjid yang merupakan isi disertasinya untuk meraih gelar doktor (S3) di Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan merumuskan model pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin perkotaan yang berbasis pada tanggung jawab sosial masjid. Penelitian ini dikaji secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Metode

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, FGD, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis interaktif model Miles dan Huberman.

Model pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis tanggung jawab sosial masjid yang dibangun dalam penelitian ini mengacu pada kerangka model evaluasi program yang dikembangkan oleh Kaufman dan Thomas (1980). Model ini dipilih karena lebih menekankan pada sebuah sistem, yaitu sistem pemberdayaan yang meliputi input, proses, output dan outcome. Berdasarkan pada kerangka tersebut, penelitian ini menghasilkan rumusan model pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin sebagai berikut: pertama, input pemberdayaan ekonomi meliputi lembaga keuangan berbasis masjid, kepemimpinan, sasaran pemberdayaan, dan kerja sama. Kedua, proses pemberdayaan ekonomi dimulai dari membangun spiritualitas, membangun kesadaran wirausaha, pemberian kapasitas (*capacity building*) sampai dengan pemberian daya yang dilakukan secara berurutan. Ketiga, output pemberdayaan ekonomi mencakup bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Keempat, outcome pemberdayaan ekonomi adalah keberdayaan ekonomi jamaah yang ditunjukkan dengan terbentuknya wirausahawan yang jujur dan amanah yang dilandasi oleh pengamalan agama yang kuat, terwujudnya kemandirian/kesejahteraan jamaah yang ditandai dengan munculnya *peshodaqoh* atau *pezakat* baru, keberlanjutan usaha karena banyaknya jaringan dengan jamaah lain, dan ketersediaan atau kemudahan akses modal untuk pengembangan usaha.

G. Definisi Operasional

Agar dapat memahami tujuan penelitian ini dan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan masalah-masalah sekecil mungkin yang dapat mengurangi nilai dari penelitian ini, maka perlu dijelaskan definisi operasional yang terkait dengan kata-kata kunci yang terdapat pada judul penelitian ini secara operasional, sebagai berikut:

1. Manajemen Dakwah

Manajemen dakwah adalah proses perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas dan kemudian menggerakkan ke arah pencapaian tujuan dakwah. Mengikuti ilmu manajemen, manajemen dakwah juga mempunyai fungsi dan unsur-unsur seperti di dalam manajemen pada umumnya.

2. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam yang besar di Indonesia yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 Nopember 1912 bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW.

Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang berdasar pada keyakinan tauhid yang murni (Islam), berpedoman pada al-Qur'an dan Sunah Nabi (Hadist), berwatak tajdid atau pembaharuan, dan senantiasa melaksanakan

dakwah Islam dalam seluruh bidang kehidupan dengan tujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Meskipun pada masa orde baru Muhammadiyah menyesuaikan diri dengan UU no 8 tahun 1985 yang menyatakan bahwa semua lembaga sosial kemasyarakatan harus berasaskan Pancasila. Lalu setelah terbit TAP MPR nomor XVIII/MPR/1998 Muhammadiyah kembali berasaskan Islam.

Maksud dan Tujuan didirikannya Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Menegakkan, berarti membuat dan mengupayakan agar Islam dapat tegak, tidak condong bahkan roboh.

Menjunjung tinggi, berarti menempatkan Islam di atas segalanya, mengindahkan, serta menghormatinya.

Agama Islam, berarti agama Allah SWT yang diwahyukan kepada para Rasul-Nya sejak zaman Nabi Adam as, Nabi Nuh as, Nabi Ibrahim as, Nabi Musa as, Nabi Isa as, hingga Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada manusia sepanjang zaman yang menjamin kesejahteraan hakiki duniawi maupun ukhrawi.

Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, berarti masyarakat yang mempunyai kualitas yang baik, yaitu kualitas yang dibina oleh ajaran Islam, masyarakat yang berprikemanusiaan, masyarakat yang mengabdikan kepada Allah SWT, masyarakat yang memiliki pertalian dengan Allah dan sesama manusia, masyarakat di mana keutamaan, kesejahteraan, dan kebahagiaan luas merata

dan secara umum dapat digambarkan sebagai “*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.*”

Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya.

Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al-Qur`an, di antaranya surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.* Ayat tersebut, menurut para tokoh Muhammadiyah, mengandung isyarat untuk bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara teorganisasi, umat yang bergerak, yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. Maka dalam butir ke-6 Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dinyatakan, *melancarkan amal-usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi*, yang mengandung makna pentingnya organisasi sebagai alat gerakan yang niscaya.

Dari gerakannya, Muhammadiyah kini telah banyak memiliki rumah sakit, panti asuhan, tempat pendidikan dan lembaga ekonomi serta keuangan di seluruh Indonesia.

3. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Sedangkan pemberdayaan ekonomi diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (basic need) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada disertasi ini yang merupakan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang membahas: Latar belakang masalah, indentifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka berpikir, kajian yang relevan, definisi operasional.

BAB II KAJIAN TEORITIK, yang membahas: Manajemen dakwah: pengertian manajemen, pengertian dakwah, metode dakwah, jenis-jenis dakwah,

sejarah dan perkembangan dakwah Islam, pengertian manajemen dakwah; Muhammadiyah: riwayat singkat KH Ahmad Dahlan, sejarah dan perkembangan singkat Muhammadiyah, manajemen dakwah Muhammadiyah; pemberdayaan ekonomi: pengertian dan konsepsi pemberdayaan masyarakat, konsepsi dan implementasi pemberdayaan ekonomi di Indonesia; dan pemberdayaan ekonomi Muhammadiyah: Sejarah dan perkembangan gerakan ekonomi Muhammadiyah, konsep pemberdayaan ekonomi Muhammadiyah.

BAB III METODE PENELITIAN, yang membahas: Metode dan prosedur penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, prosedur analisis data, pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang membahas: Profil Kabupaten Garut, Jawa Barat; sejarah dan perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Garut, Jawa Barat; profil Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Garut, Jawa Barat; profil ekonomi masyarakat Kabupaten Garut, Jawa Barat; dan konsepsi dan implementasi manajemen dakwah Muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Garut, Jawa Barat.

BAB IV: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI, DAFTAR PUSTAKA dan LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Manajemen Dakwah

1. Pengertian Manajemen

Secara bahasa, akar kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, *to manage*, yang artinya mengatur. Namun kata manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif dan pengertian yang berbeda, misalnya: pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketata laksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya. Sedangkan secara istilah, ada beberapa definisi atau pengertian dari manajemen yang diberikan oleh beberapa ahli, yaitu sebagai berikut: Pertama, John D. Millett memberikan pengertian manajemen, seperti yang dikutip oleh Siswanto HB, sebagai: *"management is the proceess of directing and facilitating the work of people organized in formal groups to achive a desired goal* (adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan).¹

Kedua, Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan memberikan pengertian bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²

¹ Siswanto.HB, *Pengantar manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara, Tahun 2007, Cet. Ke-1, hal.1.

² H.Malayu S.P. Hasibuan, 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara, Tahun 2005, Cet. Ke-1, hal.2.

Ketiga, Daft memberikan pengertian manajemen sebagai berikut: *“Management is the attainment of organizational goals in an effective and efficient manner through planning organizing leading and controlling organizational resources”* (manajemen merupakan pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien lewat perencanaan pengorganisasian pengarahan dan pengawasan sumberdaya organisasi.³

Plunket dkk. memberikan pengertian manajemen, seperti yang dikutip oleh H. Malayu SP S.P. Hasibuan, sebagai *“One or more managers individually and collectively setting and achieving goals by exercising related functions (planning organizing staffing leading and controlling) and coordinating various resources (information materials money and people)* (manajemen merupakan satu atau lebih manajer yang secara individu maupun bersama-sama menyusun dan mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi-fungsi terkait (perencanaan pengorganisasian penyusunan staf pengarahan dan pengawasan) dan mengkoordinasi berbagai sumber daya (informasi material uang dan orang).⁴

Menurut Luther Gulick, seperti yang dikutip oleh Jamal Ma`mur Asmani, manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu, karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Dikatakan sebagai kiat, karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan tugas. Dipandang sebagai profesi,

³ Ibid, hal.2.

⁴ Ibid, hal.2.

karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer, dan para profesional dituntut oleh suatu kode etik.⁵

Sedangkan menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah managing (pengelolaan), sedangkan pelaksanaannya disebut manajer atau pengelola.⁶

2. Sejarah Manajemen

Manajemen secara praktik atau praktik-praktik manjerial bukan hal yang baru. Dia telah ada sejak zaman Sumeria, Babilonia, Mesir, Syria, Persia, Mesopotamia, Cina, Romawi. Hal ini terbukti dari hasil-hasil yang dicapai di berbagai negara tersebut. Piramida di Mesir yang sampai sekarang belum dapat dibuat duplikatnya dengan teknologi modern, dalam pembuatannya pasti ada rencana, organisasi, kepemimpinan dan pengendalian. Dalam pembuatan tembok kota dan kanal di Sumeria juga telah menerapkan upah berdasarkan jasa. Praktik manajemen di Babilonia tampak dalam *Code of Hamurabi* yang di dalamnya terdapat beberapa ketentuan yang dapat diaplikasikan, misalnya, tentang pengendalian (*on control*), tentang tanggung jawab (*on responsibility*), tentang upah minimum (*on minimum wage*) dan pentingnya gaya pemimpin efektif (*effective leader style*). Ketika mendirikan menara Babel, para pendirinya juga menerapkan struktur kerja serta pengendalian produksi dan inventori para pekerja.

⁵ Jamal Ma`mur Asmani, *Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional: Panduan Quality Control bagi Para Pelaku Lembaga Pendidikan*, Jogjakarta: Diva Press, Tahun 2009, Cet. Ke-1, hal.70.

⁶ George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen: Edisi Revisi*, Jakarta: Bumi Aksara, Tahun 2019, Cet. Ke-1, hal. 1.

Kemudian jalan raya dan sistem perpustakaan dari Syria; serta kota besar dan kaya dari Persia sudah pasti memerlukan organisasi dan manajerial yang hebat untuk mencapainya. Itu semua berlangsung pada sekitar tahun 1800 sebelum masehi. Begitu juga di Yunani telah diterapkan "*the piecework system*" dalam kontrak pemerintah untuk mempekerjakan para warga negara kota.⁷

Di Cina, praktik-praktik manajerial juga terjadi pada awal 1650 sebelum masehi, yaitu telah diterapkan perencanaan, pengorganisasian melalui spesialisasi (pembagian kerja) dan pengendalian dalam membangun tembok besarnya yang sangat terkenal sampai sekarang dan menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Cina juga sudah mengenal "*labour turnover*" sekitar 400 sebelum masehi. Bahkan dalam "*The Art of War*" yang ditulis oleh Sun Tzu tahun 500 sebelum masehi dijelaskan tentang strategi (*on strategy*), tentang taktik (*on tactics*) dan tentang manuver (*on maneuvering*) di dalam bidang kemeliteran.

Praktik-praktik manajerial juga terjadi di Romawi. Imperium Romawi telah mengembangkan sistem kenegaraan dan militer yang menjadi "model" militer sekarang. Pada awal tahun 300 SM, Romawi telah menggunakan "*maximum wage laws*" untuk mengkompensasi bagi "*a shortage of labour*". Dalam *De Officiis* atau *The Offices* dan *De Legibus* atau *The Law*, karya Cicero, dijelaskan tentang keberhasilan Romawi dalam pemerintahan dan dalam memperluas wilayahnya dengan membagi-bagi tugas pemerintahan dalam departemen-departemen yang disebut *magistrates*. Tiap *magistrates* dipimpin oleh seorang magistrator. Struktur Empire Romawi direorganisasi dengan membagi menjadi 100 propinsi. Propinsi tersebut dikelompokkan ke dalam 13 dioceses dan

⁷ Dr. Ulber Silalahi, MA, *Asas-Asas Manajemen*, Bandung: PT Refika Aditama, Tahun 2017, Cet. Ke-4, h. 71-72.

masing-masing dioceses dikelompokkan lagi menjadi 4 divisi geografis besar. Pola ini sedikitnya digunakan oleh organisasi pemerintahan dewasa ini untuk menstabilkan sentralisasi otoritas.

Kemudian datang Islam dengan kehebatan manajerial dalam praktik kepemimpinan (*leadership*) yang paling efektif sepanjang sejarah umat manusia oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini dinyatakan oleh Michael Hart, seorang ahli sejarah sekaligus penulis buku tersohor dari Amerika Serikat yang pernah bekerja sebagai guru besar Astronomi dan Fisika di Universitas Maryland AS, di dalam bukunya *The 100* yang menerangkan tokoh-tokoh berpengaruh sepanjang sejarah. Michael Hart bahkan menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia dan menjadikannya dalam ranking pertama dari 100 tokoh berpengaruh kelas dunia lainnya. Menurut Michael Hart, Nabi Muhammad SAW terbukti telah mampu memimpin sebuah bangsa yang awalnya terbelakang dan terpecah belah, menjadi bangsa yang maju, yang bahkan sanggup mengalahkan bangsa-bangsa lain di dunia pada masa itu. Fazalur Rahman dalam buku *Ensiklopedi Muhammad Sebagai Negarawan* mengungkapkan, dalam tempo kurang lebih satu dekade, Muhammad SAW berhasil meraih berbagai prestasi yang tak mampu disamai pemimpin negara manapun. Bahkan sepeninggalanya, Islam menjadi peradaban yang mengungguli peradaban dunia manapun yang puncak keemasannya terjadi pada era Dinasti Abbasiyah.

Kontribusi yang lebih besar bagi pemikiran manajemen khususnya yang mendukung upaya kerja yang efektif dan yang meminimalkan kompleksitas berasal dari Gereja Katolik. Gereja Katolik membuat lebih jelas tentang batasan misi, maksud, tujuan kebijakan, aturan dan regulasi. Yang paling penting adalah

dalam hierarki keorganisasian, otoritas, spesialisasi, konsep staf dan deskripsi kerja. Struktur Gereja Katolik Roma dirancang suatu hierarki dengan prinsip ”*scalar chain of command*”. Rancangannya yang sederhana dan terdiri atas lima tingkat telah terbukti efektif selama hampir 2000 tahun.

Praktik-praktik manajerial dan manajer-manajer ahli serta perhatian terhadap efisiensi dan efektivitas kerjasama organisasional yang sudah ada sejak ribuan tahun ini kemudian dijadikan teori dan ilmu di era Revolusi Industri.

Revolusi Industri menjadi puncak kejadian dan perubahan dalam memanajementi kerjasama organisasional. Revolusi Industri adalah perubahan teknologi sosioekonomi, dan budaya pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 yang terjadi dengan penggantian ekonomi yang berdasarkan pekerja menjadi yang didominasi oleh industri dan diproduksi mesin. Perkembangan peralatan mesin logam-keseluruhan pada dua dekade pertama dari abad ke-19 membuat produk mesin produksi untuk digunakan di industri lainnya. Istilah ”Revolusi Industri” diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19.⁸

Revolusi teknologi dari Revolusi Industri mempunyai dampak terhadap pemikiran-pemikiran akan pengelolaan kerjasama yang justru menjadi semakin besar dan kompleks. Kerjasama dalam proses produksi, misalnya, secara sekuensial berubah dari *domestic-system* menjadi *the putting-out-system* dan kemudian menjadi *factory system* dengan ditemukannya mesin-mesin untuk proses produksi. Berkembangnya *factory system* dalam proses produksi, maka para pekerja yang tadinya terpisah-pisah sebagai industri rumah dikumpulkan

⁸ Ibid., h. 73.

bbberdasarkan keahliannya di bawah satu atap "organisasi usaha" dengan pertimbangan lebih ekonomis. Revolusi Industri mulai menggiring massa, baik pria maupun wanita, masuk organisasi pabrik yang berhierarki dan impersonal.

Diterapkannya teknik mesin dalam proses produksi dan kerjasama yang makin besar dan rumit menurut kebutuhan bagaimana memamanajemeni kerjasama dalam organisasi usaha tersebut. Dibutuhkan siapa yang menentukan tentang: apa yang harus dikerjakan, siapa dan bagaimana mengerjakan, serta dalam menentukan standar pekerjaan dan hasil kerja. Sebab meskipun pada mulanya organisasi usaha itu dimanajemeni oleh pemiliknya, tapi kemudian hak memamanajemeni dan bahkan pemilikan terpecah di antara bayak pemegang saham, dan proses produksi makin lama makin besar dan kompleks. Muncullah kelas manajer yang menjadi bagian integral pada pabrik seperti halnya mesinnya. Buruh tunduk secara hierarkis kepada manajer, bekerja menurut jadwal yang ditentukan dan secara berulang-ulang melakukan tugas yang telah dispesialisasikan kepadanya. Mesin, buruh dan kerja diorganisasi dengan cermat untuk tujuan efisiensi dan efektivitas atau demi keuntungan.

Jadi, di era Revolusi Industri telah mulai dipikirkan persoalan efisiensi dan efektivitas kerja organisasi untuk mencapai tujuan secara "ilmiah". Kegiatan manajemen yang dilakukan berdasarkan metode juga telah terumuskan di era Revolusi Industri ini. Hal ini diindikasikan oleh usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dengan memperkenalkan manajemen secara ilmiah dan dengan menggunakan metode ilmiah juga.

Ilmu manajemen kemudian berkembang melalui kontribusi banyak ahli, dari pra klasik seperti Adam Smith, Robert Owen dan Charles Babbage sampai ke para ahli yang menggunakan pendekatan manajemen ilmiah.

Pendekatan manajemen ilmiah disebut juga sebagai *the operational approach*. Umumnya diakui bahwa kajian tentang bagaimana mencapai tujuan keorganisasian secara efisien dan efektif dengan menggunakan *scientific methods* (metode ilmiah) dilakukan oleh Frederick Winslow Taylor (1856-1915) pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Karena itu, gerakan manajemen ilmiah secara umum disematkan kepada Frederick Winslow Taylor.

Karya pemikiran Frederick Winslow Taylor yang termasyhur berjudul *The Principles of Scientific Management* yang diterbitkan pada tahun 1911 telah menandai awal penciptaan sebuah teori yang serius di bidang manajemen. Buku ini secara sungguh-sungguh mempertanyakan peranan manajemen tradisional. Melalui kajian ilmiah dan dipadukan dengan pengalaman praktiknya di The Bethlehem Steel Companies, memotivasi minatnya untuk menghasilkan suatu pendekatan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui *Scientific Management*.

Scientific Management didefinisikan sebagai penggunaan dari *the scientific method* untuk menentukan “*one best way*” untuk pekerjaan yang harus dikerjakan. *Scientific Management* adalah suatu pendekatan yang menekankan studi ilmiah tentang metode-metode kerja secara teratur untuk meningkatkan efisiensi pekerja. Manajemen ilmiah menjadi awal sejarah teori manajemen menentukan secara ilmiah metode-metode untuk pelaksanaan tiap tugas, memilih, melatih dan memotivasi para pekerja.

Ilmu manajemen terus berkembang yang kemudian muncul manajemen administratif, manajemen birokrasi, manajemen organisasi masyarakat (ormas), manajemen organisasi politik dan lain-lain. Sehingga pada zaman modern sekarang ini boleh dikatakan tidak ada suatu usaha kerjasama manusia yang tidak menggunakan manajemen.

Ilmu manajemen modern juga masuk dalam kegiatan dakwah. Maka usaha dakwah yang lebih luas dan complicated dibandingkan dengan kegiatan bisnis tentulah tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien, apabila tidak disertai dengan manajemen. Selain itu, manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui kerja orang lain. Di dalam manajemen terdapat minimal 4 (empat) ciri, yaitu: Pertama, ada tujuan yang hendak dicapai; kedua, ada pemimpin (atasan); ketiga, ada yang dipimpin (bawahan); dan keempat, ada kerja sama.

3. Prinsip-Prinsip Manajemen

Di dalam manajemen, terdapat pula prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi manajemen. Prinsip manajemen adalah dasar-dasar atau pedoman kerja yang bersifat pokok yang tidak boleh diabaikan oleh setiap manajer/pimpinan. Dalam prakteknya harus diusahakan agar prinsip-prinsip manajemen ini hendaknya tidak kaku, melainkan harus luwes, yaitu bisa saja diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Prinsip-prinsip manajemen terdiri atas :

Pertama, pembagian kerja yang berimbang. Dalam membagi-bagikan tugas dan jenisnya kepada semua kerabat kerja, seorang manajer hendaknya bersifat adil, yaitu harus bersikap sama baik dan memberikan beban kerja yang berimbang.

Kedua, pemberian kewenangan dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas. Setiap kerabat kerja atau karyawan hendaknya diberi wewenang sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan mempertanggung jawabkannya kepada atasan secara langsung.

Ketiga, disiplin. Disiplin adalah kesedian untuk melakukan usaha atau kegiatan nyata (bekerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya) berdasarkan rencana, peraturan dan waktu (waktu kerja) yang telah ditetapkan.

Keempat, kesatuan perintah. Setiap karyawan atau kerabat kerja hendaknya hanya menerima satu jenis perintah dari seorang atasan langsung (mandor, kepala seksi, kepala bagian), bukan dari beberapa orang yang sama-sama merasa menjadi atasan para karyawan atau kerabat kerja tersebut.

Kelima, kesatuan arah. Kegiatan hendaknya mempunyai tujuan yang sama dan dipimpin oleh seorang atasan langsung serta didasarkan pada rencana kerja yang sama (satu tujuan, satu rencana, dan satu pimpinan).

Keenam, efisiensi dan efektivitas. Keduanya ini merupakan bagian dari prinsip-prinsip manajemen atau administrasi. Titik tolak pelaksanaan manajemen dalam organisasi semaksimal mungkin memanfaatkan semua sumber tenaga, dana, dan fasilitas yang ada secara efisien. Fungsi-fungsi manajemen dioperasionalkan dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana yang seirama dengan keadaan dan kemampuan organisasi. Artinya, dengan menghemat biaya dan memperpendek waktu pelaksanaan kegiatan dapat memperoleh hasil yang optimal. Agar prinsip efisiensi terlaksana, semua obyek organisasi harus dikelola dengan baik sehingga penerapan prinsip efisiensi benar-benar relevan

dengan tujuan yang hendak dicapai. Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antarpersonal sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengorganisasian terdapat pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci menurut bidang dan bagian-bagian sehingga tercipta hubungan kerja sama yang harmonis dan lancar menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan kerja yang fungsional dan berjalan dengan baik akan mempermudah pelaksanaan efisiensi yang menjadi prinsip manajemen. Untuk itu, dilakukan penyusunan rencana yang diorganisasikan dengan baik dan disusun dengan bentuk pemolaan kegiatan yang menertibkan pelaksanaannya. Pelaksanaan rencana yang telah terpola merupakan salah satu bentuk manajerial yang diperlukan guna menetapkan saling terkaitnya di antara subsistem yang ada dalam suatu organisasi.⁹

Ketujuh, pengelolaan. Manajer yang baik selalu bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Dengan demikian, target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik. Perencanaan yang dilakukan berpijak pada visi dan misi yang jelas sehingga program-program yang dijadwalkan dibuat secara hierarki atau sistematis dan mendahulukan skala prioritas sebagaimana mengatur dan menjadwalkan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Program jangka pendek dilaksanakan sekaligus sebagai bagian awal dari program jangka menengah. Sedangkan pelaksanaan program jangka menengah dilaksanakan sebagai awal menuju program jangka panjang. Dengan demikian,

⁹ Dr, H, M. Anton Athoillah, M.M., *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Pustaka Setia, Tahun 2010, Cet. Ke-1, h. 90-91.

semua pelaksanaan program terdapat saling memengaruhi dan menunjang dalam mencapai target. Pengorganisasian semua program dilakukan sebagai bagian dari tugas profesional seorang manajer. Dengan pengorganisasian, program kerja sesuai perencanaan, maka akan terlihat hubungan antarprogram yang dimaksudkan. Dengan demikian, pada tahap-tahap pelaksanaan, pengutamaan efektivitas dan efisiensi tetap terjaga. Selanjutnya, setiap pelaksanaan diarahkan secara sinergis pada tujuan yang ditargetkan sehingga pengawasan dan evaluasinya akan mudah dilaksanakan. Risiko kegagalan pelaksanaan program pun akan mudah dihindarkan atau diperkecil sedemikian rupa dari risiko kegagalan.¹⁰

Kedelapan, pengutamaan tugas pengelolaan. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Internal artinya melaksanakan proses pengadministrasian semua aktivitas organisasi yang merupakan tugas utama manajer. Sedangkan eksternal adalah pelayanan manajerial terhadap semua kepentingan publik yang berkaitan dengan aktivitas manajemen di luar kelembagaan. Dengan tanggung jawab manajer tersebut, pengutamaan tugas pengelolaan bukan semata-mata berkaitan dengan manajerial internal karena manajerial internal sangat berkepentingan dan memiliki hubungan fungsional dengan manajerial eksternal. Sebagaimana bagian produksi bekerja sama dengan bagian promosi, dan bagian promosi berhubungan secara langsung dengan masyarakat.¹¹

Kesembilan, kepemimpinan yang efektif. Seorang manajer harus memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, tidak bertele-tele dan menghemat

¹⁰ Ibid., h, 92.

¹¹ Ibid.

waktu, artinya tegas, lugas, tuntas dan berkualitas. Dia wajib mengembangkan hubungan baik dengan semua bawahannya, cerdas merealisasikan *human relationship*. Manajer yang baik adalah manajer yang tidak menyalahkan bawahan, tetapi mengingatkan dan menyarankan. Demikian pula, bawahan yang baik tidak pernah menggugat dan gusar kepada atasan, tetapi meluruskan dan menyadarkan sepanjang masih dalam konteks profesionalitas yang ada di atas aturan yang disepakati.¹²

Kesepuluh, kerja sama. Prinsip kerja sama didasarkan pada pengorganisasian dalam manajemen. Semua tugas dan kewajiban manajer tidak diborong oleh satu orang, tetapi dikerjakan menurut keahlian dan tugasnya masing-masing, sehingga beban kerjanya tidak menumpuk di satu tempat, sedangkan di tempat lain tidak ada yang harus dikerjakan. Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab seharusnya dipolarisasi berdasarkan prinsip profesionalitas sehingga kerja sama yang dibangun tidak berbelit-belit. Kerja sama di antara karyawan berjalan sinergis dan mempermudah pelaksanaan tugas organisasi. Oleh karena itu, prinsip kerja sama merupakan salah satu fungsi dari organisasi yang diartikan sebagai *memberi struktur*, terutama dalam penyusunan atau penempatan personal, pekerjaan-pekerjaan, materiil, dan pikiran-pikiran di dalam struktur itu. Dalam kerja sama terdapat kegiatan koordinasi dan konsolidasi.

Jika prinsip-prinsip tersebut di atas tidak dilaksanakan maka akan timbul perpecahan di antara para kerabat kerja atau karyawan. Karena ada yang diberi tugas yang banyak dan ada pula yang sedikit, padahal mereka memiliki kemampuan yang sama.

¹² Ibid., h. 93.

4. Fungsi-Fungsi Manajemen

Sedangkan fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi perencanaan (*planning*). Pada hakekatnya perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan yang merupakan dasar bagi kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan ekonomis dan efektif pada waktu yang akan datang. Proses ini memerlukan pemikiran tentang apa yang perlu dikerjakan, bagaimana dan di mana suatu kegiatan perlu dilakukan serta siapa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaannya;
- b. Fungsi pengorganisasian (*organizing*). Fungsi pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai proses menciptakan hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi, personalia dan faktor fisik agar kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan disatukan dan diarahkan pada pencapaian tujuan bersama;
- c. Fungsi pengarahan (*motivating*). Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang menstimulir tindakan-tindakan agar betul-betul dilaksanakan. Oleh karena tindakan-tindakan itu dilakukan oleh orang, maka pengarahan meliputi pemberian perintah-perintah dan motivasi pada personalia yang melaksanakan perintah-perintah tersebut;
- d. Fungsi pengkoordinasi (*coordinating*). Suatu usaha yang terkoordinir ialah di mana kegiatan karyawan itu harmonis, terarah dan diintegrasikan menuju tujuan-tujuan bersama. Koordinasi dengan demikian sangat diperlukan dalam organisasi agar diperoleh kesatuan bertindak dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;

- e. Fungsi pengawasan (*controlling*). Fungsi pengawasan pada hakekatnya mengatur apakah kegiatan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam rencana. Sehingga pengawasan membawa kita pada fungsi perencanaan. serta terkoordinir rencana-rencana makin lengkap pula pengawasan.
- f. Fungsi mengevaluasi (*evaluating*). Fungsi mengevaluasi adalah menilai semua kegiatan untuk menemukan indikator yang menyebabkan sukses atau gagalnya pencapaian tujuan, sehingga dapat dijadikan bahan kajian berikutnya. Dirumuskan solusi alternatif yang dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dan meningkatkan kualitas keberhasilan di masa yang akan datang. Evaluasi sebagai fungsi manajemen adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui pelaksanaan yang telah dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Setiap kegiatan, baik yang dilakukan oleh unsur pimpinan maupun oleh baawahan, memerlukan adanya evaluasi. Dengan mengetahui berbagai kesalahan atau kekurangan, perbaikan selanjutnya dapat dilakukan dengan mudah, dan dapat dicari *problem solving* yang tepat dan akurat.¹³
- g. Fungsi penyusunan anggaran biaya (*budgeting*). Setiap lembaga membutuhkan pembiayaan yang terencana dengan matang. Untuk itu, *income* yang diperoleh harus diperhatikan sebelum mengeluarkan dana untuk kegiatan tertentu. Suatu anggaran merupakan rencana penggunaan

¹³ Ibid., h. 115.

sumber-sumber keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan terpadu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi pembiayaan adalah: Pertama, perencanaan tentang berapa biaya yang diperlukan; kedua, sumber biaya yang diperoleh atau diusahakan; ketiga, mekanisme penggunaannya; keempat, pelaksanaan pembiayaan kegiatan; keempat, pola pembukuan dan pertanggungjawabannya; dan kelima, pengawasan.

- h. Fungsi menggerakkan (*actuating*). Actuating adalah kegiatan menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja melakukan tugas dan kewajibannya. Para pekerja sesuai dengan keahlian dan proporsinya segera melaksanakan dalam aktivitas yang konkret yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan, dengan selalu mengadakan komunikasi, hubungan kemanusiaan yang baik, kepemimpinan yang efektif, memberikan motivasi, membuat perintah dan instruksi serta mengadakan supervisi, dengan meningkatkan sikap dan moral setiap anggota kelompok. Dengan demikian, dalam actuating terdapat hal-hal sebagai berikut: Pertama, penetapan saat awal pelaksanaan rencana kerja; kedua, pemberian contoh tata cara pelaksanaan kerja dari pimpinan; ketiga, pemberian motivasi para untuk segera bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; keempat, pengomunikasian seluruh arah pekerjaan dengan semua unit kerja; kelima, pembinaan para pekerja; keenam, peningkatan mutu dan kualitas kerja; dan ketujuh, pengawasan kinerja dan moralitas pekerja.
- i. Fungsi peramalan (*forecasting*). Kegiatan peramalan termasuk upaya memprediksi berbagai kemungkinan yang akan terjadi setelah pelaksanaan kegiatan. Kegiatan meramal atau memperkirakan biasanya didasarkan

pada hasil pengawasan dan evaluasi sehingga organisasi dapat membuat perencanaan yang lebih baik dan mempersiapkan alternatif yang akan diambil dalam suatu keputusan. Memperkirakan berbagai kemungkinan yang akan terjadi dapat dilakukan terhadap rencana yang belum dilaksanakan atau rencana yang belum dibuat, dengan mempertimbangkan berbagai indikator yang bersifat internal maupun eksternal. Misalnya, sebuah perusahaan meramalkan laku tidaknya produk yang dihasilkan berkaitan dengan aktivitas yang akan dilaksanakan oleh masyarakat menjelang Lebaran. Lalu perusahaan tersebut membeli bahan-bahan pakaian Muslim yang diperlukan masyarakat, dalam hal ini umat Islam, ketika menyabut Lebaran. Ramalan tersebut didasarkan pada kebiasaan menjelang Lebaran. Dengan demikian, kegiatan forecasting berkaitan dengan hal-hal berikut: Pertama, mencari kemungkinan yang akan terjadi sehubungan dengan kegiatan yang sedang dilakukan, dengan melihat kinerja organisasi; kedua, membaca situasi dan kondisi yang belum terjadi dengan mempertimbangkan kebiasaan dan pengalaman di masa lalu, kemudian membuat rencana baru sebagai antisipasi keadaan yang akan datang; ketiga, menyusun dan mendiskusikan berbagai indikator yang diperkirakan akan mendukung atau sebagai pendorong kuat pembuatan rencana yang akan datang; keempat, menelaah berbagai indikator yang kemungkinan besar akan memengaruhi pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan berakhir dengan kegagalan; dan kelima, mempersiapkan berbagai alternatif untuk pengambilan keputusan.

j. Fungsi penempatan orang (*staffing*). Staffing dapat disamakan dengan *assembling resources* (mengumpulkan sumber daya-sumber daya). Staffing termasuk kegiatan organisasi yang sangat penting karena berhubungan dengan penempatan orang dalam tugas dan kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan penempatan orang berkaitan dengan manajemen personal. Oleh sebab itu, hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: Pertama, penentuan jenis pekerjaan; kedua, penentuan jumlah orang yang dibutuhkan; ketiga, penentuan tenaga ahli; keempat, penempatan personal sesuai dengan keahliannya; kelima, penentuan tugas, fungsi, dan kedudukan pegawai; keenam; pembatasan otoritas dan tanggung jawab pegawai; ketujuh, penentuan hubungan antarunit kerja; kedelapan, penentuan gaji, upah dan insentif pegawai yang berkaitan juga dengan bagian keuangan; dan kedelapan, penentuan masa jabatan, mutasi, pensiun, dan pemberhentian pegawai.

5. Pengertian Dakwah

Secara bahasa, kata dakwah berasal dari kata Arab *da'wah*, yang merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *da'â, yad'û, da'wah*, berarti doa, seruan, panggilan, ajakan, undangan, permintaan.¹⁴

Sedangkan di dalam kamus *Lisân al-'Arâb*, kata *da'wah* memiliki beberapa arti, seperti: Pertama, meminta pertolongan (*al-istighâtsah*); kedua, menghambakan diri (*ibâdah*); ketiga, memanjatkan permohonan (berdoa) kepada

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Muhawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, Tahun 1984, Cet. Ke-1, hal. 439.

Allah Swt.; keempat, persaksian Islam (*syahâdat al-Islâm*); dan kelima, memanggil atau mengundang (*al-nidâ*).¹⁵

Sedangkan kata dakwah yang berarti doa (*al-du'â*), yakni harapan, permohonan kepada Allah Swt. atau seruan (*al-nidâ*), terdapat di dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 186. Doa atau seruan pada sesuatu berarti dorongan atau ajakan untuk mencapai sesuatu itu (*al-du'â ilâ al-syai' al-hatsts 'alâ qasdihi*).¹⁶ Di dalam al-Qur'an, kata *da`wah* ada yang dikaitkan dengan jalan Allah Swt., jalan kebaikan atau jalan surga. Ada pula kata *da`wah* yang disandarkan pada jalan setan atau jalan kesesatan, keburukan dan jalan ke api neraka. Bahkan dalam satu ayat, ada pula kata *da`wah* yang dipakai untuk kebaikan dan keburukan.¹⁷ Sedangkan menurut Muhammad Fuad Abdul Baqi, penulis dan penyusun banyak buku yang berhubungan dengan Alquran dan sunnah, bahwa kata *da`wah* dan derivasinya di dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 215 kali.¹⁸

Secara istilah, dakwah (*da`wah*) adalah upaya mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan atau mengikuti petunjuk, menyeru mereka untuk berbuat baik, dan meninggalkan perbuatan munkar agar mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dakwah juga dapat diartikan sebagai ajakan, panggilan, seruan untuk berbuat baik di jalan yang diridai Allah Swt.¹⁹

¹⁵ Muhammad Mukarram Ibnu Manzur al-Afriki al-Misri, *Lisân al-`Arâb*, Beirut: Dar al-Sadir, tt., Cet. Ke-1, Juz 14, hal. 285.

¹⁶ Ahmad al-Fayûmî, *al-Mishbâh al-Munîr*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t., hal. 194.

¹⁷ Untuk ayat-ayat yang berkaitan dengan dakwah di jalan Allah antara lain: surat al-A`raf/7: 24, 192, 198, surat Yusuf/12: 108, al-Ra'd/13: 14, 36, al-Kahfi/18: 57 sedangkan untuk ayat yang berkaitan dengan jalan yang sesat antara lain surat al-Thur/52: 13, Yusuf/12: 33, al-Qamar/54: 6 dan luqman/31: 21 dan ayat yang menyatakan baik dan buruk dalam satu ayat adalah al-Baqarah/2: 221.

¹⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu`jam Mufahras Li Aljaz al-Qur`an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, Tahun 2000, hal. 330-333.

¹⁹ Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Kamus Istilah Keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu)*, Jakarta, Tahun 2015, Cet. Ke-2, hal. 33.

Selain itu, dakwah juga dapat diartikan dengan setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Swt. sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islamiah.²⁰

1. Metode Dakwah

Menurut Alquran surat al-Nahl ayat 125 disebutkan tiga cara dakwah, yaitu; hikmah, mau`izhah hasanah dan mujadalah. Ayat tersebut berbunyi yang artinya:”*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.*”

Adapun penjelasannya sebagai berikut: Pertama, hikmah. Dalam kamus *Lisân al-‘Arab* dinyatakan bahwa kata hikmah bisa dikaitkan dengan hakim, yang hakim adalah orang yang faham benar tentang seluk beluk teknik mengerjakan sesuatu dan mahir di dalamnya.²¹ Ibn Faris menerjemahkan hikmah dengan mencegah manusia dari kezaliman, dan mencegah manusia pula dari kebodohan dan kejahatan.²² Menurut Fakhr al-Razi dalam *al-Tafsir al-Kabir*, hikmah adalah dengan mencapai kebenaran dalam ucapan dan tindakan. Seseorang tidak disebut sebagai *al-hâkim* kecuali orang yang berkumpul dalam kedua hal ini. Hikmah adalah seakan-akan menolak kebodohan dan kesalahan.

Yusuf Qardlawi menyatakan hikmah dalam dakwah adalah mendialogi akal manusia untuk meyakinkan dan mencerahkan. Nasihat dalam mendialogi

²⁰ Bisri M. Jaelani, *Ensiklopedi Islam*, Yogyakarta: Panji Pustaka, Tahun 2007, Cet. Ke-1, hal.90.

²¹ Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Tahun 1999, jilid II., hal. 91.

²² Abu Husain Ahmad Ibn Faris, *Mu’jam Maqayis fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hal. 277.

akal adalah untuk mempengaruhi dan menggerakkan. Dalam hal ini, juru dakwah yang baik mendialogi akal dan hati sekaligus, sebab inilah jalan yang dilakukan oleh Allah dan Rasulullah. Masih menurut Qardlawi, para Nabi dan Rasul adalah juru dakwah yang menyeru kepada Allah dengan hikmah, bukan kebodohan, juga dengan nasehat yang baik, bukan kata-kata yang kasar.²³ M. Natsir dalam fiqh dakwahnya menyebutkan bahwa hikmah adalah lebih dari semata-mata ilmu. Ia adalah ilmu yang sehat dan sudah dicernakan dengan ilmu yang terpadu dengan rasa-periksa, sehingga menjadi daya penggerak untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, berguna. Kalau dibawa dalam bidang dakwah untuk melakukan tindakan yang berguna dan bermanfaat secara efektif. Dengan memahami ‘rahasia dan faedah sesuatu’ segala sesuatu dalam arti segala unsur yang berhimpun dalam melakukan dakwah. Unsur isi dakwah, unsur manusia yang dihadapi, unsur keadaan, ruang dan waktu, unsur bentuk dan cara dakwah yang sesuai dalam paduan yang seimbang antara pengetahuan dan periksa sehingga merupakan daya penggerak untuk sesuatu langkah yang tepat, dengan itulah seorang muballigh dapat menentukan dan menjalankan kaffiat dakwah yang efektif.

Kedua, *maw'izhah hasanah*. Secara bahasa, kata *maw'izhah* berasal dari kata *wa'azha-ya'idzu-wa'zhan-wa'izhatan* yang berarti menasehati.²⁴ Pengertian *maw'izhah hasanah* mengandung makna nasihat dan peringatan dengan kebaikan sehingga dapat melembutkan hati dan mendorong kepada amal. Pemberian nasihat adalah penjelasan mengenai kebenaran dan kepentingan sesuatu dengan tujuan

²³ Hal ini sebagaimana ditulis oleh Mushtafa Malakah, *Fi Ushul al-Da'wah Muqatabasat min kutub al-Duktur Yusuf Qardhawi* (Kairo: Dar al-Taqwa, Tahun 1997, hal.16.

²⁴ Ahmad Warson al-Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pesantren Krapyak, Tahun 1984, hal.1675.

agar orang yang dinasihati menjauhi kemaksiatan sehingga terarah kepada sesuatu yang dapat mewujudkan kebahagiaan dan kemenangan. Lebih jauh, konsep nasihat dapat menggugah berbagai perasaan yang mendorong seseorang untuk beramal shaleh dan taat kepada-Nya. Mau`izhah hasanah juga dapat diartikan dengan ucapan yang berisi nasehat yang baik dan dapat memberi manfaat bagi orang yang mendengarkannya. Ada juga yang menafsirkan dengan argumen yang memuaskan sehingga pihak yang mendengarkan dapat membenarkan apa yang disampaikan oleh pembawa argumen itu.²⁵ Sedangkan nasehat yang baik adalah nasehat yang tulus tanpa pamrih, dan tidak mengharapkan sesuatu selain kebaikan itu sendiri, sebagaimana nasehatnya Lukman kepada anaknya.²⁶

Ketiga, mujadalah atau diskusi. Metode *mujadalah* khususnya untuk obyek dakwah (*mad`u*) yang memiliki ciri antara menerima dan menolak materi dakwah. Metode *mujadalah* digunakan untuk memberikan kepuasan kepada obyek dakwah dan menerima dakwah secara mantap. Metode ini mensyaratkan sang pendakwah untuk menambah kemampuan dalam segala hal sehingga bisa memberikan respon kepada obyek dakwah secara baik dan menggembirakan perasaan mereka. Mujadalah dimaksudkan untuk merangkai obyek dakwah, agar berfikir dan mengeluarkan pendapatnya serta ikut menyumbangkan dalam suatu masalah agama yang terkandung banyak kemungkinan jawabannya.

²⁵ Abdul Kadir Munsyi, *Metode diskusi dalam dakwah*, Surabaya: Percetakan al-Ikhlash, Tahun 1982, Cet. Ke-1, hal.,31,

²⁶ Sayyed Quthb, *Fi Zhilal Al-Qur`an*, jilid V., hal. 2781-2788.

2. Jenis-jenis Dakwah

Ada beberapa jenis dakwah, yaitu di antaranya: dakwah fardiyah, dakwah jamaah, dakwah kultural, dakwah bi al-hal, dakwah bi al-lisan, dan dakwah bi ar-risalah.²⁷

Dakwah fardiyah adalah ajakan atau seruan ke jalan Allah yang dilakukan seorang da'i (pendakwah) kepada orang lain secara perseorangan dengan tujuan memindahkan al-mad'u (obyek dakwah) pada keadaan yang lebih baik dan diridhai Allah. Dakwah fardiyah merupakan antonim dari dakwah *jama'iyah* atau *'ammah*.²⁸

Dakwah jamaah adalah suatu kegiatan dakwah yang menjadikan kehidupan jamaah (kehidupan kelompok secara Islami) sebagai sarana sekaligus sasaran dakwah. Dakwah jamaah juga dapat dimaknai sebagai sebuah metode dakwah dengan membentuk jamaah yang jamaah itu diwujudkan dalam sistem kehidupan Islami. Antara anggota-anggota jamaah itu saling berinteraksi secara Islami, saling membantu dalam kebaikan dan takwa, tidak ada konspirasi saling menjatuhkan, saling menasehati tentang kebenaran dengan sabar dan santun, kerja sama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama, kedamaian bersama dan kebahagiaan bersama. Di dalam dakwah jamaah terdapat beberapa unsur, yaitu: Pertama, inti jamaah; kedua, pamong jamaah; ketiga, anggota atau warga jamaah yang belum tentu semuanya Muslim, justru yang belum Islam diajak hidup secara Islami. Kegiatan jamaah adalah saling mengajarkan dan mengamalkan ajaran dan

²⁷ HM Sukriyanto AR, *Ensiklopedi Dakwah*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Ar-Rahmah, Tahun 2010, Cet. Ke-1, hal. 10-12.

²⁸ Ali Abdul Halim Mahmud, *Dakwah Fardiyah: Metode Membentuk Pribadi Muslim*, Jakarta:Gema Insani, Tahun 2004, Cet. Ke-2, hal.29.

nilai-nilai Islam secara keseluruhan, meliputi akidah, ibadah, akhlak dan muamalah duniawiyah.²⁹

Dakwah kultural atau budaya adalah segala hasil cipta, rasa, karsa manusia. Jadi, dakwah kultural adalah berdakwah dengan menggunakan kultur (termasuk kesenian) sebagai sarana dan metode. Misalnya, berceramah dengan menggunakan bahasa lokal (sesuai dengan kultur setempat, seperti bahasa Melayu, Sunda, Jawa, Madura, dan seterusnya), menggunakan alat-alat (hasil budaya manusia seperti pengeras suara, menggunakan tv, radio, majalah, dan seterusnya), menggunakan sarana transportasi dalam berdakwah (seperti mobil, motor, perahu, pesawat terbang dan sebagainya), menggunakan kesenian setempat (seperti wayang, tradisi-tradisi bersilatullah dalam lebaran, lagu-lagu yang bermuatan iman, Islam dan ihsan serta pendidikan, sinetron, film, drama dan sebagainya). Dalam dakwah kultural, dai dai harus kritis, bisa membedakan hasil budaya (kultur) yang bisa dimanfaatkan untuk berdakwah dan mana yang harus dibuang, ditinggalkan. Oleh sebab itu, seorang dai harus memahami Islam dan kultur, bisa membedakan mana yang ibadah dan mana yang bid`ah.³⁰

Dakwah bi al-hal adalah menyampaikan dakwah dengan tindakan-tindakan nyata/kongkrit, seperti memberi makanan, pakaian, dana, membangun sekolah, memberi beasiswa, membantu biaya pengobatan, melakukan pelatihan memberantas kemiskinan, mengadakan kursus-kursus kesejahteraan keluarga, kewirausahaan, pendidikan anak, perbaikan gizi, perbaikan lingkungan, dan seterusnya.³¹

²⁹ HM Sukriyanto AR, *loc.cit.*

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

Dakwah bi al-lisan adalah dakwah dengan lisan, menyampaikan kebenaran Islam kepada seseorang dengan lisan, melalui pembicaraan orang per orang, pidato, ceramah atau khutbah; dialog atau diskusi, dan sebagainya.³²

Dakwah bi ar-risalah adalah menyampaikan dakwah dengan melalui tulisan seperti surat, artikel, novel, cerpen, cerita bersambung, booklet, leaflet, penerbitan dan lain-lain.³³ Di era industri 4.0 ini, dakwah bi ar-risalah dapat melalui tulisan atau gambar (info grafis) melalui SMS, situs internet, mikro blog dan atau media sosial berbasis online.

3. Media Dakwah

Media dakwah yang dalam bahasa Arab disebut sebagai *wasilah da`wah* atau *wasail ad-da`wah* adalah peralatan yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada penerima dakwah atau media untuk menyampaikan dakwah.³⁴

Media dakwah bisa dibedakan dalam dua jenis, yaitu: Pertama, media tradisional, seperti wayang, kesenian lokal, tradisi lokal, ceramah-ceramah, dan lain-lain; dan kedua, media modern, seperti majalah, surat kabar, radio, tv, internet, HP, dan lain-lain.

Ada pula yang membedakan dalam tiga jenis selain dua jenis di atas, yaitu media pop. Media pop adalah media yang menjadi saluran budaya pop. Pengertian pop berasal dari kata populer yang artinya dikenal dan disukai orang banyak. Sedangkan secara teori, budaya pop atau budaya populer adalah budaya yang paling banyak diminati masyarakat saat ini. Minimal saat ini ada tujuh media

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ *Ibid.*, hal. 37.

pop, yaitu: televisi, film, pers pop, majalah pop, musik pop, fiksi,³⁵ dan juga internet dengan media sosialnya.

Adapun dakwah dengan media internet atau dakwah di dunia *cyber* adalah dakwah yang memanfaatkan teknologi informasi (TI). Beberapa manfaat teknologi informasi untuk dakwah adalah: Pertama, sebagai media dakwah yang cepat (dalam hitungan detik) dan murah; kedua, memudahkan mencari rujukan ayat, dan/atau hadis berdasarkan kata atau topik; ketiga, mencari informasi tentang materi dakwah melalui *search engine* atau mesin pencari di internet; keempat, alat komunikasi yang murah, massal, dan cepat; kelima, media dakwah, informasi dan promosi; keenam, media membangun citra majelis juru dakwah; dan ketujuh, media untuk menghadang kesalahan umat.³⁶

4. Sejarah dan Perkembangan Dakwah Islam

Walaupun Rasulullah saw. dapat disebut sebagai dai pertama dalam Islam, namun menurut M. Natsir, secara massif dakwah pertama kali muncul dalam Islam pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, yang diistilahkan dengan peristiwa *Timbang Terima*. Saat itu, Rasulullah saw. sedang mengadakan *Hijjatul Wada`* atau haji penghabisan. Disebut dengan timbang terima karena terjadi peristiwa timbang terima antara Rasulullah saw. selaku pembawa risalah dengan umat yang menerima amanah dakwah dari Rasulullah saw.³⁷

Dikisahkan, pada pagi hari, sesudah shalat subuh, berangkatlah Rasulullah saw. Dari Mina menuju ke padang Arafah. Beliau menunggang untanya, al-

³⁵ Acep Aripudin, *Sosiologi Dakwah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Tahun 2013, Cet. Ke-1, hal. 34-45.

³⁶ Teddy Suratmadji, *Dakwah di Dunia Cyber: Panduan Praktis Berdakwah Melalui Internet*, Jakarta: Madani Institute, Tahun 2010, Cet. Ke-1, hal. 20.

³⁷ M. Natsir, *Fiqhud Da`wah*, Jakarta: Media Da`wah, Tahun 1988, Cetakan Kelima, hal. 102.

Qashwa, diiringi oleh ribuan umat yang sama-sama melakukan ibadah haji. Sambil berjalan, mereka bertakbir dengan suara bergelombang, berirama, bersahut-sahutan dan menyerukan talbiyah.

Sesampainya di tengah-tengah lembah Arafah, Rasulullah saw. Menghentikan untanya di suatu tempat yang tinggi. Di dekatnya berdiri Rabi`ah bin Utnayah bin Khalaf, yang mempunyai suara keras dan lantang. Dia ditugaskan oleh Rasulullah saw. untuk menyambung suara Rasulullah saw. agar jelas terdengar oleh umat yang banyak berkumpul. Rasulullah saw. tetap duduk di atas untanya agar terlihat oleh orang banyak. Didahuluinya khutbah yang terkenal sebagai *Khutbatul Wada`*, khutbah perpisahan, dengan puji dan syukur kepada Allah Swt. Di dalam khutbah tersebut, Rasulullah saw. memberikan amanah dakwah kepada umatnya. Adapun beberapa amanah dakwah yang ditekankan oleh Rasulullah saw., yaitu: Pertama, kewajiban menghormati keamanan jiwa dan hak milik antara sesama manusia dan antara bangsa dengan bangsa, salah satu dasar utama untuk memelihara keamanan dan perdamaian; kedua, kewajiban menyempurnakan amanah (baik yang berupa materi ataupun tugas dan janji); ketiga, ketentuan mengenai penghapusan riba yang memeras kaum lemah; keempat, penegasan hak-hak dan kewajiban kaum perempuan umumnya, serta hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri; pemeliharaan tali ukhuwah Islamiyah antara sesama seiman; dan persamaan hak dan martabat manusia, tanpa memandang bangsa dan warna kulit.

Pada penutupan tiap-tiap amanah dakwah tersebut, beliau bertanya kepada umat yang mendengarkan, "Apakah aku sudah sampaikan?" dan setiap kali orang banyak menyahut: "Betul, sudah engkau sampaikan." Dan Rasulullah saw.

berseru: "Wahai Tuhanku, persaksikanlah!" Inilah yang diistilahkan oleh M. Nastir dengan timbang terima dakwah dari Rasulullah saw. kepada umatnya agar umatnya dapat mendakwahkan ke seluruh umat manusia walau Rasulullah saw. sudah wafat.³⁸

Setelah Rasulullah saw. wafat, dakwah Islam dilanjutkan oleh para sahabatnya dengan konsep *futuhah* (pembukaan), yaitu melalui pembukaan wilayah-wilayah Islam di luar Jazirah Arab.³⁹ Namun juga, selain *futuhah*, pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. dakwah Islam mengalami hambatan karena banyak kaum Muslimin yang keluar dari Islam dan tidak mau membayar zakat karena beralasan bahwa Rasulullah saw. sudah wafat. Mereka menganggap bahwa membayar zakat itu hanya terjadi pada zaman Rasulullah saw. masih hidup. Karenanya, mau tidak mau, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. harus melakukan perang *riḍḍah*, yaitu perang melawan orang-orang murtad dan tidak mau membayar zakat. Dakwah dengan *futuhah* yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. adalah melanjutkan perjuangan Rasulullah saw. dengan menyebarkan Islam ke wilayah Syam. Rasulullah saw. sendiri pernah melakukan dakwah *futuhah* dengan mengirimkan tentara ke Syria sebagai jawaban terhadap mobilisasi Byzantium. Selain ke wilayah Syam, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. juga mengutus Khalid bin Walid untuk mengembangkan Islam di wilayah Persia.⁴⁰

Dakwah Islam dengan *futuhah* secara besar-besaran terjadi pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab r.a. Pada masanya, Islam menyebar ke wilayah Syria,

³⁸ Ibid., hal. 102-106.

³⁹ Abdul Basit. M.Ag, *Wacana Dakwah Kontemporer*, Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, Tahun 2006, Cet. Ke-1, hal.177-183.

⁴⁰ Ibid.

Irak, Iran dan Mesir. Pada ekspedisi pertama ke wilayah Syria digambarkan sebagai ekspedisi yang dilakukan oleh para pemimpin (elite) yang memiliki pengaruh kuat di kalangan masyarakat Badui pada saat itu. Ekspedisi ini bukanlah ekspedisi kaum barbarian karena adanya tekanan penduduk atau adanya semangat keagamaan untuk melakukan invasi ke wilayah Syria. Alasan dasarnya untuk mengembangkan kekuasaan Islam Madinah ke wilayah tersebut. Salah satu suku yang ada di Syria, yakni Bani Ghasasania, setelah peperangan Qadisiyah pada tahun 14H, yang tentara Persia di bawah pimpinan Raja Rustam dikalahkan secara total, banyak orang-orang Kristen dari suku-suku Badui yang mendiami kedua belah sisi sungai Eufrat datang menghadap pimpinan pasukan Islam dan berkata: "Kabilah-kabilah yang pertama masuk Islam lebih bijaksana dari kami. Kini dengan terbunuhnya Rustam, kami pun akan masuk Islam." Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran Islam ke wilayah Syria dilakukan dengan cara damai melalui cara-cara persaudaraan.⁴¹

Selain itu, penyebaran Islam ke wilayah Mesir atau Afrika juga dilakukan dengan cara mengutus delegasi yang dipimpin oleh Amru bin Ash. Delegasi ini berhasil menyebarkan Islam ke wilayah tersebut dengan menggunakan cara-cara diplomasi dan cara-cara damai. Bahkan, Thomas W. Arnold mencatat bahwa kegiatan Islam di wilayah Afrika dilakukan oleh para mubaligh tanpa menggunakan senjata. Islam disebarkan oleh para pengikut madzhab besar Islam yang mewarnai dan menjadi ciri khas dari kehidupan masyarakat Afrika.⁴²

⁴¹ Ibid.

⁴² Thomas W. Arnold, *Sejarah Da`wah Islam*, Jakarta: Widjaya, Tahun 1981, Cet. Ke-1, hal. 285.

Untuk penyebaran Islam ke wilayah Spanyol, tidak ada berita orang masuk Islam di Spanyol karena paksaan atau adanya bentuk tekanan lain pada masa permulaan berkembangnya agama Islam di negara ini. Kemungkinan besarnya, salah satu faktor utama cepat meluasnya agama Islam di Spanyol adalah justru karena sikap toleransinya terhadap agama Kristen. Sikap toleransi pemerintahan Islam terhadap penduduk Kristen di Spanyol dan kebebasan pergaulan antara penganut kedua agama ini mengakibatkan sering terjadinya asimilasi. Isidore dari Beja, yang sangat membenci kaum penakluk dari Muslim ini, mencatat pernikahan Abdul Azis bin Musa dengan anak Raja Roderic, tanpa suatu kritik. Banyak orang-orang Kristen memakai nama-nama Arab, meniru cara hidup lahiriah kaum muslimin, misalnya khitanan, menu makanan dan minuman, dan meniru orang-orang pagan yang tidak dibaptis.⁴³

Seyyed Hossein Nasr menyatakan bahwa secara global, penyebaran Islam pada masa sahabat digambarkan menyebar ke berbagai wilayah di luar Jazirah Arabiyah yang dilakukan melalui beberapa cara atau gelombang. Di wilayah Persia, penyebaran Islam dilakukan dengan menggunakan kekuatan senjata. Mengingat wilayah ini merupakan basis dari kerajaan Persia yang menjadi salah satu penguasa besar pada masa itu. Sementara pada wilayah lainnya seperti Turki, India, Indonesia dan Afrika, Islam banyak disebar oleh para sufi.⁴⁴

Dakwah Islam di Nusantara, Indonesia, pertama kali dilakukan oleh Syekh Jmadil Kubra atau Syekh Jamaluddin al-Akbar al-Husaini (wafat sekitar awal abad 14) yang saat itu tinggal dan berada di Hadhramaut, Yaman. Ketika itu, dia merasa kecewa dengan kekalahan umat Islam di Perang Salib dan dan ambruknya

⁴³ Ibid., hal.122.

⁴⁴ Seyyed Hossein Nasr, *Islam Religion History and Civilization*, New York: Harper San Francisco, Tahun 2003, Cet. Ke-1, hal. 17.

kota Baghdad di tangan bangsa Mongol di tahun 1258 Masehi yang memunculkan krisis pengajaran Islam di Timur Tengah. Dia kemudian meninggalkan negeri Arab, mengembara ke India. Tapi di India, dia tetap merasa tidak cocok dan tidak kerasan. Lalu dia berangkat ke Champa (sekarang menjadi negara Kamboja) yang waktu itu menjadi pusat penyebaran agama Islam. Salah seorang putranya, Syekh Ibrahim Asmoro (konon kata asmoro berasal dari kata as-Samarqandi), menikah dengan salah seorang Putri Raja Champa yang masuk Islam. Putri ini kemudian melahirkan Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Syekh Jumadil Kubra juga tidak betah tinggal di Champa. Dia kemudian pergi ke tanah Jawa yang ketika itu kerajaan Majapahit sedang berkuasa.⁴⁵

Syekh Jumadil Kubra memilih untuk ke tanah Jawa karena dia kagum akan kebesaran Majapahit. Terutama setelah dia mendengar cerita-cerita heroik yang beredar di masa itu bahwa orang-orang Jawa berani mengalahkan dan mengusir bangsa Mongol dari bumi Nusantara. Ini berbeda dengan nasib negeri asalnya di Arab yang mudah ditaklukkan oleh bangsa Mongol. Sementara di Tanah Jawa, bangsa Mongol yang ditakuti itu ternyata kalah dan terusir di tahun 1293 di tangan Raden Wijaya, raja pertama Majapahit. Jadi ini membenarkan dugaannya bahwa Nusantara adalah masa depan Islam, bahwa di Nusantara, Islam akan berkembang lebih baik bahkan lebih maju dibandingkan di negeri asalnya sendiri, di negeri Arab.⁴⁶

Setelah Syekh Jumadil Kubra tiba di Tanah Jawa, ia mendakwahkan agama Islam ke Raja Majapahit, hingga akhirnya dia wafat di Tanah Bugis, tepatnya di Tosara, ibukota Kerajaan Wajo, Sulawesi Selatan. Seorang putranya,

⁴⁵ Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma` Ulama Indonesia*, Tangerang Selatan: Pustaka Afid, Tahun 201Cet. Ke-2, hal.56.

⁴⁶ *Ibid.*, hal.57.

Syekh Ibrahim Asmoro, kemudian menjadi tokoh kunci dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dari dirinya, muncul kaderisasi Wali Songo. Syekh Ibrahim Asmoro melahirkan pendakwah ulung, Syekh Maulana Ishaq dan Sunan Ampel.⁴⁷ Kemudian dari mereka berdua ini, lahir para pendakwah hebat lainnya di Nusantara yang dakwah mereka terus dilanjutkan oleh para penerusnya oleh para pendakwah Islam lainnya, sampai Indonesia merdeka dan sampai saat ini.

5. Pengertian Manajemen Dakwah

Menilik sejarah perkembangannya, manajemen telah dipengaruhi oleh agama, tradisi, adat istiadat dan sosial budaya. Hal ini dikarenakan bidang garapan utama manajemen adalah aspek sosial kemasyarakatan yang berbentuk organisasi. Organisasi diperlukan karena manusia terbatas kemampuan dan pengetahuannya, dan hakikat organisasi adalah kumpulan orang-orang yang bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan.⁴⁸

Berkaitan pada pandangan di atas, maka Islam dalam memandang manajemen berdasarkan teologi, yakni pada dasarnya manusia itu memiliki potensi positif yang dilukiskan dengan istilah *hanif*. Potensi semacam ini didasari atas cara pandang seseorang dalam melakukan pengelolaan, pemberdayaan, serta penilaian terhadap manusia. Sebagaimana diketahui bahwa ilmu manajemen itu berkembang sepanjang perkembangan dan perjalanan manusia yang terus akan berubah. Keterkaitan antara manajemen dan watak hanif adalah watak hanif akan menyebabkan manusia cenderung untuk memilih yang baik dan benar dalam seluruh kehidupannya. Sedangkan penilaian terhadap baik dan buruk akan sangat tergantung terhadap latar belakang kehidupannya.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ M. Munir, S.Ag., M.A. dan Wahyu Ilaihi, S.Ag., M.A., *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Prenadamedia Group, Tahun 2015, Cet. Ke-4, h. 41,

Dalam watak hanif ini akan menggiring manusia pada sifat dasarnya, yaitu cenderung untuk memilih yang baik dan benar dalam kehidupannya. Sedangkan standar penilaian tentang baik dan benar itu dapat diukur dengan latar belakang pendidikannya dan pengalamannya. Untuk itu, manajemen sangat berkaitan erat dengan kepemimpinan. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki potensi dasar untuk menjadi seorang pemimpin dalam pengertian yang luas. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa, "setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban dalam kepemimpinan".

Dalam sejarah Islam, manajemen telah diterapkan dengan sangat baik oleh Nabi Muhammad SAW yang diteruskan oleh Khulafaurrasyidin. Manajemen juga diterapkan dari setiap dinasti Islam sampai dinasti terakhir, Dinasti Turki Usmani.

Terkait dengan konteks dakwah, kini pengertian dan lapangan dakwah sangat luas dan tentu tidak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Maka, aktivitas dakwah harus dikelola secara baik dalam sebuah organisasi dakwah agar dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam sebuah organisasi dakwah, peranan manajemen sangat mempengaruhi seluruh proses aktivitas dakwah. Sedangkan istilah peranan manajemen secara umum merujuk kepada kategori-kategori tertentu dalam tingkah laku manajerial.⁴⁹

Adapun pengertian manajemen dakwah adalah suatu ilmu pengetahuan sekaligus keterampilan dalam berdakwah secara terencana, terorganisasikan, terkendali secara baik. Manajemen dakwah juga merupakan pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan dakwah secara baik dengan melalui perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian dan pengevaluasian.²¹⁵⁰

⁴⁹ Ibid. h.66.

⁵⁰ HM Sukriyanto AR, Op.Cit., hal,34.

Sedangkan M. Munir dalam bukunya mendefinisikan manajemen dakwah sebagai pengaturan secara sistematis dan koordinatif dalam kegiatan atau aktivitas dakwah yang dimulai dari sebelum pelaksanaan sampai akhir dari kegiatan dakwah.⁵¹

Adapun menurut Mahmuddin, manajemen dakwah adalah suatu proses dalam memanfaatkan sumber daya (insani dan alam) dan dilakukan untuk merealisasikan nilai-nilai ajaran Islam sebagai tujuan bersama.⁵²

Dengan tiga pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen dakwah merupakan proses manajemen yang dilakukan oleh dai` (subyek dakwah) untuk mencapai tujuan dakwahnya.

Dalam manajemen dakwah, hasil yang difokuskan adalah sasaran dakwah yang menjadi target bagi aktivitas dakwah yang direalisasikan dalam bentuk yang konkret. Oleh karena itu, diperlukan tindakan kolektif dalam bentuk kerja sama sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh para pelaku dakwah, sehingga masing-masing mampu memberikan kontribusi yang maksimal secara profesional. Kapasitas peranan (peran interpersonal, peran informasi, dan peran desisional) manajemen dakwah dalam hal ini adalah melakukan kerja sama secara harmonis yang merupakan sebuah usaha kolektif, terwujud dalam sebuah organisasi yang masing-masing memiliki fungsi dan tugas sesuai dengan bidangnya, diatur menurut prinsip-prinsip manajemen. Bila kondisi tersebut berjalan, maka tujuan dari organisasi dakwah akan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

⁵¹ M. Munir, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Kencana, Tahun 2006, Cet. Ke-1, hal.36-37.

⁵² Mahmudin, *Manajemen Dakwah Rasulullah*, Jakarta: Restu Ilahi, Tahun 2004, Cet. Ke-1, hal 23.

Sedangkan sarana-sarana manajemen dakwah yang bersifat manajerial yang paling penting yang harus dipertimbangan untuk diterapkan dalam situasi dan kondisi yang membutuhkannya adalah sebagai berikut:⁵³

Pertama, manajemen dengan peraturan, yaitu manajemen yang dibuat berdasarkan sikap berlebih-lebihan dalam menerapkan peraturan tanpa memperhatikan akses keluar. Manajemen seperti ini cenderung kehilangan spirit inovatif, pembaruan serta kreasi, atau biasa disebut sebagai manajemen klasik.

Kedua, manajemen reaksi, yaitu manajemen yang didasari atas sikap menunggu reaksi pihak lain kemudian melakukan reaksi balik. Dalam manajemen ini cenderung tidak memiliki planing, peraturan, peningkatan dan pembaruan.

Ketiga, manajemen krisis, yaitu sebuah manajemen yang bersifat insidental yang khusus menangani kejadian mendadak dan krisis yang sifatnya sementara.

Keempat, manajemen daya tarik pribadi, yaitu manajemen yang didasari atas daya tarik tertentu dan kekuatan pribadi yang dimiliki. Manajemen ini berputar pada aspek kepribadian, bukan pada kegiatan aktivitas.

Kelima, manajemen mengalah, yaitu manajemen dengan strategi mundur dalam melakukan posisi, manajemen yang didasari atas sikap membesar-besarkan prestasi.

Keenam, manajemen kabar menggembirakan, yaitu manajemen yang dibentuk atas sikap membangga-banggakan prestasi, dan kabar menggembirakan dengan mengindahkan problem yang ada.

⁵³ M. Munir, S.Ag., M.A. dan Wahyu Ilaihi, S.Ag., M.A., *Op.Cit.*, h. 72-73.

Ketujuh, manajemen pendelegasian mutlak, yaitu manajemen yang dibuat atas sikap menyerahkan kendali semua urusan pada pegawai, dalam semua hal cenderung untuk tidak memantau dan mengevaluasi.

Kedelapan, manajemen partisipasi, yaitu manajemen yang dibangun atas dasar partisipasi antara atasan dan bawahan yang kemudian dikerjakan dan direalisasikan dengan tanggung jawab secara bersama-sama.

Kesembilan, manajemen bertujuan, yaitu manajemen yang dibangun berdasarkan sikap memperlihatkan tujuan kepada karyawan kemudian dilakukan pembagian realisasi dengan tujuan-tujuan yang ada.

Adapun ruang lingkup dari manajemen dakwah adalah manajemen menjadi sarana atau alat pembantu pada aktivitas dakwah itu sendiri. Karena dalam sebuah aktivitas dakwah itu akan timbul masalah atau problem yang sangat kompleks, yang dalam menangani serta mengantisipasinya diperlukan sebuah strategi yang sistematis. Dalam konteks ini, maka ilmu manajemen sangat berpengaruh dalam pengelolaan sebuah lembaga atau organisasi dakwah sampai pada tujuan yang diinginkan.

Mengenai fungsi-fungsi manajemen dakwah, maka dia berlangsung pada tataran dakwah itu sendiri. Dikarenakan etiap aktivitas dakwah, khususnya dalam skala organisasi atau lembaga untuk mencapai suatu tujuan, dibutuhkan sebuah pengaturan atau manajemerial yang baik, ruang lingkup kegiatan dakwah merupakan sarana atau alat pembantu pada aktivitas dakwah itu sendiri. Adapun fungsi-fungsi manajemen dakwah tidak jauh berbeda dengan fungsi-fungsi yang terdapat di manajemen secara umum, namun ada ciri khasnya di dalam istilah dan beberapa pengertiannya, di antaranya, yaitu:

Pertama, takhthith (perencanaan dakwah). Secara alami merupakan bagian dari sunatullah, yaitu dengan melihat bagaimana Allah SWT. menciptakan alam semesta dengan hak dan perencanaan yang matang serta disertai tujuan dakwah. Dalam aktivitas dakwah, perencanaan dakwah bertugas menentukan langkah dan program dalam menentukan setiap sasaran, menentukan sarana-prasarana atau media dakwah, serta personel dari yang akan diterjunkan. Menentukan materi yang cocok untuk sepenuhnya pelaksanaan, membuat asumsi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi yang kadang-kadang dapat memengaruhi cara pelaksanaan program dan cara menghadapinya serta menentukan alternatif-alternatif, yang semua itu merupakan tugas utama dari sebuah perencanaan.

Kedua, tanzhim (pengorganisasian dakwah). Menjelaskan bagaimana pengelolaan rencana itu, yakni dilakukannya pembagian aplikatif dakwah dengan lebih terperinci. Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Sementara itu, Rosyid Saleh mengemukakan bahwa rumusan pengorganisasian dakwah itu adalah “rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi setiap kegiatan usaha dakwah dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan-satuan organisasi atau petugasnya.

Ketiga, tawjih (penggerakan dakwah). Tawjih merupakan inti dari dakwah itu sendiri yaitu seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi

tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Motivasi diartikan sebagai kemampuan seorang manajer atau pemimpin dakwah dalam memberikan sebuah kegairahan, kegiatan dan pengertian, sehingga para anggotanya mampu untuk mendukung dan bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan organisasi sesuai tugas yang dibebankan kepadanya.

Keempat, riqabah (pengendalian dakwah). Evaluasi dakwah dirancang untuk diberikan kepada orang yang dinilai dan orang yang menilai informasi mengenai hasil karya. Pengendalian manajemen dakwah dapat dikatakan sebagai sebuah pengetahuan teoritis praktis. Karena itu, para da'i akan lebih cepat untuk mencernanya jika dikaitkan dengan perilaku dari da'i itu sendiri sesuai dengan organisasi. Dengan demikian, pengendalian manajemen dakwah dapat dikategorikan sebagai bagian dari perilaku terapan, yang berorientasi kepada sebuah tuntutan bagi para da'i tentang cara menjalankan dan mengendalikan organisasi dakwah yang dianggap baik. Tetapi yang paling utama adalah komitmen manajemen dengan satu tim dalam menjalankan sebuah organisasi dakwah secara efisien dan efektif, sehingga dapat menghayati penerapan sebuah pengendalian. Tujuan diberlakukannya evaluasi ini, yaitu agar mencapai konklusi dakwah yang evaluatif dan memberi pertimbangan mengenai hasil karya serta mengembangkan karya dalam sebuah program. Sedangkan evaluasi dakwah dinilai penting karena dapat menjamin keselamatan pelaksanaan dan perjalanan dakwah, mengetahui berbagai persoalan dan problematika yang dihadapi serta cara antisipasi dan penuntasan seketika sehingga akan melahirkan kemantapan bagi para aktifis dakwah.

B. Muhammadiyah

1. Riwayat Singkat KH Ahmad Dahlan

Sejarah kelahiran Muhammadiyah tidak bisa dipisahkan dengan pendirinya, KH. Ahmad Dahlan. Nama aslinya adalah Muhammad Darwisj, lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868. Ayahnya, KH Abu Bakar adalah seorang imam dan khatib Masjid Besar Kauman Yogyakarta, sementara ibunya, Siti Aminah, adalah anak KH Ibrahim, penghulu besar di Yogyakarta. Pendidikan agamanya diajarkan sejak kecil oleh ayahnya, yaitu membaca Alquran. Setelah bertambah usia, ia tidak hanya belajar Alquran saja, tetapi juga ilmu-ilmu yang lain. Setelah menunaikan ibadah haji yang pertama (1890), kemampuan intelektualnya berkembang. Ibadah haji ini dilakukannya setelah beberapa bulan menikah dengan Siti Walidah pada tahun 1889. Selain menikah dengan Siti Walidah, KH Ahmad Dahlan juga menikah dengan Nyai Abdullah, Janda dari H Abdullah, dan memiliki putra R.H. Duri. Dia juga menikah dengan Nyai Rum, adiknya Kyai Munawir Krpyak, Jogjakarta, dan mempunyai anak laki-laki yang meninggal ketika masih bayi. Nyai Rum ini Bibinya Prof. Kahar Muzakkir. Kemudian, dia menikah dengan Nyai Aisyah (Adik Adjengan Penghulu) Tjiandjur dan mempunyai anak bernama Dandanah, juga menikah dengan Nyai Solihah, puteri Kandjeng Penghulu M. Syafi`i, adiknya Kyai Yasin Pakualaman Jogjakarta.⁵⁴

Ketika berada di Tanah Suci, KH Ahmad Dahlan berkomunikasi dengan berbagai ulama yang berasal dari Indonesia, seperti dengan Syekh Muhammad Mahfudzh A-Termasi (dari Termas), Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi,

⁵⁴ Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Tahun 2010, Cet. Ke-1, hal.71-74

Syekh Jamil Jambek dari Minangkabau, Kyai Najrowi dari Banyumas, dan Kyai Nawawi dari Banten. Ketika menunaikan ibadah haji keduanya, tahun 1903 dan bermukim di Arab Saudi hampir dua tahun, dia juga belajar dengan beberapa ulama untuk beberapa disiplin ilmu keislaman, yaitu: dia belajar fiqh kepada Syekh Saleh Bafadal, Syekh Sa`id Tamami, dan Syekh Sa`id Babusyel; belajar hadits kepada Mufti Mazhab Syafi`i; belajar falak kepada Kyai Asy`ari Bawean; dan belajar ilmu qiraah kepada Syekh Ali Misri Makkah. KH Ahmad Dahlan juga mengadakan tukar pikiran dengan ulama Indonesia yang telah lama bermukim di Arab Saudi untuk masalah sosial dan keagamaan, yaitu dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Kyai Nawawi Banten, Kyai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kyai Fakih dari Maskumambang.⁵⁵

Pada haji pertamanya, KH Ahmad Dahlan membeli buku dengan menggunakan sebagian modal sebesar f 500. Biaya ini dia peroleh atas bantuan kakaknya, Nyai Haji Saleh. Sebetulnya uang itu diberikan untuk berdagang. Buku-buku yang dibelinya dapat ditemukan dalam koleksinya seperti karangan Muhammad Abduh; *Rosalatul Tauhid*, *Tafsir Juz Amma*, *Al-Islam wa-l-Nashraniyah* kemudian *Kanz Al-Ulum*, *Dairah Al-Ma`arif* karangan Farid Wajdi, *Fi Al-Bid`ah*, *Al-Tawassul wa-l-Wasilah*, karangan Ibnu Taimiyah, *Izhar al-Haq* karangan Rahman al-Hindi, *Tafshil al-Nasyatain Tashil al Sa`adatain*, *Matan al-Hikmah* karangan Atha Allah, dan *Al-Qashaid al-Aththasiyyah* karangan Abd al-Aththas.

Untuk kegiatan sosial, KH Ahmad Dahlan telah melakukannya ketika ayahnya masih hidup. Dia sering membantu ayahnya mengajar anak-anak remaja

⁵⁵ Ibid., hal. 74.

pada siang hari dan antara Magrib dan Isya`. Kegiatan sosial ini mengalami peningkatan ketika ayahnya, yang mempunyai tugas sebagai *Katib Amin*, meninggal dunia pada tahun 1896. Sesuai tradisi Kraton, sebagai anak laki-laki tertua, dia menggantikan ayahnya sebagai *Katib Amin*, bertugas melakukan Khutbah Jumat secara bergantian dengan delapan *Khatib*. Dia juga menjadi anggota *Dewan Hukum Islam* atau *Raad Agama* Kraton Yogyakarta. Sebagai imbalan, dia menerima gaji berupa *sawah lungguh* dan tinggal di rumah yang dulu ditempati oleh ayahnya.⁵⁶

Dalam posisinya sebagai *Katib Amin*, KH Ahmad Dahlan melakukan pembaruan pertama, yaitu membetulkan arah kiblat yang sebenarnya condong ke utara atau barat laut 23 derajat, berbeda dengan tradisi yang selama ini berlaku waktu itu lurus ke barat. Tetapi, ide ini ditolak oleh Kanjeng Kyai Penghulu H.M. Kholil Kamaludiningrat. Ketika KH Ahmad Dahlan merenovasi surau milik keluarganya pada tahun 1899, agar mengarah kepada kiblat yang sebenarnya, surau tersebut dibongkar paksa atas perintah Kanjeng Kyai Penghulu.⁵⁷

Setelah kembali dari ibadah hajinya yang kedua, kegiatan sosial KH Ahmad Dahlan makin meningkat. Dia mulai membuka kelas belajar dan membangun pondok untuk menampung para murid yang hendak belajar Islam maupun ilmu umum seperti ilmu falak, tauhid, dan tafsir. Selain itu, dia juga melakukan perjalanan ke daerah-daerah lain, seperti Periang, Jakarta, Jombang, Banyuwangi, Pasuruan, Surabaya, Gresik, Rembang, Semarang, Kudus, Pekalongan, Purwokerto, dan Surakarta.⁵⁸

⁵⁶ Ibid., hal.75.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.

KH Ahmad Dahlan juga membangun komunikasi dengan berbagai kalangan seperti ulama, intelektual dan kalangan pergerakan, termasuk dengan Boedi Oetomo (BO). BO adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Soetomo dan para mahasiswa STOVIA yaitu Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeraji pada tanggal 20 Mei 1908. BO sendiri digagas oleh Dr. R.M. Wahidin Sudirohusodo, seorang dokter pribumi Jawa. Perkenalannya dengan BO terjadi pada tahun 1909, setahun setelah BO berdiri, melalui pembicaraan dengan Joyosumarto, yang memiliki hubungan dekat dengan Dr. R.M. Wahidin Sudirohusodo, salah seorang pimpinan BO yang tinggal di Ketandan, Yogyakarta. KH Ahmad Dahlan tertarik dengan BO, kemudian menjadi anggota BO dan menjadi salah seorang komisararis dalam kepengurusan BO Cabang Yogyakarta. Selama aktif di BO, KH Ahmad Dahlan mendapat pelajaran mengenai cara membentuk persyarikatan, menyusun kepengurusan, dan lain-lain yang menyangkut persyarikatan.⁵⁹

Posisi KH Ahmad Dahlan sebagai penasehat masalah-masalah agama BO, memungkinkan dirinya dapat mengaktualisasikan ilmu agama yang dikuasainya dan belajar masalah organisasi modern. Selain itu, pada tahun 1910, KH Ahmad Dahlan juga menjadi anggota Jamiat Kheir, organisasi Islam yang banyak bergerak dalam bidang pendidikan dan mayoritas anggotanya adalah orang-orang Arab. Keterlibatannya dalam dua organisasi ini (BO dan Jamiatul Kheir) telah menambah pemahaman KH Ahmad Dahlan, yaitu: Pertama, dia mengetahui masalah berorganisasi dan mengatur organisasi secara modern; dan kedua, dia dapat mempelajari tentang cara berorganisasi modern di kalangan orang Islam.

⁵⁹ Ibid. hal.76.

Melalui Jamiatul Kheir, dia juga dapat memahami tentang kegiatan sosial, terutama yang berhubungan dengan pendidikan dan pengelolaan lembaga pendidikan model sekolah. Dengan bekal inilah, KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah.⁶⁰

2. Sejarah dan Perkembangan Singkat Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah pertama kali didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Kota Yogyakarta. Nama Muhammadiyah secara harfiah berarti "para pengikut Muhammad". Pada akhir tahun 1920-an, cabang-cabang Muhammadiyah telah berdiri di hampir semua kota besar dan sedang di Jawa. Dari akhir tahun 1920-an, gerakan ini menyebar ke sejumlah tempat di luar Jawa di Hindia-Belanda. Sejak awal, Muhammadiyah berpendirian untuk tidak terlibat dalam politik yang berhadapan dengan otoritas kolonial dan memusatkan perhatian kepada ranah pendidikan dan kesejahteraan sosial, membangun sejumlah sekolah, klinik, rumah sakit, panti asuhan, dan sejenisnya.⁶¹

Dalam seperempat abad setelah pendiriannya, Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi keagamaan terbesar di Hindia Belanda. Muhammadiyah juga mampu melewati periode pendudukan Jepang (1942-1945) dan Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) dan semakin berkembang pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an. Dalam kondisi terkini, di bawah Orde Baru, sejak tahun 1966, secara organisatoris Muhammadiyah tumbuh semakin besar.⁶²

Sejak Muhammadiyah didirikan sampai tahun 2015, telah dilakukan 47 kali muktamar di 15 kota dengan 15 ketua umum terpilih. Pada muktamar ke-47

⁶⁰ Ibid. hal.77.

⁶¹ Mitsuo Nakamura, *Bulan Sabit Terbit di Atas Pohon Beringin: Studi Tentang Pergerakan Muhammadiyah di Kota Gede Sekitar 1910-2010*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, Edisi Revisi Ditambah Bagian Dua, Tahun 2017, Cet. Ke-1, hal.5.

⁶² Ibid.

yang diselenggarakan dari tanggal 3 s.d 7 Agustus 2015, di Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammadiyah mengangkat tema "gerakan pencerahan menuju Indonesia berkemajuan". Pada muktamar ini diputuskan tentang program Muhammadiyah 2015-2020 atau disebut juga dengan visi Muhammadiyah 2020. Dalam kerangka kebijakan program jangka panjang disebutkan bahwa kebijakan program Muhammadiyah pada lima tahun ketiga (2015-2020) difokuskan pada tahap pengembangan dengan visi atau tujuan jangka menengah sebagai berikut: Pertama, terciptanya transformasi (perubahan cepat ke arah kemajuan) sistem organisasi dan jaringan yang maju, profesional, dan modern; kedua, berkembangnya sistem gerakan dan amal usaha yang berkualitas utama dan mandiri bagi terciptanya kondisi dan faktor-faktor pendukung terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya; dan ketiga, berkembangnya peran strategis Muhammadiyah dalam kehidupan umat, bangsa, dan dinamika global.⁶³

Pada tujuan jangka menengah ketiga, Muhammadiyah telah memposisikan diri sebagai organisasi yang tidak saja berkiprah di tingkat lokal, nasional ataupun regional, tetapi juga berkiprah secara internasional atau global. Hal ini ditetapkan agar Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan keagamaan tidak kehilangan perannya di masa mendatang ketika tantangan zaman telah berubah. Perdagangan bebas, konflik global, globalisasi, dan lahirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah beberapa fenomena yang harus direspon secara cermat dan strategis oleh Muhammadiyah. Hal ini sesuai dengan harapan sebagian besar dari

⁶³ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah: Tanfidz Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah Ke-47 Makassar*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tahun 2015, Cet. Ke-1, hal. 9.

warga Muhammadiyah terhadap kiprah organisasi ini untuk dapat melampaui peran-peran yang dimainkannya di tingkat nasional.⁶⁴

3. Ciri-Ciri Gerakan Muhammadiyah

Terdapat ciri-ciri khusus yang menjadi identitas dari hakikat atau jati diri Persyarikatan Muhammadiyah dan merupakan wujud dari gerakan dakwah Muhammadiyah secara umum. Secara jelas dapat diamati dengan mudah oleh siapapun yang secara sepintas mau memperhatikan ciri-ciri perjuangan Muhammadiyah itu atau ciri-ciri gerakan Muhammadiyah, yaitu sebagai berikut:²²⁶⁵

Pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Persyarikatan Muhammadiyah dibangun oleh KH Ahmad Dahlan sebagai hasil kongkrit dari telaah dan pendalaman (*tadabbur*) terhadap Alquranul Karim. Faktor inilah yang sebenarnya paling utama yang mendorong berdirinya Muhammadiyah, sedang faktor-faktor lainnya dapat dikatakan sebagai faktor penunjang atau faktor perangsang semata. Dengan ketelitiannya yang sangat memadai pada setiap mengkaji ayat-ayat Alquran, khususnya ketika menelaah surat Ali Imran, ayat:104, maka akhirnya dilahirkan amalan kongkret, yaitu lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah. Kajian serupa ini telah dikembangkan sehingga dari hasil kajian ayat-ayat tersebut oleh KHR Hadjid dinamakan “Ajaran KH Ahmad Dahlan dengan kelompok 17, kelompok ayat-ayat Alquran”, yang didalamnya tergambar secara jelas asal-usul ruh, jiwa, nafas, semangat Muhammadiyah dalam

⁶⁴ Hilman Latief, ”Ekspansi Spiritualisme dan Gerakan Sosial Muhammadiyah: dari Regionalisme ke Transnasionalisme”, dalam Alpha Amirrachman Dkk. (Ed.), *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia: Refleksi dan Agenda Muhammadiyah ke Depan*, Bandung: Mizan, Tahun 2015, Cet.Ke-1, hal.226.

⁶⁵ <http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-176-det-ciri-perjuangan.html>, diakses 29 Agustus 2020

pengabdianya kepada Allah Swt. Dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah seperti di atas jelaslah bahwa sesungguhnya kelahiran Muhammadiyah itu tidak lain karena diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Alquran karena itupula seluruh gerakannya tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Segala yang dilakukan Muhammadiyah, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kemasyarakatan, kerumahtanggaan, perekonomian, dan sebagainya tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan dan melaksanakan ajaran Islam. Tegasnya gerakan Muhammadiyah hendak berusaha untuk menampilkan wajah Islam dalam wujud yang riil, kongkret, dan nyata, yang dapat dihayati, dirasakan, dan dinikmati oleh umat sebagai rahmatan lil'alam.

Kedua, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Ciri kedua dari gerakan Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah Islamiyah. Ciri yang kedua ini muncul sejak dari kelahirannya dan tetap melekat tidak terpisahkan dalam jati diri Muhammadiyah. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa faktor utama yang mendorong berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah berasal dari pendalaman KHA Dahlan terdapat ayat-ayat Alquran Alkarim, terutama sekali surat Ali Imran, Ayat:104. Berdasarkan Surah Ali Imran, ayat : 104 inilah Muhammadiyah meletakkan khittah atau strategi dasar perjuangannya, yaitu dakwah (menyeru, mengajak) Islam, amar ma'ruf nahi munkar dengan masyarakat sebagai medan juangnya. Gerakan Muhammadiyah berkiprah di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai ragam amal usaha yang benar-benar dapat menyentuh hajat orang banyak seperti berbagai ragam lembaga pendidikan sejak

taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, membangun sekian banyak rumah sakit, panti-panti asuhan dan sebagainya. Semua amal usaha Muhammadiyah seperti itu tidak lain merupakan suatu manifestasi dakwah islamiyah. Semua amal usaha diadakan dengan niat dan tujuan tunggal, yaitu untuk dijadikan sarana dan wahana dakwah Islamiyah.

Ketiga, Muhammadiyah adalah gerakan tajdid. Ciri ke tiga yang melekat pada Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai Gerakan Tajdid atau Gerakan Reformasi. Muhammadiyah sejak semula menempatkan diri sebagai salah satu organisasi yang berkhidmat menyebarkan ajaran Agama Islam sebagaimana yang tercantum dalam Alquran dan Assunah, sekaligus membersihkan berbagai amalan umat yang terang-trangan menyimpang dari ajaran Islam, baik berupa khurafat, syirik, maupun bid'ah lewat gerakan dakwah. Muhammadiyah sebagai salah satu mata rantai dari gerakan tajdid yang diawali oleh ulama besar Ibnu Taimiyah sudah barang tentu ada kesamaan nafas, yaitu memerangi secara total berbagai penyimpangan ajaran Islam seperti syirik, khurafat, bid'ah dan tajdid. Sebab semua itu merupakan benalu yang dapat merusak akidah dan ibadah seseorang. Sifat Tajdid yang dikenakan pada gerakan Muhammadiyah sebenarnya tidak hanya sebatas pengertian upaya memurnikan ajaran Islam dari berbagai kotoran yang menempel pada tubuhnya, melainkan juga termasuk upaya Muhammadiyah melakukan berbagai pembaharuan cara-cara pelaksanaan Islam dalam kehidupan bermasyarakat, semacam memperbaharui cara penyelenggaraan pendidikan, cara penyantunan terhadap fakir miskin dan anak yatim, cara pengelolaan zakat fitrah dan zakat harta benda, cara pengelolaan rumah sakit, pelaksanaan sholat Id dan pelaksanaan kurban dan sebagainya..Untuk

membedakan antara keduanya maka tajdid dalam pengertian pemurnian dapat disebut purifikasi (*purification*) dan tajdid dalam pembaharuan dapat disebut reformasi (*reformation*). Dalam hubungan dengan salah satu ciri Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, maka Muhammadiyah dapat dinyatakan sebagai Gerakan Purifikasi dan Gerakan Reformasi.

4. Teologi Al-Ma'un untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Adapun salah satu gerak khusus dari dakwah Muhammadiyah adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam tulisannya, Ahmad Najib Burhani menyatakan bahwa teologi utama yang mendasari berdiri dan berkembangnya Muhammadiyah adalah teologi al-Ma'un. Teologi yang didasarkan pada Al-Qur'an (107:1-7) ini seringkali diterjemahkan dalam tiga pilar kerja, yaitu: *healing* (pelayanan kesehatan), *schooling* (pendidikan) dan, *feeding* (pelayanan sosial).⁶⁶

Teologi ini pulalah yang membuat organisasi ini mampu bertahan hingga 100 tahun dengan memiliki ribuan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan layanan kesejahteraan sosial yang lain. Karena itu, dalam rangka memikirkan Muhammadiyah paska peringatan satu abad (18 Nopember 1912 – 18 Nopember 2012), tulisan ini ingin melihat makna dan implementasi teologi ini dalam dua generasi yang berbeda; generasi awal dan generasi sekarang.

Materi utama yang diajarkan KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, kepada murid-muridnya pada dekade awal abad ke-20 adalah pemahaman Surat al-Ma'un. Pada intinya, surat ini mengajarkan bahwa ibadah ritual itu tidak ada artinya jika pelakunya tidak melakukan amal sosial. Surat ini bahkan menyebut

⁶⁶ Ahmad Najib Burhani, *Makna Teologi al-Ma'un di Dua Generasi Muhammadiyah*, Suara Muhammadiyah, 13/98, 22 Syakban - 7 Ramadlan 1434 H or 1 -15 Juli 2013, hal. 34.

mereka yang mengabaikan anak yatim dan tak berusaha mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sebagai ‘pendusta agama’.

Berhari-hari KH Ahmad Dahlan mengajarkan materi ini ke murid-muridnya. Sampai-sampai sebagian dari mereka merasa bosan dan mempertanyakan mengapa Kiai Dahlan mengulang-ulang pelajaran dan tidak segera pindah ke materi lain. Mendengar pertanyaan itu, KH Ahmad Dahlan balik bertanya, “Apakah kalian sudah paham surat ini? Apakah kalian sudah mempraktekkannya?” KH Ahmad Dahlan lantas meminta murid-muridnya untuk mencari orang paling miskin yang bisa ditemui di masyarakat, kemudian memandikannya dan menyuapinya. Inilah yang disebut pemahaman pertama dari teologi al-Ma‘un itu.

KH Ahmad Dahlan tidak hanya menerjemahkan teologi itu dalam tindakan karikatif seperti tersebut di atas. Dengan menggandeng Budi Utomo dan kraton Yogyakarta, KH Ahmad Dahlan lantas mendirikan sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan. Apa yang dirintisnya seratus tahun yang lalu itu kini telah berkembang pesat di seluruh Indonesia. Berdasarkan laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, organisasi ini telah memiliki 161 perguruan tinggi, 5.500 sekolah, lebih dari 300 rumah sakit, dan lebih dari 300 panti asuhan.

5. Gerakan Ekonomi Muhammadiyah²³⁶⁷

Dalam menggerakkan Muhammadiyah, sang pendiri, KH Ahmad Dahlan, telah memberi teladan dengan menjalankan bisnis sekaligus berdakwah. Hal ini berarti dalam memahami Islam ala KH Ahmad Dahlan dapat diibaratkan dua sisi mata uang yang jika salah satu sisinya tidak berfungsi maka tidak dapat dijadikan

⁶⁷ Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *AIK III: Kemuhammadiyah*, Tahun 2016

sebagai alat tukar karena dianggap tidak berharga. Begitu pula, jika ingin menjunjung tinggi agama Islam, kekuatan ekonomi pun perlu menjadi perhatian yang serius.. Jadi, sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah itu melalui dakwah kepada anggota Muhammadiyah., simpatisan Muhammadiyah dan warga yang ada pada amal usaha Muhammadiyah. Kalimat nukilan tersebut itulah yang menjadi titik sentral dari tulisan ini. Tulisan ini secara kritis mendeskripsikan gerakan Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan di setiap ruang dakwah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, namun di satu sisi ia tidak lepas dari sektor pembangunan ekonomi sebagai penopang kekokohan dakwahnya.

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan didirikan oleh KH Ahmad Dahlan karena punya sumber daya yang andal, yaitu: keimanan, pengetahuan dan ekonomi. Pendiri Muhammadiyah sangat menyadari betapa pentingnya aspek ekonomi dalam suatu gerakan untuk mencapai cita-cita. Pada awal mula kehadiran Muhammadiyah, sumber kekuatan dakwanya didukung oleh para pelaku ekonomi yang memiliki pengetahuan sekaligus disinari dengan keimanan, sehingga mampu menyebarkan nilai-nilai keislaman ke berbagai daerah di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya sama sekali belum mengenal apa sesungguhnya Muhammadiyah itu. Dengan perkataan lain masyarakatnya masih dominan meyakini kebiasaan yang sangat tradisional. Kekuatan ekonomi Muhammadiyah sekarang ini sungguh sangat luar biasa apabila dibandingkan dengan awal kehadiran Muhammadiyah yang sasaran dakwahnya serba disubsidi oleh para dermawan, khususnya para pengurus.

Jumlah anggota Muhammadiyah yang telah bernomor baku Muhammadiyah dan yang belum serta simpatisan di seluruh Indonesia serta amal usahanya secara

statistik— apabila persyarikatan Muhammadiyah mampu mengakomodir dengan sebaik mungkin—sungguh luar biasa kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Secara riil ada amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan telah memiliki kekuatan untuk menyubsidi kepentingan persyarikatan dalam berbagai sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi.

Sumber daya tersebut di atas telah diisyaratkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an misalnya dalam surat al-Mujadalah ayat 11 dan al-Hujarat ayat 15. Munculnya kekuatan dalam bidang ekonomi disebabkan oleh daya yang mendasari lebih awal, yaitu, kekuatan iman dan ilmu pengetahuan. Orang beriman pasti memiliki etos kerja yang baik, karena ia sadar bahwa umat yang terbaik itu adalah yang mampu memberikan solusi atas masalah yang dihadapi manusia.

Muhammadiyah dengan segala potensi yang dimiliki melalui amal usahanya itu memerlukan strategi yang lebih riil ke arah yang lebih spesifik dengan melibatkan elemen-elemen Muhammadiyah yang terkait. Misalnya, pada daerah tertentu ada peluang bisnis perumahan atau dalam bentuk lainnya, sebaiknya direspon dan hasilnya juga tetap dalam pengawasan Muhammadiyah.

Sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah dari Sabang sampai Marauke sungguh menjajikan, sebab berbagai hal telah dimiliki seperti jumlah anggota dan simpatisan serta relasinya. Muhammadiyah dapat dijadikan sebagai instrument bisnis dalam posisi sebagai produsen, konsumen atau lainnya. Amal usaha yang paling terkecil sekalipun pasti punya potensi nilai ekonomi yang dapat menjadi sebuah kekuatan bagi persyarikatan Muhammadiyah.

Nilai dasar Muhammadiyah telah dituangkan dalam maksud dan tujuannya, yaitu “Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud

masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”. Dari sini, dapat dipahami bahwa salah satu yang menjadi program perjuangan Muhammadiyah adalah kesejahteraan masyarakat.. Kesejahteraan masyarakat tentu tidak terlepas dari keterkaitan dengan nilai ekonomi. Islam mengajarkan tentang kewajiban berinfak dan bersedekah serta yang lainnya. Bahkan, rukun Islam yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kemampuan bukan hanya pada aspek pengetahuan dan kesehatan, tetapi hal yang sangat urgen adalah kemampuan ekonomi, umat Islam khususnya warga Muhammadiyah tentu wajib menyadari bahwa amar ma’ruf nahi munkar terhadap pemurnian ibadah khusus dan pemurnian aqidah boleh dikata telah berhasil. Namun, amar ma’ruf dalam bidang ekonomi belum menjadi prioritas atau perhatian serius bagi Muhammadiyah.

Muhammadiyah telah melakukan pendataan kemungkinan-kemungkinan apa yang dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Dikarenakan Muhammadiyah sudah tersebar di seluruh Indonesia, dan warganya pasti ada yang mengetahui potensi ekonomi di daerahnya. Data yang diperoleh itu dikaji oleh Muhammadiyah melalui majelis yang terkait dengan melibatkan PTM, kemudian hasilnya ditransformasikan kembali kepada warga Muhammadiyah sebagai pelaku ekonomi.

Suatu pergerakan dapat eksis melintasi zaman karena didasari dengan nilai keimanan dan rasionalitas yang dimiliki oleh pendirinya dan generasi selanjutnya. Kebesaran persyarikatan Muhammadiyah akan terus maju dan berkembang, karena kemampuannya mempertahankan nilai-nilai yang selama ini menjadi dasar dalam beraktifitas. K.H. Ahmad Dahlan telah memberi contoh dalam mengembangkan Muhammadiyah yaitu, “tidak dendam, tidak marah, dan tidak

sakit hati jika dicelah dan dikitik”. Pesan ini bukanlah hal mudah melekat pada setiap manusia, khususnya bagi warga Muhammadiyah, kalau bukan didorong oleh nilai-nilai keIslaman tersebut. Sifat tidak dendam muncul karena orang memiliki nilai keimanan dan pertimbangan rasional. Suatu pergerakan tidak mampu bertahan lama karena pendukungnya mudah tersinggung, mudah putus asa. Pada akhirnya, mereka mengundurkan diri dan mengambil sikap keuar dari perkumpulan., bahkan kembali mencelah dan mengkritik.

KH Ahmad Dahlan sangat yakin bahwa Muhammadiyah ini akan diterima dengan baik oleh siapapun di kemudian hari, apabila diberikan penjelasan secara rasional, metode yang baik, dan disertai petunjuk dari Allah SWT. Telah banyak kisah berlalu bahwa sejumlah orang dulunya sangat anti-Islam, anti-Muhammadiyah, tetapi kemudian berbalik menjadi pembela dan penggerak yang sangat produktif bagi misi Islam dan/atau misi Muhammadiyah. Pesan KH Ahmad Dahlan “Hidup hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah”. Pesan ini memiliki makna tauhid kepada Allah SWT, bahwa beraktifitas melalui wadah Muhammadiyah adalah dalam rangka ibadah dengan penuh keikhlasan karena mengharap keridhaan Allah semata.. K.H. Ahmad Dahlan dengan ilmu yang dimilikinya mampu memikirkan sangat jauh ke depan bahwa Muhammadiyah ini akan semakin besar dan menjanjikan kegiatan ekonomi bisnis yang menguntungkan, menjanjikan pendapatan yang besar dan juga kekuasaan yang menggiurkan. Di sisi lain, Muhammadiyah dengan amal usahanya di bidang pendidikan akan melahirkan para sarjana yang rasional, memiliki konsep dan teori yang dikembangkan yang dapat menjadi sebuah kekuatan bagi persyarikatan sekaligus dapat menjadi sebuah ancaman.

KH Ahmad Dahlan sebagai pendiri persyarikatan Muhammadiyah menyadari hal itu bahwa majunya suatu pergerakan memerlukan dukungan dari orang-orang yang berpikiran maju dan berakhlak yang tinggi, juga memerlukan dukungan material. Orang-orang yang mengkhidmatkan dirinya pada Muhammadiyah dan amal usahanya akan mampu menekan diri dari hal-hal yang menjanjikan di atas apabila ada jaminan terhadap diri dan keluarganya. K.H. Ahmad Dahlan melakoni usaha bisnisnya dengan berdagang yang hasilnya sebagian digunakan untuk membiayai para tenaga pengajar di sekolah yang ia rintis, karena beliau sadar bahwa yang mengurus dan mengajar itu memerlukan material untuk keperluan dirinya dan keluarganya., sementara waktunya habis untuk mengajar dan mengurus kepentingan persyarikatan.

Dari pesan pendiri Muhammadiyah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dengan sumber daya manusia yang menjadi modal penggerak, Muhammadiyah memerlukan konsep rasional, produktif dan implementatif. Kemajuan Muhammadiyah dengan amal usahanya tentu perlu disyukuri. Namun, pada sisi lain terkadang beberapa orang membuat kejutan dengan menggugat amal usaha persyarikatan. Hal ini dikarenakan beberapa janji yang menggiurkan itu.. K.H. Ahmad Dahlan berpesan. “ Hendaklah engkau tidak gampang melibatkan diri dari perebutan tanah sehingga bertengkar dan berselisih, apabila bertengkar dan berselisih di muka pengadilan. Jika itu kau lakukan, maka Allah akan menjauhkanmu memperoleh rezeki dari Allah. Perkara yang sampai berurusan dengan pengadilan dikarenakan manusia-manusia yang berpengetahuan mengandalkan rasionalitasnya, sementara sisi rohaninya yang sangat lemah.

Muhammadiyah dengan dukungan masyarakat kelas menengah. Di bidang ekonomi mempunyai tugas yang dilematis, karena sebagian dari apa yang telah dihasilkan itu diperoleh dengan sistem ekonomi yang masih diperdebatkan. Padahal, hal itu sudah mengakar secara turun temurun dilakoninya dan dinikmati dengan senang hati. Gaya hidup kelas menengah itu cenderung hedonis, sehingga untuk mengarahkan pada perilaku ekonomi yang Islami relative, terdapat kendala. Di sini Muhammadiyah dituntut melalui majelis terkait untuk membuat suatu kepastian hukum terhadap problematika dalam pencatatan ekonomi.

Muhammadiyah memiliki peluang ekonomi yang sangat potensial sekiranya mampu mengelolanya dengan baik, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh KH. Ahmad Dahlan, yaitu berdakwah sambil berbisnis. Keberhasilan beliau dalam menjalankan bisnisnya karena beliau memiliki sifat kenabian, yaitu mengikuti perilaku Rasulullah Saw, yang mendapat kepercayaan untuk menjual barang dari pemilik modal yang besar dengan sifat kejujuran yang dibarengi dengan skill dalam transaksi jual beli.

Upaya Muhammadiyah untuk menjalankan dakwah melalui gerakan ekonomi telah dilakukan dalam berbagai macam bentuk perekonomian. Tetapi tidak semua berhasil sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya: Pertama, Orang-orang yang terlibat di dalamnya kebanyakan sebagai penganjur atau pengamat ekonomi atau sebagai ahli retorika; kedua, Muhammadiyah masih memiliki standar ganda tentang kepastian hukum batas-batas kebolehan dalam meraih keuntungan; ketiga, hubungan kerjasama antarwarga dan amal usaha persyarikatan Muhammadiyah belum menunjukkan kebersamaan yang maksimal dalam bentuk ta'awun; keempat, pengambil

kebijakan dalam tubuh Muhammadiyah belum focus secara maksimal dalam tataran implementasi terhadap apa yang telah diputuskan Muhammadiyah; kelima, etos kerja sebagian warga Muhammadiyah belum menunjukkan nilai-nilai seperti yang dicontohkan oleh pendiri Muhammadiyah; keenam, para pelaku bisnis Muhammadiyah di seluruh Indonesia belum bekerja sama dengan baik, termasuk dengan sesama amal usaha.

Anggota Muhammadiyah secara individual menjalankan usahanya dan berhasil karena mereka memiliki etos kerja yang baik dan terhindar dari birokrasi yang berbelit-belit. Mereka mampu mengelola usahanya dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Di sisi lain, apabila dijalankan oleh organisasi, usaha itu mengalami stagnasi, bahkan kemunduran. Ini ironi sekali, karena Muhammadiyah sangat didukung oleh orang-orang kelas menengah dan rasional. Pekerjaan yang berat apabila dikerjakan secara gotong royong akan mudah diselesaikan. Ini berarti persoalan ekonomi dalam tubuh Muhammadiyah disebabkan oleh elemen tertentu yang perlu diobati agar gerakan ekonomi Muhammadiyah bisa eksis.

Pernyataan Ali bin Abi Thalib bahwa “kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik akan terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik” ini berlaku di Muhammadiyah. Kader-kader potensial Muhammadiyah lompat pagar, karena mereka melihat potensi yang dimilikinya akan mempunyai hasil yang baik buat dirinya dan orang lain. Namun, potensi itu lambat untuk tersalurkan, dan mereka akhirnya mengambil langkah lain dan setelah di luar pagar, ternyata sukses.

Muhammadiyah dengan konsep ta'awun dalam berbisnis masih berada pada taraf konsep. Misalnya, ada warga Muhammadiyah yang menyampaikan

ceramahnya kepada jamaah bahwa Muhammadiyah perlu tolong menolong sesama warga sebelum menolong yang lainnya. Sebagian isi ceramahnya dikutip dari Majalah Suara Muhammadiyah, sementara dia sendiri belum berlangganan Majalah Suara Muhammadiyah. Ironisnya lagi, orang yang bersangkutan berlangganan majalah lainnya.. Sifat dan sikap yang ada pada warga Muhammadiyah perlu pencerahan atau memuhammadiyahkan persepsi dan perilaku warga Muhammadiyah seperti yang dilakukan oleh KH. Ahmad Dahlan berdakwa sambil berdagang. Dengan perkataan lain, kita harus mampu berteori sekaligus mengamalkan secara nyata dan menyentuh langsung hasilnya kepada orang lain, serta bias diteladani oleh yang lainnya.

Muhammadiyah dalam kiprah pembinaan dakwahnya pada berbagai kalangan telah banyak berhasil mengklasifikasikan dari aspek umur, aspek jenis kelamin. Sementara itu, tataran berdakwah melalui peluang-peluang ekonomi masih terbatas. Potensi ekonomi pada setiap wilayah, daerah, cabang dan ranting Muhammadiyah sangat besar, tetapi belum diperhatikan. Muhammadiyah belum mendata, mengklasifikasikan peluang-peluang itu. Misanya, di daerah tertentu terdapat kekayaan alam yang potensial dan terjangkau, sementara daerah lain tidak memiliki kekayaan.

Muhammadiyah dengan misi dakwahnya ke segala lini memiliki peluang yang luar biasa dalam memformulasikan model gerakan ekonomi produktif apabila Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan majelis-majelis terkait dan Perguruan Tinggi muhammadiyah di seluruh Indonesia. Amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan dalam bidang pendidikan, dari TK samapi perguruan tinggi apabila dikordinasi dan dikelola dnegan sebaik mungkin

dan seamanah mungkin, membutuhkan banyak alat tulis kantor, kebutuhan ini menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan untuk menopang kekuatan ekonomi Muhammadiyah.

Dalam Islam, sudah digariskan bahwa orang masuk surge dengan iman dan amal salih. Untuk berdaya, orang harus bekerja, dan untuk bekerja, orang harus berpikir. Kelemahan pada beberapa gerakan ekonomi Muhammadiyah dikarenakan pelakunya belum memiliki skill yang standard and etos kerja yang baik. Sehingga, Muhammadiyah perlu membentuk lembaga khusus, seperti BLKM (Balai Latihan Kerja Muhammadiyah) atau Majelis Pemberdayaan Masyarakat yang terjun langsung ke masyarakat.

Model ekonomi Muhammadiyah perlu mendapat dukungan dari perguruan tinggi Muhammadiyah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dukungan ini berupa pendampingan seperti yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan masyarakat, namun kapasitasnya perlu ditingkatkan dan lebih fokus terhadap kualitasnya. Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah pada era kepemimpinan M. Amin Rais telah merumuskan tiga hal, yaitu: Pertama, mengembangkan amal usaha milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah; kedua, mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah; dan ketiga, memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah.

Mengembangkan gerakan ekonomi Muhammadiyah dengan memberdayakan atau memberikan peluang untuk lebih kreatif bagi para pelaku ekonomi Muhammadiyah akan memberikan dampak yang lebih positif bagi Muhammadiyah dan warganya.

Amal usaha Muhammadiyah yang digerakkan diawali dengan proses *bottom-up* (warga Muhammadiyah secara pribadi dan simpatisan). Kemudian, mereka secara ikhlas menyerahkannya kepada Muhammadiyah untuk dikelola secara terorganisasi. Amal usaha ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun, Muhammadiyah juga telah merintis proses *Top down*.

Muhammadiyah memiliki peluang untuk mendesain model gerakan ekonomi secara internal dan eksternal, yaitu: Pertama, secara internal: melibatkan anggota Muhammadiyah dan keluarganya, anggota ortom Muhammadiyah dan keluarganya dan amal usaha Muhammadiyah dengan segala perangkatnya; dan kedua, secara eksternal: anggota Muhammadiyah pasti memiliki relasi dengan dunia luar, begitu pula dengan amal usaha Muhammadiyah otomatis memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga lain.

Kedua potensi di atas sebagai lahan garapan ekonomi perlu dikelola oleh Muhammadiyah secara professional dengan memposisikan pada tiga bagian, yaitu: produsen, penyalur dan konsumen.

Untuk berdakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, apabila dilihat pada kecenderungan manusia modern, peluang yang sangat efektif adalah melalui bidang ekonomi. Kebutuhan manusia modern semakin konsumtif dan materialistic, sehingga model gerakan dakwah Muhammadiyah dilakukan secara simultan dengan majelis terkait untuk mendesain model gerakan dakwah yang spesifik, unik dan implementatif, serta terjangkau ke seluruh sasaran.

Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharu seharusnya tampil terdepan mengantarkan masyarakat untuk berperilaku Islami dalam dunia bisnis. Oleh sebab itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah berkewajiban membuat suatu peraturan hukum

tentang batas-batas kategori *subhat*, *mutasyabihat*, haram dan halalnya suatu produk dan hasil usaha. Selama masih ada masalah hukum mengenai sebuah proses dan produk ekonomi, selama itu pula peluang gerakan ekonomi Muhammadiyah tetap ketinggalan meraih peluang-peluang ekonomi bisnis bergengsi.

Pola pengkaderan dalam Muhammadiyah perlu dimasukkan ke dalam sistem ekonomi ala Muhammadiyah yang berkemajuan (berdaya saing tinggi) pada semua lini. Kita mengetahui bahwa Rasulullah Saw, pernah berdagang dan sukses karena memiliki integritas diri yang bernuansa ilahiah, yaitu kejujuran dan keikhlasan. Begitu pula, KH Ahmad Dahlan berhasil menjalankan misi dakwahnya dan bisnisnya. Keberhasilan KH Ahmad Dahlan tentu sangat diwarnai dengan nilai-nilai seperti yang dimiliki oleh Rasulullah SAW.

6. Manajemen Dakwah Muhammadiyah

Sejak awal berdirinya, sebagai sebuah organisasi, Muhammadiyah telah menerapkan prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi manajemen. Dengan demikian, penggunaan prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi manajemen dalam proses penyelenggaraan dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah merupakan *conditio sine qua non*,²⁴⁶⁸ tindakan, kondisi, atau bahan yang sangat diperlukan dan penting.

Namun menurut A. Rosyad Shaleh, melewati usia satu Abad, maka tugas Muhammadiyah menjadi sangat berat. Terlebih lagi menghadapi kompleksitas permasalahan dalam era globalisasi. Maka, Muhammadiyah dituntut untuk

⁶⁸ H, A, Rosyad Sholeh, *Manajemen Dakwah Muhammadiyah*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, Tahun 2017, Cet. Ke-4, hal. 115-116.

melakukan upaya-upaya pemoderenan dan profesionalisme pengelolaan dakwah. Bagi Muhammadiyah, dengan label organisasi modern, tentu saja prinsip-prinsip manajerial bukanlah hal yang asing, karena diakui atau tidak atribut organisasi Muhammadiyah yang kuat dan melekat adalah prinsip atau logika modernitas. Sehingga yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah adalah memperbaharui, *mentajdid* kembali, prinsip-prinsip mengenai pengelolaan persyarikatan dan peningkatan kualitas pengeloaan dakwah.²⁵⁶⁹

C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian dan Konsepsi Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan.⁶⁹ Sedangkan secara istilah, pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.⁷⁰

Dari pengertian ini, kata kunci dari pemberdayaan adalah kesadaran akan potensi. Adapun yang dimaksud dengan potensi di sini adalah sumber daya untuk membangun atau sumber daya pembangunan. Dengan kata lain, sumber daya pembangunan merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat guna peningkatan taraf hidupnya. Sebagai suatu potensi, sumber daya tersebut barulah berisi kemungkinan-kemungkinan yang tidak selalu otomatis mempengaruhi peningkatan taraf hidup masyarakat. Oleh

⁶⁹ ²⁵ Ibid.

⁶⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Tahun 2002, hal.242.

⁷⁰ Daniel Sukalele, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah", Dalam wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah Diakses tanggal 30 April 2019.

sebab itu, pemanfaatan sumber daya dalam pembangunan masyarakat dapat diartikan sebagai usaha untuk mengubah sumber daya yang bersifat potensial tersebut menjadi aktual. Dalam pandangan ekonomis, sering disebut dengan mengubah sumber-sumber yang bersifat potensial menjadi bersifat produktif. Dengan demikian, maka sumber daya tersebut menjadi dapat dirasakan manfaatnya bagi kehidupan masyarakat.⁷¹

Menurut Sutiyono dan Ni Nyoman Seriati, mengutip dari Eric Shragge di dalam bukunya yang berjudul *Community Economics Development, In Search of Empowerment and Alternative*, bahwa pengertian pemberdayaan atau *empowerment* adalah proses perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahamannya terhadap dunia tempat dia tinggal. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuatan (kekuasaan) yang berubah antara individu, kelompok, dan lembaga sosial lainnya. Pemberdayaan ditujukan kepada manusia dalam mengupayakan suatu perubahan untuk memaknai kehidupannya, baik pada tingkat individu maupun kelompok di dalam lingkungan sosialnya.⁷²

2. Sejarah Gerakan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Rhonda Phillips dan Robert H. Pittman bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah profesi memiliki akar yang dalam, menelusuri asal-usulnya pada gerakan sosial (pada akhirnya, tentang aksi "kolektif") pada masa-

⁷¹ Soetomo, *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Tahun 2012, Cet. Ke-2, h.208.

⁷² Sutiyono dan Ni Nyoman Seriati, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Melaksanakan Revitalisasi Budaya Lokal "Bersih Desa" di Ketingan, Sleman*, FBS Universitas Negeri Yogyakarta, t.t., h.3-4.

masa awal seperti Gerakan Pembaruan Sanitasi tahun 1840-an dan kemudian reformasi perumahan di Amerika Utara, khususnya di Amerika Serikat.⁷³

Di luar Amerika Utara, pemberdayaan masyarakat mungkin disebut "masyarakat sipil," atau "regenerasi masyarakat," dan kegiatan dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah (LSM). Mungkin ada atau mungkin tidak ada regulasi organisasi, tergantung pada kerangka kerja kebijakan negara yang berbeda (untuk peninjauan pembangunan masyarakat di Eropa lihat Hautekeur 2005). Gerakan Progresif tahun 1890 melalui beberapa dekade pertama abad kedua puluh adalah semua tentang pemberdayaan masyarakat, meskipun istilah itu sendiri tidak muncul sampai pertengahan abad. Selama tahun 1950-an dan 1960-an, perubahan sosial dan aksi kolektif kembali mengumpulkan banyak perhatian karena kebutuhan untuk memperbaiki kondisi suram di daerah-daerah pedesaan yang dilanda kemiskinan dan daerah perkotaan yang menurun. Hak-hak sipil dan gerakan anti kemiskinan mengarah pada pengakuan pembangunan masyarakat sebagai praktik dan profesi yang muncul, mengambil bentuk sebagai cara untuk meminta perubahan dalam aspek sosial, ekonomi, politik dan lingkungan dari masyarakat.⁷⁴

Selama tahun 1960-an, ribuan perusahaan pemberdayaan masyarakat (CDC) secara harfiah dibentuk, termasuk banyak yang berfokus pada kebutuhan perumahan sebagaimana didorong oleh undang-undang federal (di Amerika Utara) yang menyediakan dana untuk organisasi masyarakat berbasis nirlaba. Pengambilan kembali pemerintahan berbasis warga ini juga didorong sebagai

⁷³ Rhonda Phillips and Robert H. Pittman, *An Introduction to Community Development*, Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN. Simultaneously published in the USA and Canada, First published 2009, p. 4.

⁷⁴ *Ibid.*

tanggapan terhadap pendekatan pembaruan perkotaan oleh pemerintah yang dimulai dengan Undang-undang Perumahan AS tahun 1949. Kekayaan pengalaman CDC dicatat dalam Proyek Sejarah Perusahaan Korporasi Pengembangan Masyarakat oleh Pratt Center for Community Development,. Ini termasuk salah satu CDC pertama di Amerika Serikat, Bedford Stuyvesant Restoration Corporation di kota New York.⁷⁵

Saat ini, ada sekitar 4000 CDC di Amerika Serikat, dengan sebagian besar berfokus pada pengembangan perumahan. Namun, banyak juga yang memasukkan serangkaian penuh kegiatan pengembangan masyarakat, dengan sekitar 25 persen menyediakan serangkaian komprehensif pembangunan perumahan, program kepemilikan rumah, pengembangan komersial dan bisnis, fasilitas masyarakat, ruang terbuka atau lingkungan, program tenaga kerja dan pemuda, dan kegiatan perencanaan dan pengorganisasian. Organisasi lain juga mempraktikkan pemberdayaan masyarakat, termasuk yang dilakukan sektor publik dan juga perusahaan nirlaba swasta dan organisasi nirlaba lainnya. Saat ini, pengembangan masyarakat telah berevolusi dari akarnya dalam aktivisme sosial dan perumahan untuk mencakup spektrum luas dari proses dan kegiatan yang berhubungan dengan berbagai dimensi masyarakat termasuk fisik, lingkungan, sosial dan ekonomi, tidak hanya di Amerika Serikat saja tetapi juga di berbagai negara.⁷⁶

3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kelompok

Jika pemberdayaan menurut Eric Shragge dapat dilakukan pada tingkat individu dan kelompok, tetapi menurut Gordon William I hanya dilakukan pada

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid.,

tingkat kelompok. Dalam tulisannya tentang “Learning from The Best-from Aesop to Empowerment”, seperti yang dikutip oleh Sutyono dan Ni Nyoman Seriati, dia berpendapat bahwa pemberdayaan itu dilakukan sebagai usaha kolektif dengan dikerjakan secara bersama-sama. Melalui usaha bersama ini, William mengartikan pemberdayaan itu dalam tiga hal, yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu: Pertama, bagaimana membuat pekerjaan dan tujuan organisasi lebih efektif; kedua, dalam dimensi lapangan ekonomi yang luas berarti melakukan semua kemungkinan yang dapat mendatangkan rejeki seseorang dan keluarganya dapat melangsungkan kehidupannya; dan ketiga, dalam dimensi kebersamaan yang harmonis daripada hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dengan demikian pemberdayaan ini dapat dilihat sebagai usaha kelompok untuk mengupayakan suatu pekerjaan lebih efektif, dapat mendatangkan masukan (*income*) sehingga dapat menunjang kehidupan bersama.⁷⁷

Pemberdayaan pada tingkat kelompok disebut juga dengan pemberdayaan masyarakat. Kini, pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah diterima. Namun demikian, upaya mewujudkannya dalam praktik pembangunan tidak selalu berjalan dengan baik. Banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan mungkin tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan masyarakat merupakan alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi.⁷⁸

Mereka yang berpegang kepada teori-teori pembangunan model lama juga tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan pandangan-pandangan dan tuntutan-

⁷⁷ Sutyono dan Ni Nyoman Seriati, *loc.cit.*

⁷⁸ Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, M.Si dan Dr. Ir. H. Poerwoko Soebiato, M.Si, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, Tahun 2018. Cet. Ke-4, h. 34. n

tuntutan keadilan. Mereka yang tidak nyaman terhadap konsep partisipasi dan demokrasi dalam pembangunan tidak akan merasa tenteram dengan konsep pemberdayaan ini. Lebih lanjut disadari pula adanya berbagai bias terhadap pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradigma baru pembangunan, yaitu:

Pertama, adanya kecenderungan berpikir bahwa dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya. Akibat dari anggapan ini adalah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikiran tersebut.

Kedua, adanya anggapan bahwa pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (*grass-root*). Akibatnya kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat.

Ketiga, pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial. Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah.

Keempat, anggapan bahwa teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang, di satu pihak, terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh

kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap perkembangannya. Di lain pihak, pendekatan pembangunan terlalu mengakibatkan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor.

Kelima, ada anggapan bahwa lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan. Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah itu kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya. Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak sejalan dengan nilai dan norma masyarakat.

Keenam, masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya. Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri. Ini tercermin pada reaksi pertama terhadap program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang meragukan apakah tepat masyarakat miskin dipersilahkan memilih sendiri bagaimana memanfaatkan dana bantuan yang diperolehnya. Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat. Bias ini melihat masyarakat sebagai obyek dan bukan subyek pembangunan.

Ketujuh, berkaitan dengan penjelasan di atas, maka orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah

bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan malas, dan bukan dengan memberi kepercayaan. Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial (*charity*) dan bukan usaha penguatan ekonomi.

Kedelapan, ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan. Padahal, upaya pemberdayaan masyarakat, akan menghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan sumber pertumbuhan yang lebih lestari (*sustainable*), tetapi umumnya dalam kerangka waktu (*time frame*) yang lebih panjang. Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan potensi yang ada pada rakyat sebagai kekuatan pembangunan.

Kesembilan, ada anggapan bahwa sektor pertanian dan pedesaan adalah sektor tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran di sektor itu. Berkaitan dengan itu, bermitra dengan petani dan usaha-usaha kecil di sektor pertanian dan pedesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi. Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh membangun usaha pertanian dan usaha kecil di pedesaan.

Kesepuluh, berkaitan dengan hal ini di atas, ada ketidakseimbangan dalam akses kepada sumber dana. Kecenderungan menabung pada rakyat, yang cukup tinggi di Indonesia, seperti tercermin pada perbandingan tabungan masyarakat dengan PDB (di atas 30%, termasuk salah satu tingkat tertinggi di dunia),

seringkali terasa tidak seimbang dengan kebijakan investasi melalui sektor perbankan yang lebih terpusat pada investasi besar, dan sebagian cukup besar di antaranya untuk investasi di sektor properti yang bersifat sangat spekulatif. Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi. Pengalaman Taiwan dan sebelumnya Jepang menunjukkan bahwa investasi di wilayah pedesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi kokoh.

Sepuluh bias di atas menyebabkan munculnya dilema-dilema pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaannya, khususnya di Indonesia,⁷⁹ yaitu:

Pertama, sejak awal tahun 1990-an, Pemerintah Indonesia mulai mengembangkan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan dan menanggulangi kemiskinan. Upaya ini dihadapkan pada perbedaan-perbedaan pemahaman tentang kemiskinan. Di satu sisi, kemiskinan dipandang sebagai keadaan yang absolut dengan kriteria yang sudah ditetapkan dan diseragamkan lalu dipakai sebagai dasar menyusun proyek pengentasannya. Pada kenyataannya kemiskinan memberikan wajahnya yang relatif. Kemiskinan juga menyangkut bagaimana kondisi sosial mendefinisikannya. Seseorang bisa jadi tidak miskin dalam kehidupan komunitas kultural dan geografis tertentu meski secara absolut dia didefinisikan sebagai miskin. Artinya, upaya pemberdayaan yang dilakukan tidak berhadapan dengan kenyataan yang pasti.

⁷⁹ Ibid., h.37-40.

Kedua, berkaitan dengan relativitas dalam mengukur keberhasilan, maka up keberaya pemberdayaan merupakan masalah tersendiri. Dikarenakan keberhasilan sendiri masih diperdebatkan dalam konteks teknis atau substantif. Evaluasi proyek pemberdayaan hampir selalu dilakukan dengan mengukur keberhasilan yang menyangkut bagaimana sebuah program dilaksanakan serta bagaimana anggaran yang direncanakan dapat diimplementasikan namun sering luput melihat sisi substansial dari tujuan pemberdayaan ini sendiri. Sementara itu di lain pihak substansi pemberdayaan sendiri terus diperdebatkan menyangkut pemahaman masyarakat yang berdaya dan siapa yang mendefinisikannya.

Ketiga, bentuk-bentuk upaya pemberdayaan yang bersifat pemberian bantuan seringkali justru tidak menjawab masalah ketidakberdayaan ini. Pemberian bantuan yang biasanya berupa sejumlah dana sebenarnya justru membuat upaya pemberdayaan melahirkan ketergantungan baru. Sekalipun bentuk bantuan yang diberikan sebenarnya ditujukan sebagai pemicu bangkitnya keberdayaan namun seringkali melahirkan mentalitas penerima, bukan penggerak dalam masyarakat yang menjadi sasarannya.

Keempat, menyangkut keberlanjutan program kegiatan. Di satu pihak, banyak program atau kegiatan yang dilakukan pemerintah dengan mengembangkan mobilisasi atau partisipasi semu yang masyarakat sasaran diajak, dipersuasi, bahkan diperintah untuk ikut serta dalam protek-proyek pemberdayaan yang dilakukan, ternyata tidak terjaga keberlanjutannya. Di lain pihak, pemberdayaan yang oleh organisasi di luar pemerintah mencoba menjawab masalah-masalah tersebut dengan pemikiran yang menyatakan perlunya membangun kesadaran kritis dalam masyarakat dalam bentuk penguatan

kelembagaan, pendidikan politik, dan upaya-upaya advokasi. Dalam kondisi tertentu, upaya ini mampu menjawab problem ketergantungan namun dalam kondisi yang tertentu pula upaya ini menjadi lambat bergerak.

Kelima, agenda-agenda yang sifatnya politik atau penguatan kelembagaan lebih dipilih sebagai agenda kedua setelah berbagai agenda yang menjawab masalah-masalah yang berhubungan dengan kebutuhan perut. Artinya, masyarakat yang benar-benar miskin akan berpikir memilih upaya pemberdayaan yang bernuansa bantuan ekonomi lebih dahulu daripada berpikir tentang bagaimana bergerak dan berusaha dengan mandiri.

Keenam, bentuk pemberdayaan dengan pola kemitraan menjadi fenomena yang cukup menarik. Banyak pihak yang mencoba untuk terlibat dan menjalin kerjasama dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Namun program ini akan menjadi sia-sia jika masing-masing pihak tidak berada dalam kapasitas yang setara. Dominasi akan membuat kerjasama menjadi timpang, konsensus tidak terwujud dalam keadilan, dan kenyataannya sangat sulit mendorong bentuk kemitraan yang sejajar dalam posisi dan kerjasama.

Ketujuh, adanya isu globalisasi, menghadapkan negara dengan pentingnya pasar dan ada upaya-upaya untuk menyusutkan peran negara. Padahal, ketidakberdayaan masyarakat justru seringkali diakibatkan oleh pembangunan yang berorientasi pada pasar. Kondisi ini akan melahirkan ketidakberdayaan baru yang negara hanya akan menjadi penonton saja.

Kedelapan, dalam konteks Indonesia, negara kesejahteraan (*welfare state*) sebenarnya sudah dirancang lewat pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dilema yang dihadapi bangsa

Indonesia adalah karena punya konsepnya namun selalu mengingkari untuk mewujudkannya.

Dilema-dilema pemberdayaan masyarakat ini dapat diatasi jika dilakukan dengan memadukan antara konsep pertumbuhan dan pemerataan. Karenanya, konsep pemberdayaan masyarakat harus mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*).⁸⁰ Terkait dengan pemahaman ini, pertama-tama perlu terlebih dahulu dipahami arti dan makna keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental serta terdidik dan kaut serta inovatif, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Namun, selain nilai fisik di atas, ada pula nilai-nilai *intrinsik* dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan. Seperti nilai kekeluargaan, kegotong-royongan, kejuangan, dan yang khas pada masyarakat Indonesia adalah kebhinekaan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*), dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut dengan ketahanan nasional.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk

⁸⁰ Ibid.

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan perkataan lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata sebuah konsep ekonomi, pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi secara harfiah berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, yang kegiatan ekonomi tersebut berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep ini menyangkut masalah penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses pasar dan ke dalam sumber-sumber informasi serta keterampilan manajemen.⁸¹

4. Prinsip Dasar Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya pemihakan, penyiapan, dan perlindungan untuk menjadikan rakyat berdaya. Yang dimaksud dengan rakyat berdaya adalah rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, mereka yang bisa menghasilkan dan menikmati produk yang dihasilkan. Mereka harus bisa menikmati apa yang telah mereka hasilkan. Dalam konteks ekonomi, menikmati berarti konsumsi (*demand*), sedangkan menghasilkan berarti produksi (*supply*). Rakyat yang berdaya berarti mampu mengikuti hukum alam-mampu bertahan secara mandiri (*survival life*), mampu mengikuti mekanisme alam-mampu meniru sifat-sifat dan kemuliaan Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang sepanjang kehidupannya untuk mencapai kesempurnaan, dan mampu mengikuti mekanisme pasar-mampu memiliki produk yang bisa dipertukarkan

⁸¹ Ibid., h.41.

sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sebagai tabungan.⁸²

Rakyat yang berdaya juga dapat diartikan sebagai rakyat yang berdaya saing. Mereka bisa menentukan pilihannya sendiri. Mereka memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, menikmati, dan melestarikan apa yang telah dihasilkan sepanjang masa. Mereka menentukan sendiri apa yang dihasilkan, bagaimana melaksanakan agar yang telah direncanakan berhasil dan menjadi produk, bagaimana menikmati produk yang dihasilkan, dan bagaimana mereka melestarikannya dari generasi ke generasi berikutnya agar memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

Pemberdayaan dapat pula dimaknai dari kata *empowerment*, yaitu upaya memberi dsys, memberi kekuatan atau suatu *power* agar rakyat dapat hidup dengan benar. Maksud hidup dengan benar adalah hidup dengan menggunakan prinsip dasar Kerja-Untung-Menabung.

Setiap orang harus bekerja untuk menghasilkan pendapatan, penerimaan melebihi pengeluaran. Pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk menabung. Rakyat yang mampu menabung merupakan tahapan pemberdayaan yang paling mendasar, Mereka yang bisa menabung diidentifikasi sebagai mereka yang sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya dan mampu menabung untuk keperluan masa depan atau investasi yang lebih luas.

Setiap orang yang sudah melaksanakan prinsip Kerja- Untung- Menabung harus mampu mengelola penghasilannya dengan baik, sehingga mampu memiliki

⁸² Prof. Gunawan Sumodiningrat, Ph.D dan Ari Wulandari, S.S., M.A., *Membangun Indonesia dari Desa*, Yogyakarta: Media Pressindo, Tahun 2016,Cet. Ke-1, h. 96.

tabungan. Pengelolaan keuangan yang baik akan membuat seseorang bisa merencanakan, mengalokasikan, dan menambah penghasilannya.

Tabungan berfungsi sebagai sumber pertumbuhan. Orang miskin yang memiliki tabungan akan menjadi kaya, sebaliknya orang kaya yang tidak memiliki tabungan akan menjadi miskin. Mereka yang memiliki tabungan akan bisa mengalokasikan tabungannya untuk investasi yang akan berkembang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Kesejahteraan dalam konteks pemberdayaan masyarakat bukan hanya kesejahteraan diri pribadi, tetapi kesejahteraan satu keluarga. Kesejahteraan dalam pemberdayaan masyarakat berarti kesejahteraan keluarga. Tahapan pemberdayaan masyarakat umumnya terdiri atas tiga hal, yaitu: rehabilitasi – pemberdayaan – perlindungan atau biasa disebut dengan pemihakan – penyiapan – perlindungan. Penyiapan sendiri bisa disebut pemberdayaan karena menyiapkan rakyat untuk mampu diberdayakan sebagai rakyat yang mandiri dan berdikari, berdiri di atas potensi sendiri.

Pemberdayaan sering dipahami dan terbatas pada aspek sosial antropologis secara umum. Artinya bila melihat suatu komunitas masyarakat sudah terlihat baik dan sejahtera secara umum, maka pemberdayaan masyarakat dianggap berhasil. Hal seperti ini indikatornya kurang jelas karena memuat aspek-aspek sosial antropologis yang berlaku secara komunal atau yang terlihat secara umum. Segala sesuatu yang berlaku secara umum, belum tentu menjelaskan kondisi riil setiap individu.

Misalnya, jika desa A disebut sejahtera, belum tentu semua warga desa A sejahtera karena indikatornya akan lebih kepada hal-hal yang bersifat umum,

sarana prasarana, kondisi lingkungan, ketertiban masyarakat, berlakunya adata budaya, dan lain-lain yang tidak mencerminkan kesejahteraan individu. Benar pasti banyak warga desa A yang sejahtera, tapi pasti ada warga desa A yang belum sejahtera.

Semestinya tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat berdasar pada pendekatan secara ekonomi keluarga, sehingga indikatornya jelas. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dari sisi ekonomi menggunakan indikator kesejahteraan, yang diukur dengan prinsip dasar Kerja – Untung –Menabung, mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya, serta memiliki tabungan.⁸³

5. Pemberdayaan untuk Masyarakat Miskin dan Terpencil

Pemberdayaan juga merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak. Bagi masyarakat miskin, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara (*voicelessness*) dan ketidak berdayaan (*powerlessness*) dalam hubungannya dengan negara dan pasar. Karena kemiskinan adalah multi dimensi, masyarakat miskin membutuhkan kemampuan pada tingkat individu (seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan) dan pada tingkat kolektif (seperti bertindak bersama untuk mengatasi masalah). Memberdayakan masyarakat miskin dan terbelakang menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan kualitas hidupnya.

Menurut Herry Dewanto bahwa unsur-unsur pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah: Pertama, inklusi dan partisipasi; kedua, akses pada

⁸³ Ibid., h. 100.

informasi; ketiga, kapasitas organisasi lokal; dan keempat, profesionalitas pelaku pemberdaya. Keempat elemen ini terkait satu sama lain dan saling mendukung.⁸⁴

Inklusi berfokus pada pertanyaan siapa yang diberdayakan, sedangkan partisipasi berfokus pada bagaimana mereka diberdayakan dan peran apa yang mereka mainkan setelah mereka menjadi bagian dari kelompok yang diberdayakan. Menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam pembangunan adalah memberi mereka otoritas dan kontrol atas keputusan mengenai sumber-sumber pembangunan. Partisipasi masyarakat miskin dalam menetapkan prioritas pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah diperlukan guna menjamin bahwa sumber daya pembangunan (dana, prasarana, sarana, tenaga ahli, dan lain-lain) yang terbatas secara nasional maupun pada tingkat daerah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat miskin tersebut.

Partisipasi yang keliru adalah melibatkan masyarakat dalam pembangunan hanya untuk didengar suaranya tanpa betul-betul memberi peluang bagi mereka untuk ikut mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang partisipatif tidak selalu harmonis dan seringkali ada banyak prioritas yang harus dipilih, oleh sebab itu mekanisme resolusi konflik kepentingan harus dikuasai oleh pemerintah guna mengelola ketidak-sepakatan. Ada berbagai bentuk partisipasi, yaitu: secara langsung, dengan perwakilan (yaitu memilih wakil dari kelompok-kelompok masyarakat), secara politis (yaitu melalui pemilihan terhadap mereka yang mencalonkan diri untuk mewakili mereka), berbasis informasi (yaitu dengan data

⁸⁴ Herry Dewanto, *Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Berbasis Masyarakat Terpencil*, Bappenas, tt.

yang diolah dan dilaporkan kepada pengambil keputusan), berbasis mekanisme pasar yang kompetitif (misalnya dengan pembayaran terhadap jasa yang diterima).

Partisipasi secara langsung oleh masing-masing anggota masyarakat adalah tidak realistis, kecuali pada masyarakat yang jumlah penduduknya sedikit, atau untuk mengambil keputusan-keputusan kenegaraan yang mendasar melalui referendum. Yang umum dilakukan adalah partisipasi secara tidak langsung, oleh wakil-wakil masyarakat atau berdasarkan informasi dan mekanisme pasar. Organisasi berbasis masyarakat seperti lembaga riset, LSM, organisasi keagamaan, dan lain-lain. mempunyai peran yang penting dalam membawa suara masyarakat miskin untuk didengar oleh pengambil keputusan tingkat nasional dan daerah.

Walaupun keterwakilan sudah dilakukan dengan benar, proses partisipasi masih belum benar jika penyelenggaraannya dilakukan secara tidak sungguh-sungguh. Upaya yang dilandasi niat jujur untuk menampung pendapat masyarakat terhadap kebijakan yang menyangkut ruang hidup mereka dapat menjadi tidak berhasil, jika pendapat wakil-wakil masyarakat yang diharapkan mewakili kepentingan semua unsur masyarakat itu kemudian hanya diproses sekedarnya saja, tanpa upaya memahami pertimbangan apa dibalik pendapat yang diutarakan wakil-wakil tersebut.

Partisipasi semu seperti itu menambah ongkos pembangunan, tanpa ada manfaat yang jelas bagi peserta yang diajak berpartisipasi. Upaya melibatkan masyarakat dalam pengertian yang benar adalah memberi masyarakat kewenangan untuk memutuskan sendiri apa-apa yang menurut mereka penting dalam kehidupan mereka.

Unsur ke dua, akses pada informasi, yaitu aliran informasi yang tidak tersumbat antara masyarakat dengan masyarakat lain dan antara masyarakat dengan pemerintah. Informasi meliputi ilmu pengetahuan, program dan kinerja pemerintah, hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, ketentuan tentang pelayanan umum, perkembangan permintaan dan penawaran pasar, dan sebagainya. Masyarakat pedesaan terpencil tidak mempunyai akses terhadap semua informasi tersebut, karena hambatan bahasa, budaya dan jarak fisik. Masyarakat yang *informed*, mempunyai posisi yang baik untuk memperoleh manfaat dari peluang yang ada, memanfaatkan akses terhadap pelayanan umum, menggunakan hak-haknya, dan membuat pemerintah dan pihak-pihak lain yang terlibat bersikap akuntabel atas kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Kapasitas organisasi lokal adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, mengorganisasikan perorangan dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, memobilisasi sumber-sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah bersama. Masyarakat yang *organized*, lebih mampu membuat suaranya terdengar dan kebutuhannya terpenuhi.

Profesionalitas pelaku pemberdaya adalah kemampuan pelaku pemberdaya, yaitu aparat pemerintah atau LSM, untuk mendengarkan, memahami, mendampingi dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat. Pelaku pemberdaya juga harus mampu mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Memberdayakan masyarakat berarti melakukan investasi pada masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dan organisasi mereka, sehingga asset dan kemampuan mereka bertambah, baik kapabilitas perorangan maupun kapasitas kelompok. Agar pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara efektif, maka reformasi kenegaraan, *state reform*, harus dilakukan pada tingkat nasional maupun daerah. Berbagai peraturan, ketentuan, mekanisme kelembagaan, nilai-nilai dan perilaku harus disesuaikan untuk memungkinkan masyarakat miskin berinteraksi secara efektif dengan pemerintah. Berbagai ketentuan perlu disiapkan untuk memungkinkan masyarakat miskin dapat memantau kebijakan, keputusan dan tindakan pemerintah dan pihak-pihak lain yang terlibat. Tanpa pemantauan yang efektif dari masyarakat miskin, maka kepentingan mereka dapat terlampaui oleh kepentingan-kepentingan lain. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan menghasilkan wujud yang berbeda jika pembangunan tidak melalui proses yang partisipatif. Pembangunan yang partisipatif menghasilkan tata pemerintahan yang lebih baik, kemakmuran yang lebih adil, pelayanan dasar yang lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak, akses ke pasar dan jasa bisnis yang lebih merata, organisasi masyarakat yang lebih kuat, dan kebebasan memilih yang lebih terbuka.

Salah satu penerapan prinsip partisipasi, sebagai salah satu unsur dalam proses pemberdayaan masyarakat, yang penting adalah dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Dalam *participatory budgeting* ini, sejumlah *stakeholders* mendiskusikan, menganalisis, memprioritaskan dan memantau keputusan tentang anggaran belanja pemerintah. *Stakeholders* ini mencakup masyarakat umum, kelompok miskin, dan kelompok terpinggirkan seperti kaum

perempuan, dan kelompok-kelompok pemangku kepentingan lain seperti dunia usaha, anggota parlemen dan juga lembaga pemberi pinjaman.

Penganggaran yang partisipatif dilakukan dalam tiga tahap penganggaran, yaitu analisa dan formulasi anggaran, penelusuran dan pemantauan pengeluaran anggaran, dan penilaian terhadap hasil kerja pemerintah.

Hasil dari proses perencanaan dan penggunaan anggaran pembangunan secara partisipatif yang diharapkan adalah pelaksanaan pembangunan yang pro-kemiskinan, terwujudnya konsensus sosial, dan meningkatnya dukungan masyarakat dalam proses reformasi yang seringkali menuntut pengorbanan.

Penganggaran yang partisipatif ternyata berakibat positif bagi ekonomi makro dan keuangan negara, seperti ditunjukkan oleh negara Irlandia sejak menerapkan proses penganggaran yang partisipatif. Hasil yang tampak adalah anggaran yang semula defisit berubah menjadi surplus, persentase hutang/pinjaman terhadap PDB menurun, tingkat inflasi berkurang, pertumbuhan ekonomi lebih cepat, investasi asing meningkat dan pengangguran berkurang.

Penganggaran partisipatif di Irlandia didorong oleh kemauan keras pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi resesi ekonomi pada tahun 1980an, dimana inflasi sangat tinggi, hutang pemerintah meningkat, defisit anggaran besar, dan produktivitas sektor industri menurun. Pada tahun 1986 dibentuk Dewan Ekonomi dan Sosial Nasional, yang berfungsi menjadi wadah bagi "mitra sosial" (*social partners*) untuk mengupas berbagai persoalan ekonomi dan mencari jalan keluar bersama. Seluruh elemen pemberdayaan masyarakat ada dalam proses pembangunan ini.

Sampai tahun 2002 sudah ada lima produk kesepakatan yang diputuskan oleh dewan ini. Kalau tiga kesepakatan pertama berfokus pada masalah-masalah ekonomi, dua kesepakatan terakhir cakupannya lebih luas. Kesepakatan yang kelima, (2000-2002) bertema *Program for Prosperity and Fairness*, mencakup tujuan-tujuan sosial disamping tujuan ekonomi. Proses konsultasi antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil berlangsung selama empat bulan untuk menghasilkan kesepakatan tersebut.

Selain keadaan ekonomi makro dan keuangan negara yang membaik di Irlandia sejak menerapkan proses penganggaran yang partisipatif, hasil *intangible* penting adalah terbangunnya modal sosial berupa saling percaya yang tinggi antara pemerintah dan unsur-unsur masyarakat. Masing-masing pihak tidak bisa lari dari tanggungjawab sebab akan harus akuntabel terhadap komitmen yang telah dinyatakan dalam pertemuan sebelumnya. Setiap pihak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan kepentingan, keberatan dan kontribusinya dalam mengatasi persoalan bangsa. Jadi baik pemerintah maupun unsur-unsur masyarakat sama-sama harus bertanggungjawab terhadap kesepakatan yang dibuat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam skala lebih mikro menghasilkan tingkat pelayanan umum yang menjangkau masyarakat lebih banyak, kualitas prasarana/sarana yang lebih murah dan tahan lama, dan pendapatan masyarakat yang lebih baik, dan secara keseluruhan berkurangnya tingkat kemiskinan.

Masyarakat pedesaan terpencil adalah masyarakat yang relatif tertutup, mempunyai keterkaitan dengan alam yang tinggi, melakukan kegiatan produksi

yang bersifat *subsistence*, memperoleh pelayanan sosial yang sangat minim sehingga menghasilkan tingkat kualitas SDM yang relatif sangat rendah. Namun, sebagian masyarakat pedesaan terpencil, khususnya masyarakat adat, mampu menghasilkan produk budaya yang berkualitas tinggi seperti ukiran suku Asmat, tato suku Mentawai, pengelolaan hutan yang harmonis suku Baduy, dan lain-lain.

Tujuan pemberdayaan masyarakat pedesaan terpencil adalah meningkatkan kesejahteraannya sehingga mereka dapat menikmati kualitas hidup sebagaimana yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam wujud fisik, pemberdayaan masyarakat pedesaan terpencil akan memungkinkan mereka untuk: Bermukim secara menetap, melakukan kegiatan ekonomi pasar yang menguntungkan dan berkelanjutan, terlayani oleh fasilitas sosial ekonomi: sekolah, klinik, listrik, air bersih, dan Terhubung dengan angkutan daratatau aut reguler ke pusat desa atau kecamatan.

Strategi pemberdayaan masyarakat pedesaan terpencil dilakukan dengan mewujudkan ke empat elemen pemberdayaan masyarakat: inklusi dan partisipasi, akses pada informasi, kapasitas organisasi lokal, profesionalitas pelaku pemberdaya. Tantangan utama yang dihadapi dalam memberdayakan masyarakat pedesaan terpencil adalah pengetahuan yang terbatas, wilayah yang sulit dijangkau, dan pemahaman adat yang kuat pada masyarakat adat.

Untuk dapat memasukkan mereka dalam proses perubahan, maka upaya yang pertama kali perlu dilakukan adalah memahami pemikiran dan tindakan mereka serta membuat mereka percaya kepada pelaku pemberdaya. Selanjutnya mereka perlu berpartisipasi dalam proses perubahan yang ditawarkan dengan memberikan kesempatan menentukan pilihan secara rasional. Proses ini dapat

memerlukan waktu yang lama, namun hasilnya akan lebih efektif daripada memberikan pilihan yang sudah tertentu. Pengikutan masyarakat dalam proses perubahan dilakukan secara berangsur-angsur dari kelompok kecil menuju masyarakat lebih luas.

Akses pada informasi dibuka dengan memberikan penjelasan mengenai program-program pemerintah yang akan dilakukan, norma-norma bermasyarakat yang perlu diketahui, ilmu pengetahuan dasar, hak-hak yang mereka peroleh, manfaat perubahan yang akan terjadi, masalah-masalah yang mungkin dihadapi, dsb.

Kapasitas organisasi lokal ditumbuhkan dengan melakukan pengorganisasian terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat pada tingkat bawah (seperti kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelompok peladang), dan terhadap tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, aparat desa atau dusun, dan sebagainya. Tujuan pemerkuatan organisasi lokal ini adalah untuk menjadikan mereka mampu merencanakan perbaikan lingkungan mereka, mampu meningkatkan produktivitas, mampu bernegosiasi dengan pihak lain, mampu melakukan kegiatan-kegiatan bersama yang bermanfaat. Teknik-teknik pemetaan wilayah, penyusunan rencana tata ruang, perbaikan sarana permukiman, pembangunan rumah, cara bercocok tanam, cara mengolah hasil kebun, melindungi mata air, dan lain-lain. perlu diajarkan atau dipelajari bersama.

Pelaku pemberdaya perlu mempunyai kemampuan profesional yang tinggi agar dapat melakukan pendampingan secara baik. Pelaku pemberdaya yang potensial adalah organ pemerintah daerah atau organisasi berbasis masyarakat lokal, yang mempunyai perhatian, komitmen, dan kemampuan untuk membangun

masyarakat miskin dan terbelakang. Upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan terpencil, baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal, menuntut pola kerja yang fleksibel, tidak terhambat oleh sistem administrasi penganggaran yang ketat. Agar pelaku pemberdaya masyarakat dapat bekerja secara profesional, maka mereka perlu mendapat pelatihan dan pendidikan yang memadai.

Pemberdayaan masyarakat pedesaan terpencil merupakan salah satu strategi mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Strategi lain yang perlu dilakukan adalah pemberian peluang (*creating opportunity*), pengembangan kapasitas dan modal manusia (*capacity building and human capital development*), dan perlindungan sosial (*social protection*).

Pemberian peluang dilakukan dengan penyediaan prasarana dan sarana umum khususnya transportasi, listik, komunikasi, dan pasar. Pengembangan kapasitas dan modal manusia dilakukan dengan menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan sesuai kondisi lokal. Penyediaan prasarana dan sarana umum serta pelayanan sosial bagi masyarakat pedesaan terpencil, akan menghadapi kendala keterpencilan wilayah, jumlah penduduk yang sedikit, lokasi yang tersebar. Untuk itu berbagai teknik dan bentuk-bentuk prasarana dan sarana serta pola-pola pelayanan khusus perlu diciptakan. Perlindungan sosial dilakukan antara lain dengan membuat peraturan yang menjamin kepastian hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat, atau hak milik masyarakat umum, disertai dengan ketentuan tentang batas-batas tanah yang selanjutnya diakomodasikan dalam peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah. Perlindungan hukum juga diberikan pada produk-produk budaya masyarakat.

6. Pemberdayaan Ekonomi dan Pemanfaatan Sumber Daya

Dalam penelitian ini, terminologi pemberdayaan jika dihubungkan dengan ekonomi, maka menjadi pemberdayaan ekonomi. Dalam terminologi pemberdayaan ekonomi, maka obyek dari pemberdayaannya ada dua, yaitu individu dan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi terkait erat dengan pemanfaatan sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya manusia, dan pemanfaatan sumber daya sosial.⁸⁵

a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan sumber daya alam dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui usaha diversifikasi dan intensifikasi. Diversifikasi merupakan perluasan alternatif pemanfaatan sumber daya alam, sementara intensifikasi merupakan usaha untuk melakukan investasi teknologi yang lebih eksploitatif agar produksi dapat ditingkatkan. Untuk usaha tersebut tidak dapat diingkari bahwa faktor yang sangat menentukan adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, pengetahuan dan teknologi ini akan menjadi sarana penting dalam rangka meningkatkan kemanfaatan dari sumber daya alam. Penerapan ilmu dan teknologi telah dan akan memungkinkan manusia untuk melipatgandakan hasil dan produktivitasnya, meningkatkan kemajuannya untuk memanfaatkan kekayaan alam yang tersedia dan melipatgandakan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Pada dasarnya, teknologi dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu teknologi modern atau maju (*advanced*), teknologi madya (*intermediate*) dan teknologi tradisional. Teknologi mana yang akan diterapkan dalam rangka pendayagunaan sumber daya alam akan sangat ditentukan oleh kondisi masyarakatnya. Oleh sebab itu, dalam penerapannya perlu dikaji hubungan

⁸⁵ Soetomo, *Op.Cit*, h.211-234

fungsional dari teknologi terhadap berbagai aspek masyarakat. Hubungan-hubungan itu dapat diinterpretasikan sebagai tanggapan sosial terhadap perkembangan teknologi tertentu. Di samping itu, dalam penerapan teknologi dengan segala keuntungan yang diharapkan darinya perlu juga dipertimbangkan masalah kualitas lingkungan, sehingga kemerosotannya dapat dicegah. Atas dasar beberapa pertimbangan itulah kemudian dikenal adanya pengertian teknologi tepat guna. Pengertian teknologi tepat guna tersebut dapat dirumuskan melalui dua hal penting, yaitu: Pertama, secara bagaimana teknologi dikembangkan, diarahkan dan dikendalikan untuk menunjang kesejahteraan hidup manusia; kedua, secara bagaimana teknologi itu digunakan dalam penggalian dan pengembangan kekayaan alam yang membawa manfaat bagi manusia secara terus menerus dengan mengamankan lingkungan hidup bagi generasi yang akan datang. Banyak alasan dapat dikemukakan untuk menjelaskan mengapa teknologi tepat guna perlu diterapkan di negara-negara sedang berkembang. Beberapa di antaranya yang cukup penting adalah: Pertama, teknologi tepat guna lebih sederhana dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat yang masih berada dalam tingkat ketrampilan dan kebudayaan teknologi yang rendah; kedua, peralatannya relatif lebih murah dan memberikan kemungkinan skala produksi yang lebih rendah dan lebih tepat untuk pasaran yang masih terbatas; ketiga, teknologi itu bersifat padat karya, sehingga membuka kesempatan kerja yang lebih luas dan dapat mengatasi masalah pengangguran; keempat, teknologi tepat guna tidak bersifat mengacaukan dan menimbulkan ketegangan sosial, sehingga kepincangan sosial dapat ditekan dan dihindari.

b. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan sumber daya manusia dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat pada dasarnya menyangkut dua hal, yaitu: Pertama, peningkatan serta pengembangan kualitas; dan kedua, pemanfaatannya melalui berbagai peluang, aktivitas dan usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Peningkatan dan pengembangan kualitas dimaksudkan untuk menambah potensi dan kemampuan sumber daya manusia tersebut, sehingga lebih mampu berperan sebagai subyek dan obyek pembangunan, dalam hal ini pemberdayaan ekonomi. Tersediannya peluang dalam bentuk berbagai usaha dan aktivitas dimaksudkan untuk mengubah sumber daya potensial menjadi aktual dan produktif.

Cara yang tidak perlu diperdebatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan akan menambah pengetahuan, yang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kemampuan untuk mengantisipasi peluang maupun kemampuan tentang cara dan teknik dalam melaksanakan pekerjaan. Memang harus diakui bahwa peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan ini merupakan investasi yang hasilnya baru dapat dilihat dan dinikmati beberapa tahun kemudian. Di samping itu, pendidikan juga dapat dianggap sebagai investasi sosial yang besar yang akan mengurangi alokasi dana untuk program pembangunan yang lain. Akan tetapi dalam beberapa tahun berikutnya, pemanfaatan tenaga yang ahli dan terampil akan segera dapat mensubstitusi ”pengorbanan” tersebut.

Usaha lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui peningkatan kualitas kesehatan. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa meningkatnya kualitas kesehatan akan dapat mempengaruhi kemampuan kerja dan produktivitas kerja. Peranan tingkat kesehatan terhadap produktivitas ini dapat dijelaskan melalui dua cara, yaitu: Pertama, melalui pengaruh langsung, seperti misalnya pekerja yang sehat akan mempunyai kapabilitas yang tinggi, jangkauan umur yang lebih panjang dan sebagainya; kedua, melalui cara tidak langsung yang dapat berupa kenyataan, bahwa apabila orang tidak sakit maka akan mampu belajar lebih banyak, lebih mungkin meningkatkan keterampilannya yang selanjutnya dapat menghasilkan lebih banyak pula. Sudah barang tentu, derajat kesehatan ini sangat erat kaitannya dengan faktor nutrisi. Hubungan antara status nutrisi seseorang dengan kemampuannya menghasilkan output dapat secara langsung melalui derajat kesehatannya, maupun lewat pengaruh tingkat pendidikan yang dicapainya.

Pengembangan sumber daya manusia dalam pembangunan masyarakat tidak semata-mata berorientasi pada aspek ekonomi dan produktivitas, melainkan juga berorientasi pada aspek manusianya sebagai subyek. Pembangunan kualitas sumber daya manusia tidak identik dengan pembangunan ekonomi plus modernisasi. Lebih dari keduanya, pembangunan kualitas manusia adalah upaya meningkatkan kapasitas mereka untuk mengatur masa depannya. Dari pengertian tersebut maka usaha tersebut harus juga memerhatikan keberadaan atau aktualisasi manusia sebagai subyek, jadi tidak semata-mata merupakan obyek yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu input dalam proses produksi. Berdasarkan pemikiran seperti itu, pengembangan kualitas sumber daya manusia

pada dasarnya adalah upaya untuk mengembangkan inisiatif yang kreatif dari penduduk, sebagai sumber daya pembangunan yang utama dalam rangka mencapai kesejahteraan material dan spiritual.

Dengan demikian, dilihat dari pemanfaatan sumber daya manusia, peningkatan pendidikan bukan tujuan, melainkan sarana untuk lebih memungkinkan sumber daya manusia memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan melalui peningkatan prakarsa dan partisipasinya.

Lebih dari sekedar peningkatan kualitas, pemanfaatan sumber daya manusia juga membutuhkan adanya peluang dan kesempatan untuk berusaha dan beraktivitas guna mengaktualisasikan potensinya. Betapapun tingginya kualitas yang dimiliki tanpa teraktualisasi dalam berbagai bentuk usaha dan aktivitas maka akan tetap tinggal sebagai potensi yang tidak atau belum berpengaruh bagi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan taraf hidup. Oleh sebab itu, proses pemberdayaan ekonomi masyarakat harus mampu untuk membuka lebih banyak peluang dan kesempatan guna berusaha dan beraktivitas. Dengan demikian, akan dapat mengurangi adanya *unemployment*, baik dalam bentuk pengangguran penuh, pengangguran tersembunyi, setengah pengangguran maupun pengangguran musiman. Hal itu disebabkan karena sebetulnya bentuk-bentuk pengangguran tersebut akan mengakibatkan adanya tidak kurang optimalnya sumber daya manusia yang ada dalam mengaktualisasikan potensinya. Penciptaan dan pengembangan kesempatan dan peluang itu dapat dilakukan melalui program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun melalui inisiatif dan kreativitas masyarakat sendiri.

c. Pemanfaatan Sumber Daya Sosial

Dibandingkan dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia, sumber daya sosial memang tidak tampil secara konkret. Walaupun demikian, apabila mampu mengidentifikasi dan memanfaatkannya secara tepat, maka peranannya bagi keberhasilan pembangunan tidak kalah dengan dua sumber daya yang lain. Terlebih jika dilihat bahwa kekuatan utama dari proses pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah dari dalam masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat seharusnya memang merupakan suatu pengerahan internal dan pembentukan kembali sumber-sumber kebudayaan yang ada dan bukan penyuntikan unsur-unsur asing yang telah baku.

Unsur-unsur sosial budaya yang mempunyai dasar yang luas, yang dijunjung tinggi dan sudah bertahan bertahun-tahun lamanya harusnya digunakan sebagai sarana dalam proses pembangunan. Dalam rangka pendayagunaan sumber-sumber sosial budaya tersebut, perlu dilakukan identifikasi dan seleksi unsur-unsur mana yang memang potensial. Sudah barang tentu pemanfaatannya harus ditempatkan dalam kerangka struktur fungsional dari proses pembangunan tersebut. Dengan demikian, seringkali memang diperlukan adanya penyesuaian dengan sedikit perubahan fungsi yang diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan. Dari mekanisme semacam ini, maka unsur-unsur sosial budaya yang ada dapat dilihat sebagai dasar bagi perubahan dan bukannya sebagai penghalang perubahan.

Dalam rangka pendayagunaannya untuk proses pembangunan, sumber daya sosial budaya sebagai unsur yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat perlu dikembangkan, dan dalam beberapa hal ditransformasikan sesuai kebutuhan

pembangunan. Sebagai contoh adalah sistem Banjar, yaitu suatu organisasi tradisional masyarakat Bali yang merupakan suatu sarana pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan gizi. Juga tentang gotong royong. Unsur utama dalam gotong royong adalah resiprositas sebagai prinsip moralitas untuk memperkuat *common conscience* atau *collective conscience*. Pada masa lalu, kehidupan masyarakat desa senantiasa digambarkan sebagai masyarakat yang homogen dalam mentalitas dan moralitasnya, mempunyai totalitas kepercayaan dan sentimen yang sama, belum dikenal diferensiasi fungsi atau pembagian pekerjaan secara rinci. Walaupun belum cukup tajam, kehidupan masyarakat desa saat ini telah mulai mengenal berbagai variasi dan deferensiasi. Namun demikian, gotong royong tetap ada.. .

7. Pemberdayaan untuk Memajukan Ekonomi Rakyat

Pemberdayaan yang dilakukan untuk memajukan ekonomi rakyat tidak bisa sekali jadi. Ekonomi rakyat berarti dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Rakyat sebagai pelaku pembangunan. Ini merupakan proses panjang yang memerlukan kesungguhan hati dan keseriusan. Terlebih dengan wilayah Indonesia yang luas dengan kondisi yang berbeda-beda antar daerah satu dengan daerah lainnya. Pemerintah dalam pembangunan berfungsi dalam alokasi, distribusi dan stabilisasi. Maksud alokasi pembangunan adalah menciptakan proses pembangunan, distribusi adalah pemeratakan hasil pembangunan, dan stabilisasi adalah melanjutkan pembangunan. Pelaku utamanya adalah rakyat. Pemerintah adalah wakil rakyat dalam pembangunan dan harus mengembalikannya kepada mekanisme pasar.⁸⁶

⁸⁶ Prof. Gunawan Sumodiningrat, Ph.D dan Ari Wulandari, S.S., M.A, *Op.Cit* , h. 179.

Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi dan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, yang tidak hanya menguntungkan golongan kaya. Kebijakan pemerintah harus untuk kesejahteraan rakyat dan berpihak kepada masyarakat miskin. Pemerintah harus memprioritaskan pembangunan untuk masyarakat miskin. Kesejahteraan masyarakat memang tidak bisa hanya diikhtiarkan oleh pemerintah sendiri, melainkan perlu dukungan dunia usaha, masyarakat, dan pihak luar negeri. Kemampuan pemerintah sangat terbatas dan tidak akan mampu menyelesaikan masalah kesejahteraan masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Mengembalikan kepada mekanisme alam, mengembalikan kepada mekanisme rakyat, mengembalikan kepada mekanisme pasar. Pelaksanaannya pada pasar terkendali, yaitu pasar yang dikendalikan dengan kebijakan pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat.

Salah satu cara tercepat memajukan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah dengan mendorong pertumbuhan UMKM secara merata di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan dunia industri berskala besar, termasuk BUMN, hendaknya mendorong pertumbuhan UMKM. Program pendampingan dan pemberdayaan yang membuka akses dan pemberdayaan masyarakat harus diperbanyak dan diperluas.

Demi meningkatkan pertumbuhan iklim usaha, pemerintah harus mendukung dengan regulasi yang sesuai. Pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung proses transformasi masyarakat menjadi lebih maju.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengupayakan anggaran belanja untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara massif, sehingga mendorong mobilisasi tenaga kerja pertanian ke agro industri. Termasuk regulasi yang mendorong ke arah agropolitan atau pengembangan desa dengan agrobisnis sebagai aktivitas utama.

8. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa

Secara historis, desa adalah daerah otonomi yang paling tua. Kewenangan dan kewajiban desa untuk menjalankan hak otonominya itu sangat banyak. Kecuali beberapa pembatasan yang ditetapkan dalam peraturan kekuasaan pusat dan daerah, maka desa memegang hak otonomi penuh. Di sisi lain, di Indonesia, masyarakat desa umumnya adalah masyarakat yang belum berdaya secara ekonomi; masih belum sejahtera. Karenanya pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia harus dari desa. Desa-desa di Indonesia harus menjadi desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera.⁸⁷

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dari memberikan banyak keuntungan dan dampak positif, di antaranya: Pertama, masyarakat desa menjadi lebih mandiri. Perekonomian masyarakat adalah perekonomian yang dilakukan langsung oleh rakyat. Perekonomian ini diselenggarakan oleh rakyat dan bersumber dari potensi serta kekuatan masyarakat dalam menjalankan perekonomian mereka sendiri. Dengan demikian, berarti masyarakat bisa lebih mandiri dalam menentukan arah perekonomiannya sendiri. Mereka yang menentukan apa potensi yang bisa diangkat dan bagaimana untuk menjalankan

⁸⁷ Dr, Didik G Suharto, M.Si, *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Tahun 2016, Cet. Ke-1, h. 112.

potensi tersebut. Dengan cara ini pula membuat masyarakat desa lebih mandiri dalam menjalankan ekonominya sendiri.

Kedua, menjadikan perekonomian di desa menjadi besar dan modern. Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa bertujuan untuk menjadikan ekonomi yang besar, modern, kuat dan memiliki daya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Perekonomian masyarakat di desa yang dulunya berjalan dengan cara tradisional telah didorong untuk berubah menjadi perekonomian yang modern. Saat ini perkembangan teknologi semakin maju sehingga mampu membuat dan memaksa siapa pun untuk ikut arus perubahan zaman. Jika perekonomian masih mengandalkan cara lama (tradisional) maka bersiaplah untuk tergerus dengan zaman dan tidak bisa ikut berkembang.

Ketiga, adanya perubahan struktural di dalam ekonomi masyarakat desa. Perubahan struktural ekonomi yang dimaksud adalah perubahan ekonomi dari sistem tradisional ke sistem ekonomi modern. Dari ekonomi yang bersifat lemah menuju ke ekonomi bersifat kuat dan dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar serta dari ekonomi yang ketergantungan ke ekonomi yang mandiri. Ada beberapa langkah-langkah perubahan struktural yang harus dilalui agar perubahan struktural ini bisa terjadi. diantaranya: Penguatan kelembagaan. Perlu adanya kelembagaan yang kuat dalam mengatur dan menjalankan sistem ekonomi masyarakat. Lembaga ini akan tegas membantu proses perubahan struktural agar terjadi dengan kondusif; penguasaan teknologi. Untuk bisa menjalankan ekonomi sistem modern tentunya dibutuhkan keterampilan dalam teknologi. Oleh karena itu masyarakat mau tidak mau harus mencoba dan belajar untuk menguasai teknologi yang ada. Dengan begitu masyarakat akan lebih banyak belajar tentang berbagai

hal tidak hanya ekonomi saja; dan pemberdayaan sumber daya manusia. Dibutuhkan pemberdayaan sumberdaya manusia yang tepat agar perekonomian masyarakat bisa berjalan dengan baik.

Keempat, terbentuknya dan terjalinnya kemitraan yang baik. Melakukan pemberdayaan ekonomi tidak hanya cukup dengan peningkatan produktifitas, memberikan kesempatan yang sama untuk berusaha atau memberikan suntikan modal semata. Namun harus ada kerjasama atau kemitraan yang baik antara yang telah maju dengan yang masih lemah atau yang belum berkembang. Dengan cara ini antara satu sama lain bisa menguatkan dan memberikan stimulan bagaimana cara menjalankan perekonomian agar kuat dan berkembang. Sehingga antara satu dan lainnya bisa menjaga agar semuanya maju.

Kelima, munculnya wirausaha baru di masyarakat desa. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat tentunya semakin mendorong munculnya wirausaha baru. Karena kemudahan yang diberikan dari pemanfaatan modal, sumberdaya manusia dan teknologi yang ada. Antara usaha yang telah maju dan yang masih lemah saling tolong menolong untuk angkat dan berkembang.

Keenam, terjadinya penguatan di IKM dan UKM masyarakat desa. Perekonomian masyarakat tidak bisa terlepas dari industri kecil menengah (IKM) yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tersebut. Dengan adanya perekonomian masyarakat mampu membantu menguatkan perekonomian industri kecil agar gulung tikar. Karena seperti yang kita tahu bahwa industri kecil sangat lemah jika tidak ada bantuan atau pun pembinaan dari industri yang sudah mapan.

9. Konsepsi dan Implementasi Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.⁸⁸

Adapun model-model pemberdayaan ekonomi yang selama ini diimplementasikan di Indonesia adalah sebagai berikut:⁸⁹ Pertama, model Program Padat Karya Agrabisnis (PPKA). Model bantuan ini lebih bersifat konsumtif bagi tenaga kerja buruh, namun sekaligus juga untuk mendorong munculnya wirausaha-wirausaha kecil di pedesaan. Model ini sifatnya kemitraan antara tenaga buruh di pedesaan dan pedagang/pengusaha agribisnis kecil di pedesaan. Tenaga buruh mendapat kesempatan untuk bekerja dengan upah harian yang memadai dengan menggarap lahan-lahan tidur atau lahan-lahan yang tidak tergarap, sedangkan pedagang/pengusaha mendapat bahan dagangan dari usaha tersebut.

Kedua, model Pembinaan Kelompok Usaha Produktif. Salah satu kendala serius dalam upaya mengentaskan petani dan nelayan miskin adalah karena tingginya perilaku konsumtif. Perubahan perilaku ke arah lebih produktif memerlukan ketekunan dan upaya-upaya kontinu.

Ketiga, model SPAKU-Ponpes. Model ini merupakan model Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditi Unggulan (SPAKU) untuk tanaman yang melibatkan pondok pesantren sebagai *agent of change*. Para petani berkelompok

⁸⁸ Daniel Sukalele, loc.cit.

⁸⁹ Syamsulbahri, "Tantangan dan Peluang Pengembangan Masyarakat dalam Era Otonomi Daerah" dalam Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini, A. Halim (Ed.), *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, Tahun 2005, Cet. Ke-1, hal.81-83.

membentuk KUBA (Kelompok Usaha Bersama Agribisnis) sehingga usaha tani yang dilakukannya mencapai skala ekonomi.

Keempat, model Kelompok Perguliran Bantuan Ternak. Beberapa macam model perguliran bantuan dan sistem bagi hasil ternak telah dikenal di wilayah pedesaan, terutama yang menyangkut ternak sapi potong atau sapi *kereman*. Penyimpangan biasanya terjadi karena lemahnya pengawasan dan pemantauan serta bimbingan kepada pemelihara ternak. Pemberian bantuan bibit sapi potong diberikan kepada kelompok peternak yang dibentuk oleh para anggotanya sendiri dan dipimpin oleh seorang di antara mereka. Perguliran bibit ternak dapat diatur di antara anggota kelompok atau antar individu kepada rumah tangga yang paling miskin yang diperkirakan akan menghadapi risiko terlalu besar kalau diberi bantuan bibit sapi.

Kelima, model Koperasi Agroindustri (Kopagi). Koperasi ini membina para anggotanya untuk membentuk kelompok usaha bersama agroindustri (terutama pengelolaan hasil-hasil pertanian) dengan memanfaatkan kredit murah bagi para anggota koperasi (KKPA). Dalam pembinaan manajemen dan inovasi teknologi, Kopagi menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga atau instansi terkait seperti BLKI, Litbang, perguruan tinggi, dinas atau instansi teknis untuk melaksanakan diklat bagi anggota. Dalam hal pemasaran, dilakukan kerja sama dengan pusat pertokoan seperti waserda, supermarket, dan kios. Aktivitas-aktivitas ekonomis tersebut dapat disinergikan dalam bentuk Kawasan Industri (komoditi unggulan wilayah) milik masyarakat.

Keenam, model Lembaga Keuangan Mikro bagi Orang Miskin. Lembaga keuangan ini menyediakan kredit khusus untuk orang miskin yang telah memiliki

usaha di sektor nonproduksi pertanian, bertujuan mendorong usaha berdasarkan bidangnya tanpa banyak ikut mencampuri usaha yang dilakukan. Lembaga keuangan ini memberikan pelayanan kredit yang mudah, walaupun tidak terlalu murah, dengan arah penggunaan yang dikehendaki oleh nasabah. Hipotesis model ini adalah pada prinsipnya, yaitu: orang miskin itu biasanya jujur; dengan pelayanan yang mudah, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nasabah, mereka akan bersedia mengembalikan kredit; dan pelayanan kredit orang miskin membutuhkan biaya per unit yang cukup tinggi.

Ketujuh, model Bantuan Hibah Bersaing. Model bantuan hibah ini lebih bersifat konsumtif atau untuk investasi sumber daya manusia yang dampaknya berjangka panjang (pendidikan atau kesehatan). Pemberian bantuan hibah harus benar-benar bersaing, artinya harus sampai kepada kelompok orang paling miskin yang ada di desa dan benar-benar paling memerlukan. Pemilihan kelompok sasaran dilakukan dengan pendekatan partisipasi, melibatkan Karang Taruna atau kelompok Desa Wisma setempat.

10. Problematika dan Pencapaian Hasil Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan di Indonesia

Ada beberapa problematika yang dihadapi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, yaitu:⁹⁰

Pertama, masih kurang berkembangnya kehidupan masyarakat pedesaan karena terbatasnya akses masyarakat pedesaan, terutama kaum perempuan, ke sumber daya produktif, seperti lahan, permodalan, infrastruktur, dan teknologi

⁹⁰ Bappenas.go.id, *Pembangunan Perdesaan*, t.t.,

serta akses terhadap pelayanan publik dan pasar; kedua, masih terbatasnya pelayanan prasarana dan sarana permukiman perdesaan, seperti air minum, sanitasi, persampahan, dan prasarana lingkungan lain; ketiga, masih terbatasnya kapasitas kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal dan kelembagaan sosial ekonomi untuk mendukung peningkatan sumber daya pembangunan perdesaan; dan keempat, masih kurangnya keterkaitan antara kegiatan ekonomi perkotaan dan perdesaan yang mengakibatkan makin meningkatnya kesenjangan ekonomi dan kesenjangan pelayanan infrastruktur antar wilayah.

Dalam lingkup sektor pertanian sendiri, masih terbatas upaya-upaya untuk beralih ke komoditas bernilai ekonomi tinggi, serta belum dioptimalkannya pertanian lahan kering yang relatif lebih kecil kebutuhan investasi prasarana pendukungnya. Dalam lingkup yang lebih besar, belum mantapnya alih peran dan tanggung jawab dalam sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan perdesaan seiring dengan desentralisasi mengakibatkan pembangunan prasarana perdesaan kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Di sisi lain, terjadinya bencana alam yang bertubi-tubi, seperti halnya di NAD dan Nias, memiliki kontribusi yang tidak kecil dalam memperburuk kapasitas infrastruktur perdesaan yang telah dibangun di banyak wilayah di Indonesia.

Penciptaan lapangan pekerjaan nonpertanian di perdesaan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan. Untuk itu, langkah-langkah kebijakan yang ditempuh meliputi: Pertama, meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan serta pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat perdesaan dalam pengelolaan

pembangunan; kedua, memperkuat keterkaitan kawasan perdesaan dengan perkotaan serta keterkaitan antarsektor pertanian dengan sektor industri dan jasa berbasis sumber daya lokal; ketiga, memperbaiki tingkat pelayanan prasarana permukiman dan ekonomi perdesaan; keempat, meningkatkan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal dalam mengelola pembangunan perdesaan secara partisipatif; kelima, mengembangkan dan memantapkan kelembagaan sosial ekonomi dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan akses masyarakat perdesaan ke modal usaha. Jika memperhatikan karakteristik umum permasalahan kesejahteraan rakyat dan kualitas hidup masyarakat desa, langkah-langkah tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah mencapai hasil-hasil sebagai berikut: Pertama, penyusunan pedoman untuk memberdayakan kapasitas masyarakat dan termasuk dalam hal pengarusutamaan gender; kedua, penyusunan pedoman yang diperlukan untuk memperkuat kapasitas pemerintahan di tingkat lokal, di antaranya mengenai pengelolaan pembangunan secara partisipatif, pengelolaan anggaran, serta penyusunan produk hukum wilayah perdesaan; ketiga, pembimbingan teknis Pengembangan Badan Usaha Milik Desa; keempat, pembimbingan teknis Tata Cara Penegasan dan Penetapan Batas Desa; kelima, pembimbingan teknis Penataan Administrasi Pemerintahan Desa; keenam, pembimbingan teknis Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Desa; ketujuh, pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas pemerintah dan keberdayaan masyarakat desa, di antaranya mengenai Manajemen Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa dan Perencanaan Pembangunan Partisipatif, terutama bagi kaum perempuan; kedelapan, pelatihan pendayagunaan

Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi instruktur TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD); kesembilan, pelatihan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi instruktur Latihan Integrasi Taruna Wreda (Latsitarda) Nusantara Tahun 2004; kesepuluh, pelatihan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi bagi aparatur Pemerintah Daerah; kesebelas, pengevaluasian PP Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Desa; Kedua belas, tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desa (pengganti PP Nomor 76 Tahun 2001); ketiga belas, tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kelurahan (pengganti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999); keempat belas, tersusunnya Rancangan Peraturan Presiden tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (pengganti Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan; kelima belas, tersusunnya Rancangan Pedoman Umum Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pendayagunaan Tata Ruang Kawasan Perdesaan; keenam belas, pemfungsian belasan ribu unit Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan masyarakat; ketujuh belas, pembangunan prasarana sosial berupa Balai/Kantor Desa (66 unit); kedelapan belas, pelaksanaan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau Kelurahan; kesembilasn belas, pelaksanaan pemberian tanah (redistribusi) kepada para petani; dan kedua puluh, pengembangan desa-desa percontohan di wilayah pesisir agar masyarakat desa dapat mendayagunakan sumber daya pesisir secara lestari dalam suatu rencana wilayah desa yang terpadu.

Selanjutnya, dalam rangka pengembangan ekonomi lokal serta penguatan keterkaitan perdesaan dengan perkotaan, pemerintah Indonesia telah mencapai

hasil-hasil sebagai berikut: Pertama, penyusunan Dokumentasi Data Peraturan Perundangundangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan; kedua, tersusunnya Pedoman Umum Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan; ketiga, tersusunnya Pedoman Umum Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna bagi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil; keempat, penyusunan kajian Strategi Pengembangan Ekonomi Rakyat pada Kawasan Pengelolaan Sumber Daya Alam Strategis; kelima, pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat; keenam, pembangunan prasarana perekonomian, yakni jalan desa, jembatan desa, sarana air bersih, sanitasi), irigasi desa, pasar desa, listrik desa, dermaga desa tempat pelelangan ikan, saluran air; ketujuh, pengembangan puluhan ribu unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sebagai lembaga keuangan mikro perdesaan yang melayani keperluan modal usaha bagi masyarakat perdesaan; kedelapan, pemfungsian ribuan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantekdes) dalam menyediakan layanan informasi dan perangkat teknologi tepat guna untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat perdesaan; kesembilan, pelaksanaan Persiapan Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) Bidang Infrastruktur Perdesaan terutama untuk desa-desa tertinggal; dan kesepuluh, pengembangan prasarana dan sarana agropolitan di puluhan kawasan.

Di samping itu, secara simultan juga dicapai hasil-hasil melalui kegiatan-kegiatan pokok peningkatan infrastruktur perdesaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia di perdesaan; serta perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

Sejauh ini dapat diamati bahwa telah dilakukan upaya intensif dalam meningkatkan pembangunan perdesaan secara partisipatif, terutama dengan

memperkuat kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa. Hal itu, antara lain, ditandai dengan telah tersusunnya Rancangan Peraturan Presiden tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desa (pengganti PP No.76 Tahun 2001). Pencapaian lain yang layak digarisbawahi adalah peningkatan kemampuan berusaha dan pematapan kelembagaan dalam pengembangan ekonomi lokal, antara lain dengan telah dikembangkannya unit-unit Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) sebagai lembaga keuangan mikro perdesaan, dalam rangka meningkatkan akses masyarakat perdesaan ke modal usaha. Di samping itu, komitmen untuk terus meningkatkan keterkaitan perdesaan-perkotaan juga dilaksanakan melalui pengembangan prasarana-sarana di kawasan-kawasan agropolitan.

Mencermati dinamika perkembangan pembangunan perdesaan sampai sejauh ini, baik berbagai pencapaian maupun permasalahannya, kebijakan pembangunan perdesaan diarahkan pada: Pertama, penggalakan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya untuk meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri pengolahan berbasis sumber daya lokal; kedua, perluasan akses masyarakat, terutama kaum perempuan, ke sumber daya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi; ketiga, peningkatan prasarana dan sarana perdesaan serta akses masyarakat ke pelayanan publik; keempat, peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan untuk dapat menangkap peluang pengembangan ekonomi serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerja sama untuk memperkuat posisi

tawar; kelima, perbaikan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meminimalkan risiko kerentanan, baik dengan mengembangkan kelembagaan perlindungan masyarakat petani maupun dengan memperbaiki struktur pasar yang tidak sehat (monopsoni dan oligopsoni); keenam, pengembangan praktik-praktik budi daya pertanian dan usaha nonpertanian yang mempertahankan daya dukung lingkungan, baik di wilayah daratan maupun di wilayah pesisir; dan ketujuh, pengembangan kapasitas pemerintahan dalam pembangunan perdesaan di tingkat lokal.

Dengan arah kebijakan tersebut, dalam rangka peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, upaya tindak lanjut yang diperlukan meliputi: Pertama, penumbuhan lembaga pelayanan penyuluhan dan peningkatan penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat perdesaan; kedua, fasilitasi penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat di perdesaan berdasarkan identifikasi praktik terbaik (*best practices*) dan pembelajaran dari program-program pemberdayaan masyarakat; ketiga, pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan perdesaan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; keempat, peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaan; kelima, koordinasi pengembangan kelembagaan untuk difusi teknologi tepat guna dan ramah lingkungan ke kawasan perdesaan; dan keenam, peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan peran pemilik kepentingan (*stakeholders*) dalam pembangunan kawasan perdesaan.

Sementara itu, untuk mengembangkan ekonomi lokal, terutama di daerah perdesaan, langkah tindak lanjut yang diperlukan meliputi: Pertama, peningkatan

koordinasi lintas sektor untuk memantapkan kawasan agropolitan yang sudah ada dan mempromosikan pendekatan agropolitan ke lokasi baru terutama kawasan-kawasan potensial di luar pulau Jawa-Bali; kedua, peningkatan pengembangan usaha agribisnis yang meliputi mata rantai subsektor hulu (pasokan masukan), *on farm* (budi daya), hilir (pengolahan), dan jasa penunjang; ketiga, peningkatan infrastruktur sosial dan ekonomi perdesaan melalui pendekatan pembangunan berbasis masyarakat lokal (*community based development*); keempat, pengembangan budaya usaha dan kewirausahaan terutama bagi angkatan kerja muda perdesaan; kelima, pengembangan jaringan kerja sama usaha dan kemitraan antara pelaku usaha besar dan usaha mikro/rumah tangga; keenam, peningkatan peran perempuan dalam kegiatan usaha ekonomi produktif di perdesaan; ketujuh, peningkatan pelayanan lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan mikro (LKM), kepada pelaku usaha di perdesaan, antara lain, melalui fasilitasi informasi tentang pelaku usaha potensial di perdesaan, perlindungan status badan hukum LKM, kemudahan perizinan dan pembentukan sistem jaringan antar-LKM serta antara LKM dan bank; dan kedelapan, fasilitasi pengembangan akses masyarakat dalam pemasaran produk hasil usaha pada skala lokal dan regional.

Upaya peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dan pengembangan ekonomi lokal di perdesaan perlu didukung pula oleh berbagai upaya tindak lanjut yang diperlukan dalam meningkatkan infrastruktur perdesaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perdesaan dan melindungi serta serta melakukan konservasi sumber daya alam.

D. Pemberdayaan Ekonomi Muhammadiyah

1. Sejarah dan Perkembangan Gerakan Ekonomi Muhammadiyah

Kiprah Muhammadiyah dalam rentang waktu yang demikian panjang dari sejak pertama didirikan dan digerakkan, hingga usianya seratus tahun, telah banyak mewarnai sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Namun kiprah Muhammadiyah di Indonesia dalam ranah aktivitas ekonomi ternyata belum berjalan optimal, bahkan dinilai terdegradasi. Muhammadiyah hanya sebagai gerakan sosial dan dakwah, bukan gerakan ekonomi yang digerakkan oleh para saudagar Muhammadiyah. Padahal sejarah mencatat, KH Ahmad Dahlan adalah seorang pengusaha batik dan kerap berdagang di berbagai kota di Jawa. Dalam perjalanan dagangnya, KH Ahmad Dahlan selalu singgah, silaturahmi, kepada alim ulama setempat, membicarakan perihal agama Islam dan masyarakatnya. Perjalanan demikian, selain berdagang, juga dimaksudkan mempelajari sebab-musabab kemunduran kaum Muslimin. Selain itu, fakta sejarah juga membuktikan bahwa banyak warga Muhammadiyah berprofesi sebagai pedagang. Warga Muhammadiyah di Sumatera Barat, Solo, Yogyakarta, Pekalongan, Pekajangan Tasikmalaya, Garut, dan lain-lain adalah aktivis Muhammadiyah sekaligus aktivis bisnis di daerahnya.⁹¹

Implikasi dari profesi ganda seperti itu menjadikan Muhammadiyah cukup disegani. Banyak kegiatan organisasi Muhammadiyah didanai secara swadaya, tanpa terlalu tergantung pendanaan dari rezim yang berkuasa. Bisa jadi kuatnya kultur dan mental pebisnis warga Muhammadiyah menjadikan Muhammadiyah cukup mandiri dalam mengelola organisasinya. Kuatnya jiwa entrepreneurship

⁹¹ Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, *Peta Potensi Ekonomi Muhammadiyah: Buku Profil dan Direktori Edisi Saudagar, Universitas, Rumah Sakit, BTM/BMT, Panti Asuhan*, Tahun 2012, hal.67.

(wiraswasta) menciptakan kultur aktivisme warga yang mandiri, disegani dan diperhitungkan oleh kawan dan lawannya. Tidak heran jika Direktur Eksekutif Centre of Strategic and International Studies (CSIS) Phillip J Vermonte menganggap, di Indonesia, organisasi Muhammadiyah adalah satu-satunya yang bisa mengurus dirinya sendiri. Pernyataannya ini dia sampaikan ketika dia menjadi narasumber pada Sesi VI Pengkajian Ramadhan PP Muhammadiyah di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB AD), Senin (13/5/ 2019).⁹²

Namun, kekuatan kultur bisnis mulai cair dan redup ketika roda perpolitikan memasuki zaman Orde Baru. Banyak warga Muhammadiyah diserap dalam mekanisasi rezim birokrasi yang ditandai mayoritasnya warga Muhammadiyah yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Boleh jadi lumpuhnya kemandirian disebabkan oleh perilaku rezim birokrasi, yang berkonsekuensi melemahnya proses kaderisasi dan jiwa kewiraswataan di kalangan warga persyarikatan. Dampaknya adalah ide-ide dan karya-karya besar warga Muhammadiyah pada perkembangan berikutnya menjadi berkurang sehingga terperangkap pada aktivisme rutinitas organisatoris dan pengelolaan amal usaha yang bersifat duplikasi tanpa diiringi pemahaman terhadap roh dan substansi orientasi arah pendirian amal usaha. Refleksi menjadi berkurang, dan banyak warga Muhammadiyah asyik dan bangga dengan banyaknya penjumlahan amal usaha. Dalam membangun etos bisnis dalam persyarikatan Muhammadiyah, dua sasaran yang perlu dijadikan pertimbangan, yakni sasaran kelembagaan dan sasaran individual warga Muhammadiyah.⁹³

⁹² <https://telusur.co.id/2019/05/csis-muhammadiyah-satu-satunya-organisasi-yang-mampu-ngurus-diri-sendiri/> diakses pada tanggal 14 Mei 2019.

⁹³ Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, op.cit, hal.68.

Walau demikian, melalui Majelis Ekonomi, Muhammadiyah telah banyak melakukan pemberdayaan ekonomi, yaitu mendirikan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Syariah, menguasai saham dari BPR, mendirikan pusat informasi bisnis, dan lain-lain.⁹⁴

2. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Muhammadiyah

Karenanya, Muhammadiyah memandang perlu adanya lembaga yang khusus menangani persoalan ekonomi dan kewirausahaan agar gerakan ekonomi Muhammadiyah dapat bangkit kembali dan berjalan secara efektif. Maka, pada Mukhtar Muhammadiyah ke-45 di Malang, Jawa Timur pada bulan Juli 2005, Majelis Ekonomi diubah namanya menjadi Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK). Karenanya, MEK sangat penting untuk dioptimalisasi peranannya dari pusat hingga ranting. Lemahnya pengembangan jiwa kewirausahaan di Muhammadiyah, bisa jadi karena lemahnya pula kelembagaan MEK secara struktural. Implikasinya, sasaran pengembangan individual dalam membangun etos kewirausahaan juga mengendur.⁹⁵

Untuk memperkuat kerja MEK, maka kepengurusan MEK PP Muhammadiyah Periode 2015-2020 mengukuhkan keberadaan Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM). Sebelumnya, pada periode kepengurusan MEK PP Muhammadiyah 2005-2010 telah dikukuhkan Induk BTM (Baitut Tamwil wal Maal).

⁹⁴ Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, Tahun 2010, Cet. Ke-1, hal.296-297.

⁹⁵ . Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, *loc.cit.*

DAFTAR PUSAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Mu`jam Mufahras Li Aljaz al-Qur`an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, Tahun 2000
- Al-Fayumi, Ahmad, *al-Mishbâh al-Munîr*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Al-Misri, Muhammad Mukarram Ibnu Manzur al-Afriki al-Misri, *Lisân al-`Arâb*, Beirut: Dar al-Sadir, tt., Cet. Ke-1, Juz 14
- AR, HM Sukriyanto, *Ensiklopedi Dakwah*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Ar-Rahmah, Tahun 2010, Cet. Ke-1
- Angapraja, Drs, Ismail Satriyanto, M,Si, *Saudagar Muhammadiyah: Bersinergi Meraih Berkah*, Jawa Barat: Jaringan Saudagar Muhammadiyah Jawa Barat-Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Tahun 2017, Cet. Ke-1
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktis)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, Cet. Ke-6
- Aripudin, Acep, *Sosiologi Dakwah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Tahun 2013, Cet. Ke-1
- Arnold, Thomas W., *The Preaching of Islam*, London Constable & Company Ltd., Second Editon Revised and Enlarged, 1913
- _____, *Sejarah Da`wah Islam*, Jakarta: Widjaya, Tahun 1981, Cet. Ke-1
- Asmani, Jamal Ma`mur, *Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional: Panduan Quality Control bagi Para Pelaku Lembaga Pendidikan*, Jogjakarta: Diva Press, Tahun 2009, Cet. Ke-1
- Athoillah, Dr, H, M. Anton, M.M., *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Pustaka Setia, Tahun 2010, Cet. Ke-1.
- Baidhawiy, Zakiyuddin, *„Satu Abad Muhammadiyah: Pergeseran Paradigma Dakwah*, Majalah Basis, Edisi Januari 2011
- Bandur, Agustinus, *Penelitian Kualitatif: Studi Multi-Disiplin Keilmuan dengan NVivo 12 Plus*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019, Edisi Pertama
- Bappenas.go.id, *Pembangunan Desa*
- Basit, Abdul,. M.Ag, *Wacana Dakwah Kontemporer*, Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, Tahun 2006, Cet. Ke-1.

- Baso, Ahmad, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma` Ulama Indonesia*, Tangerang Selatan: Pustaka Afid, Tahun 2001, Cet. Ke-2
- Burhani, Ahmad Najib, *Makna Teologi al-Ma'un di Dua Generasi Muhammadiyah*, Suara Muhammadiyah, 13/98, 22 Syakban - 7 Ramadhan 1434 H or 1 -15 Juli 2013
- Connolly, Peter (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Yogyakarta: IRCiSoD (Bekerjasama dengan LKiS), Tahun 2002, Cet. Ke-1.
- Faris, Abu Husain Ahmad Ibn, *Mu'jam Maqayis fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt,
- Hambali, Hamdan, *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2006, Cet Ke-1
- Hasibuan, H.Malayu S.P., 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara, Tahun 2005, Cet. Ke-1
- HB, Siswanto, *Pengantar manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara, Tahun 2007, Cet. Ke-1
- Hidayat, Syamsul, "*Tafsir Kebudayaan Muhammadiyah*" Jurnal Kebudayaan Akademika, Vol 1, No. 1, April 2003
- Horkheimer. Max, *Teori Kritis*, Tahun 1982.
- Jaelani, Bisri M., *Ensiklopedi Islam*, Yogyakarta: Panji Pustaka, Tahun 2007, Cet. Ke-1
- Jurdi, Syarifuddin, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Tahun 2010, Cet. Ke-1
- Latief, Hilman, "Ekspansi Spiritualisme dan Gerakan Sosial Muhammadiyah: dari Regionalisme ke Transnasionalisme", dalam Alpha Amirrachman Dkk. (Ed.), *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia: Refleksi dan Agenda Muhammadiyah ke Depan*, Bandung: Mizan, Tahun 2015, Cet.Ke-1
- Mahmud, Ali Abdul Halim, *Dakwah Fardiyah: Metode Membentuk Pribadi Muslim*, Jakarta:Gema Insani, Tahun 2004, Cet. Ke-2.
- Mahmudin, *Manajemen Dakwah Rasulullah*, Jakarta: Restu Ilahi, Tahun 2004, Cet. Ke-1
- Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, Tahun 2010, Cet. Ke-1
- Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, *Peta Potensi Ekonomi Muhammadiyah: Buku Profil dan Direktori Edisi Saudagar*, Universitas, Rumah Sakit, BTM/BMT, Panti Asuhan, Tahun 2012

- Malakah, Mushtafa, *Fi Ushul al-Da'wah Muqatabasat min kutub al-Duktur Yusuf Qardhawi* (Kairo: Dar al-Taqwa, Tahun 1997)
- Manzhur, Ibn, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Tahun 1999, Jilid II.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, Tahun 2005
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Tahun 1990
- Muhammadiyah, *Dakwah Kultural Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004, Cet. Ke-1
- Mulyadi, Seto, A,M, Basuki, Heru, Prabowo, Hendro, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Perpektif yang Terbaru untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Kemanusiaan dan Budaya*, Depok: Rajawali Pers, 2019, Cet. Ke-1
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Muhawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, Tahun 1984, Cet. Ke-1
- Munir, M., *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Kencana, Tahun 2006, Cet. Ke-1
- Munir, M. dan Ilaihi, Wahyu, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Prenada Media, Tahun 2006, Cet. Ke-1
- Munsiy, Abdul Kadir, *Metode diskusi dalam dakwah*, Surabaya: Percetakan al-Ikhlas, Tahun 1982, Cet. Ke-1
- Nakamura, Mitsuo, *Bulan Sabit Terbit di Atas Pohon Beringin: Studi Tentang Pergerakan Muhammadiyah di Kota Gede Sekitar 1910-2010*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, Edisi Revisi Ditambah Bagian Dua, Tahun 2017, Cet. Ke-1
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, Tahun 2005, Cet. Ke-7
- Natsir, M., *Fiqhud Da'wah*, Jakarta: Media Da'wah, Tahun 1988, Cetakan Kelima
- Nasr, Seyyed Hossein, *Islam Religion History and Civilization*, New York: Harper San Francisco, Tahun 2003, Cet. Ke-1.
- PD Muhammadiyah Kabupaten Garut, *Profil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Garut*, t.t.
- PD Muhammadiyah Kabupaten Garut, *Sejarah Muhammadiyah di Kabupaten Garut*, t.t.

- Peacock, James L., *Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam di Indonesia*, Jakarta: Citra Kreatif, Tahun 1986
- Pemerintah Kabupaten Garut, *Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024*, Garut: Pemerintah Kabupaten Garut, Tahun 2019
- Philips, Rhonda and H. Pitman, Robert, *An Introduction to Community Development*, Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN Simultaneously published in the USA and Canada, First published 2009
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah: Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47 Makassar*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tahun 2015, Cet. Ke-1, hal. 9.
- Pondok Pesantren Darul Arqom Muhammadiyah Daerah Garut, *Laporan FISSDAM (Field Study Santri Darul Arqom Muhammadiyah) PCM Cilawu*, Tahun Ajaran 2019-2020
-
- _____, *Laporan FISSDAM (Field Study Santri Darul Arqom Muhammadiyah) PCM Garut Kota*, Tahun Ajaran 2019-2020
-
- _____, *Laporan FISSDAM (Field Study Santri Darul Arqom Muhammadiyah) PCM Panawuan*, Tahun Ajaran 2019-2020
- Pratiknya, A. Watik (ed.), *Islam dan Dakwah: Pergumulan antara Nilai dan Realitas*, Yogyakarta: PP Muhammadiyah Majelis Tabligh, 1988
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Tahun 2002
- Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Kamus Istilah Keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu)*, Jakarta, Tahun 2015, Cet. Ke-2
- Quthb, Sayyed, *Fi Zhilal Al-Qur`an*, Jilid V.
- RS, Syamsuddin, *Sejarah Dakwah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Tahun 2016
- Sairin, Weinata, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Tahun 2008, Cet. Ke-2.
- Sholeh, H.A Rosyad, *Manajemen Dakwah Muhammadiyah*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, Tahun 2017, Cet. Ke-4

- Silalahi, Dr. Ulber, MA, *Asas-Asas Manajemen*, Bandung: PT Refika Aditama, Tahun 2017, Cet. Ke-4
- Soetomo, *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka*, Yogyakarta: :Pustaka Pelajar, Tahun 2012, Cet. Ke-2
- Syamsul Hidayat. “Dakwah Kultural dalam Dinamika Purifikasi Gerakan Muhammadiyah” dalam *Jurnal Shabran* Edisi 02, Vol. XIX, April 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014, Cet. Ke-20
- Sukalele, Daniel, “Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah”, Dalam wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah. Diakses tanggal 30 April 2019.
- Sumodiningrat, Prof. Gunawan, Ph.D dan Wulandari, Ari, S.S., M.A., *Membangun Indonesia dari Desa*, Yogyakarta: Media Pressindo, Tahun 2016, Cet. Ke-1
- Suratmadji, Teddy, *Dakwah di Dunia Cyber: Panduan Praktis Berdakwah Melalui Internet*, Jakarta: Madani Institute, Tahun 2010, Cet. Ke-1
- Sutiyono dan Ni Nyoman Seriati, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Melaksanakan Revitalisasi Budaya Lokal "Bersih Desa" di Ketingan, Sleman*, FBS Universitas Negeri Yogyakarta, t.t.
- Syamsulbahri, “Tantangan dan Peluang Pengembangan Masyarakat dalam Era Otonomi Daerah” dalam Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini, A. Halim (Ed.), *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, Tahun 2005, Cet. Ke-1
- Terry, George R. dan Rue, Leslie W., *Dasar-Dasar Manajemen: Edisi Revisi*, Jakarta: Bumi Aksara, Tahun 2019, Cet. Ke-1
- Tim Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus, “Konsep Dakwah Kultural” makalah disampaikan pada Sidang Tanwir Muhammadiyah di Denpasar Bali, 24-27 Januari 2002
- Tirtosudiro, Achmad, *Metode Pembangunan Qaryah Thayyibah: Suatu Pendekatan Pemerataan Pembangunan*, Jakarta: PT Intermedia, Tahun 1997, Cet. Ke-1
- Todaro, Michael P, dan Smith, Stephen C, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan*, Jakarta : Penerbit Erlangga, Tahun 2004
- Vardiansyah, Dani, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Indeks. Tahun 2008. Cet, Ke-1

Yunan, M. Yunan, *Analog dengan Negara, Iuran dan Infaq adalah Ketentuan Konstitusi*, Jakarta: Tim Asisten Bendahara Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.t..

Website

<https://www.garutkab.go.id/page/sejarah-singkat> diakses hari Kamis, 4 Juli 2019

<https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/nbwqp7JK-pemerintah-dorong-kesejahteraan-masyarakat-garut-lewat-pariwisata> diakses hari Kamis, 4 Juli 2019

<https://news.koropak.co.id/7880/laju-pertumbuhan-ekonomi-garut-masih-rendah> diakses hari Kamis, 4 Juli 2019

<https://telusur.co.id/2019/05/csis-muhammadiyah-satu-satunya-organisasi-yang-mampu-ngurus-diri-sendiri/> diakses pada tanggal 14 Mei 2019.